



**LAPORAN AKTUALISASI
PESERTA PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI
ANGKATAN II**

**Optimalisasi Peran Pusat Kajian Anggaran
Dalam Memberikan Dukungan Substansi Kepada Anggota Dewan
Melalui Analisis Kritis yang Tepat Sasaran**

Nama : Riza Aditya Syafri
NIP : 199411172019031001
Jabatan : Calon Analis APBN Ahli Pertama

**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

2019

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan II 2019

Judul : Optimalisasi Peran Pusat Kajian Anggaran Dalam
Memberikan Dukungan Substansi Kepada Anggota
Dewan Melalui Analisis Kritis Yang Tepat Sasaran

Nama : Riza Aditya Syafri

NIP : 199411172019031001

NDH : 10

Jabatan : Calon Analis APBN Ahli Pertama

Golongan/ Pangkat : Penata Muda Tk.I / III a

Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Jakarta, 31 Agustus 2019

Peserta Diklat,



Riza Aditya Syafri, S.Ak.
NIP. 199411172019031001

Mengetahui,
Coach



Agus Supriyono, S.S., M.A.P.
NIP. 196902082003121003

Menyetujui,
Mentor



Rastri Paramita, S.E., M.M.
NIP. 198001262014022002

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kami kemudahan sehingga kami dapat menyelesaikan laporan rancangan aktualisasi ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongan-Nya tentunya kami tidak akan sanggup untuk menyelesaikan laporan ini dengan baik.

Penyusunan laporan ini dapat terselesaikan karena adanya bantuan, bimbingan, dorongan, saran, dan nasehat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Rahaju Setya Wardani, S. H., M. M., selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
2. Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si, selaku Kepala Pusat Kajian Anggaran
3. Rastri Paramita, S.E., M.M., selaku mentor.
4. Agus Supriyono, S.S., M.A.P., selaku *coach*.

Laporan ini menyajikan tentang kegiatan yang dilakukan oleh penulis sebagai bentuk aktualisasi sebagai CPNS di Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN, serta Peran dan kedudukan ASN. Laporan ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran, memperkaya referensi dan literatur bagi pihak-pihak yang terkait.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga apa yang penulis susun dalam laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 31 Agustus 2019

Riza Aditya Syafri

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Visi & Misi Unit Kerja, Struktur Organisasi, dan Tusi Analisis APBN	3
2. Kondisi Saat Ini	7
3. Kondisi Yang Diharapkan	10
4. Identifikasi Isu	11
5. Teknik Analisis USG	15
6. Gagasan Pemecahan Isu	18
B. Tujuan	19
C. Manfaat	20
BAB II PELAKSANAAN AKTUALISASI	21
A. Rancangan Aktualisasi	21
B. Penjelasan Tahapan Kegiatan & Bukti Kegiatan	27
C. Stakeholders	50
D. Analisis Dampak Jika Kegiatan Tidak Dilakukan	50
E. Time Schedule	52
BAB III PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Matriks Pemilihan Isu Prioritas dengan Analisis	16
Tabel 2 Matrik Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS	22
Tabel 3 Nilai-Nilai Yang Terkandung dalam Kegiatan 1	27
Tabel 4 Nilai-Nilai Yang Terkandung dalam Kegiatan 2	34
Tabel 5 Nilai-Nilai Yang Terkandung dalam Kegiatan 3	42
Tabel 6 Nilai-Nilai Yang Terkandung dalam Kegiatan 4	47
Tabel 7 Stakeholders yang Terlibat dalam Proses Aktualisasi	50
Tabel 8 Analisis Dampak Jika Kegiatan Maupun Tahapan Kegiatan Tidak Dilakukan	51
Tabel 9 Time Table Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Pusat Kajian Anggaran	5
Gambar 2 Kegiatan, dan Tahapan Kegiatan Untuk Mencapai Kondisi Yang Diharapkan	22
Gambar 3 Kegiatan 1: Tahapan Kegiatan dan Output yang dihasilkan..	27
Gambar 4 Kegiatan 2: Tahapan Kegiatan dan Output yang dihasilkan..	34
Gambar 5 Kegiatan 3: Tahapan Kegiatan dan Output yang dihasilkan..	42
Gambar 6 Kegiatan 4: Tahapan Kegiatan dan Output yang dihasilkan..	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pasal 63 ayat (3) menyatakan bahwa setiap Calon PNS wajib menjalani masa percobaan. Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.

Adapun implementasi dari proses pendidikan dan pelatihan tersebut dilaksanakan dalam bentuk Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018. Tujuan dari dilaksanakannya Latsar CPNS ini adalah untuk mengembangkan kompetensi CPNS yaitu menunjukkan sikap perilaku bela negara; mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi) dalam pelaksanaan tugas jabatannya; mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); dan menunjukkan penguasaan Kompetensi Teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam rangka menjamin setiap CPNS memahami serta mampu menerapkan nilai-nilai yang didapat selama pembelajaran Latsar, didalam kurikulum Pelatihan Dasar CPNS, setiap CPNS wajib mengikuti agenda habituasi. Agenda ini memfasilitasi agar setiap peserta melakukan proses aktualisasi melalui pembiasaan diri

terhadap kompetensi yang telah diperolehnya melalui berbagai Mata Pelatihan yang telah dipelajari.

Sebagai bentuk pelaksanaan agenda habituasi, setiap CPNS diminta untuk membuat rancangan aktualisasi yang nantinya akan diimplementasikan pada saat aktualisasi di unit kerja masing-masing. Pada rancangan aktualisasi, CPNS diminta untuk merumuskan beberapa isu yang sekiranya menjadi persoalan di unit kerja. Dari beberapa isu tersebut kemudian dipilih satu isu yang paling krusial dengan menggunakan pendekatan *Urgency*, *Seriousness*, dan *Growth* (USG).

Selanjutnya, pada isu yang terpilih tersebut, CPNS diminta untuk mencari pemecahan masalah atas isu tersebut. Dalam implementasi kegiatan-kegiatan untuk pemecahan masalah tersebut, CPNS diminta untuk mengaitkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan mata pelajaran yang didapat selama latsar. Proses itulah yang selanjutnya disebut sebagai aktualisasi.

Namun, untuk dapat mengidentifikasi isu-isu dan memilih isu strategis pada unit kerja, peserta terlebih dahulu harus mengetahui mengenai Visi & Misi unit kerja, Struktur Organisasi (Kedudukan unit kerja & kedudukan peserta dalam organisasi), serta tugas dan fungsi pada jabatan yang akan peserta isi kedepannya.

Untuk itu, pada BAB I ini akan menjabarkan mengenai Visi & Misi Unit Kerja, Struktur Organisasi, serta Tugas dan Fungsi Analis APBN. Setelah tujuan dari organisasi diketahui serta tugas dan fungsi peserta dipahami, selanjutnya peserta dapat mengidentifikasi kondisi saat ini yang sekiranya masih dapat dioptimalkan agar tujuan dari unit kerja dapat tercapai (kondisi yang diharapkan).

Selanjutnya, pada BAB II akan menjabarkan mengenai rancangan aktualisasi yang akan dilakukan untuk mengatasi isu di unit kerja, beserta tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mengatasi isu tersebut. Akhirnya, pada BAB III, akan menjelaskan mengenai

kesimpulan dari aktualisasi yang peserta lakukan, dan keterkaitan aktualisasi yang peserta lakukan terhadap tujuan unit kerja.

Pada bagian selanjutnya, akan dijabarkan mengenai Visi & Misi Unit kerja, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Analis APBN, serta identifikasi isu yang terjadi di unit kerja.

1. Visi & Misi Unit Kerja, Struktur Organisasi, dan Tugas & Fungsi Analis APBN

1.1. Visi

"Menjadikan Pusat Kajian Anggaran sebagai organisasi pendukung DPR RI bidang keahlian anggaran yang profesional, andal, dan akuntabel"

Pusat Kajian Anggaran yang profesional mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Kajian Anggaran mempunyai kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI secara baik dan benar, dan juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan serta kualitas SDM.

Pusat Kajian Anggaran yang andal mempunyai makna bahwa Pusat Kajian Anggaran mampu melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi rencana-rencana kerja sesuai dengan tujuan yang akan dicapai serta dapat diimplementasikan.

Pusat Kajian Anggaran yang akuntabel mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi dukungan keahlian, Pusat Kajian Anggaran mampu bertanggung jawab atas tiap tindakan, keputusan, dan kebijakan termasuk pula di dalamnya pemberian informasi kepada publik sesuai tugas dan fungsi DPR dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI.

1.2 Misi

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, Pusat Kajian Anggaran menyusun misi sebagai berikut:

- a. Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung proses pelaksanaan fungsi anggaran Dewan.
- b. Memperkuat manajemen pengetahuan.
- c. Memperkuat pengembangan profesi Analis APBN.

1.3 Struktur Organisasi

Kedudukan dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang semakin kuat telah membuat peran DPR RI semakin penting dalam penyelenggaraan negara. Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya, DPR RI memerlukan sistem pendukung yang memberikan dukungan administratif, persidangan, dan keahlian yang berkualitas disertai dengan integritas, kinerja tinggi, dan kompetensi yang memadai.

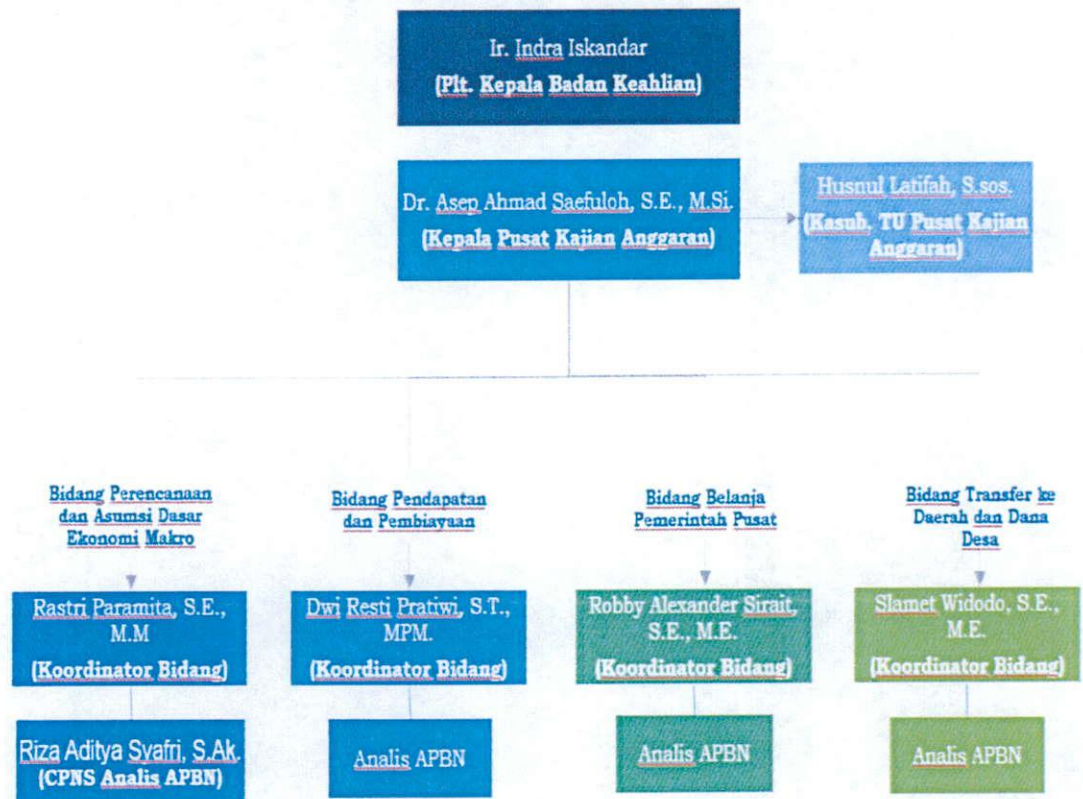
Oleh karena DPR RI membutuhkan dukungan dibidang keahlian dalam menjalankan tugasnya, pada tahun 2015, terjadi perubahan struktur organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang Organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Dalam Peraturan Presiden tersebut, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPR RI, dimana tugas Sekretariat Jenderal sebagai supporting sistem DPR RI di bidang administrasi dan persidangan, dan Badan Keahlian sebagai supporting sistem DPR RI dalam hal keahlian.

Salah satu unit kerja yang terdapat di Badan Keahlian adalah Pusat Kajian Anggaran. Pusat Kajian Anggaran memiliki tugas dan fungsi sebagai supporting sistem bagi Anggota Dewan dalam bentuk keahlian di bidang Anggaran. Pusat Kajian Anggaran di pimpin oleh

Eselon II yaitu seorang Kepala Pusat, yang saat ini dijabat oleh Bapak Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Gambar 1 Struktur Organisasi Pusat Kajian Anggaran

Struktur Organisasi Pusat Kajian Anggaran



Dalam membantu pekerjaannya, Kepala Pusat dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dalam hal administratif. Sedangkan dalam hal substantif, Kepala Pusat dibantu oleh para Analis APBN sebagai fungsional yang memiliki tugas dan fungsi salah satunya adalah menyusun analisis APBN, analisis hasil pemeriksaan BPK dan pertimbangan DPD untuk selanjutnya akan di distribusikan kepada para Anggota DPR di Badan Anggaran.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Analis APBN di Pusat Kajian Anggaran dikelompokkan kedalam empat bidang, yaitu (I) Bidang Pendapatan dan Pembiayaan; (II) Bidang Perencanaan dan Asumsi Dasar Ekonomi Makro; (III) Bidang Belanja Pemerintah Pusat;

dan (IV) Bidang Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Adapun CPNS sendiri berada di bawah Bidang Perencanaan dan Asumsi Dasar Ekonomi Makro.

Adapun keempat bidang tersebut menghasilkan berbagai produk sesuai dengan bidangnya masing-masing dalam rangka mendukung kerja Anggota Dewan di bidang Anggaran. Produk-produk yang dihasilkan oleh Pusat Kajian dapat berupa Buku APBN, Analisis APBN, Referensi (menyajikan data-data APBN terupdate, sesuai dengan isu yang diangkat), Jurnal APBN, maupun Buletin APBN (diterbitkan dua minggu sekali).

1.4 Tugas dan Fungsi Analis APBN Ahli Pertama

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis APBN menyatakan bahwa yang dimaksud Analis APBN adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan analisis APBN. Analis APBN termasuk dalam rumpun jabatan fungsional dimana jenjang jabatan fungsional Analis APBN terdiri dari Analis APBN Ahli Pertama, Analis APBN Ahli Muda, Analis APBN Ahli Madya, dan Analis APBN Ahli Utama. Untuk Analis APBN Ahli Pertama memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- A. Melakukan pembahasan internal dalam rangka persiapan mengikuti dan/atau mendampingi rapat-rapat DPR sesuai siklus APBN, BPK, dan DPD;
- B. Mengumpulkan data dan informasi dalam rangka penyusunan laporan dalam rapat-rapat DPR RI sesuai siklus APBN, BPK, DPD;
- C. Melakukan pendampingan dan dukungan keahlian dalam rangka rapat-rapat DPR RI sesuai siklus APBN, BPK, DPD;
- D. Pengumpulan data dan informasi dari Kementerian/Lembaga/Pemda/dan lembaga lainnya;

- E. Menyusun Analisis APBN, analisis hasil pemeriksaan BPK dan pertimbangan DPD;
- F. Menyusun referensi APBN, hasil pemeriksaan BPK dan pertimbangan DPD, termasuk menyusun laporan kegiatan pendalaman materi, data dan informasi yang memerlukan penggalian data-data primer langsung dari sumber data, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, Instansi negara dan swasta dalam dan luar negeri;
- G. Menyusun Analisis Ringkas Cepat;
- H. Mengikuti diskusi mengenai analisis APBN, referensi APBN, BPK dan DPD, serta Analisis Ringkas Cepat (ARC);
- I. Memberikan data dan informasi dengan tema berdasarkan permintaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- J. Melakukan pembahasan evaluasi dan pelaporan sesuai output;
- K. Melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh atasan;
- L. Membuat konsep laporan kerja kepada atasan secara berkala dan setiap waktu diperlukan.

Berdasarkan penjabaran mengenai Visi & Misi unit kerja, tugas dan fungsi Pusat Kajian Anggaran, serta tugas dan fungsi Jabatan Analis APBN, selanjutnya penulis dapat mulai mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat Pusat Kajian Anggaran untuk mencapai tujuannya.

2. Kondisi Saat Ini

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 pasal 29 menjelaskan bahwa Badan Keahlian mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang keahlian. Dalam pasal tersebut secara jelas menggambarkan bahwa pengguna utama dari produk-

produk yang dihasilkan oleh Pusat Kajian Anggaran adalah Anggota Dewan.

Disamping itu, pada pasal 29 Perpres Nomor 27 Tahun 2015 tersebut juga menggambarkan bahwa Badan Keahlian memiliki tugas untuk mendukung Anggota Dewan di bidang keahlian (substansi), dalam hal ini Pusat Kajian Anggaran mendukung kerja Anggota Dewan di bidang anggaran. Sehingga, perlu untuk dipastikan bahwa seluruh Analis APBN yang ada di Pusat Kajian Anggaran memiliki kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh seorang Analis APBN sesuai dengan jenjang jabatan yang dimilikinya.

Berdasarkan dua indikator diatas, **pertama** mengenai produk-produk yang dihasilkan oleh Pusat Kajian Anggaran, sudah sejauh mana produk-produk yang dihasilkan oleh Pusat Kajian Anggaran termanfaatkan oleh para Anggota Dewan, dan sejauh apa produk-produk tersebut memberikan manfaat terhadap rapat-rapat yang dilakukan oleh Anggota Dewan dengan stakeholdersnya, maupun ketermanfaatan produk-produk Pusat Kajian Anggaran dalam pengambilan keputusan oleh Anggota Dewan. **Kedua**, sudah sesuaikah kompetensi para Analis APBN yang ada di Pusat Kajian Anggaran dengan standar kompetensi analis APBN yang berlaku, sehingga dapat mendukung kerja Anggota Dewan dalam hal substansi secara berkualitas?

Pada indikator pertama, yaitu ketergunaan produk-produk di Pusat Kajian Anggaran, berdasarkan pengalaman selama bekerja di Pusat Kajian Anggaran, penulis menilai bahwa kualitas produk-produk yang di hasilkan di Pusat Kajian Anggaran sudah sangat bagus. Namun, terdapat indikasi bahwa produk-produk tersebut belum termanfaatkan secara maksimal oleh para Anggota Dewan.

Hal tersebut dapat dibuktikan melalui masih jarang nya produk-produk Pusat Kajian Anggaran yang dibawa oleh Anggota Dewan selama proses rapat-rapat dengan mitra kerjanya. Selain itu, apabila produk Pusat Kajian Anggaran dianggap telah memberikan manfaat yang optimal bagi para Anggota Dewan, idealnya Anggota Dewan akan meminta dukungan substansi berupa data, analisis, maupun permintaan pendampingan dalam setiap rapat-rapat yang berkaitan dengan APBN secara langsung dan berkala kepada Pusat Kajian Anggaran. Namun, berdasarkan observasi terbatas penulis, fungsi tersebut belum secara optimal dimanfaatkan oleh Anggota Dewan terhadap Pusat Kajian Anggaran.

Terdapat berbagai faktor yang mungkin dapat menjadi penyebab produk-produk Pusat Kajian Anggaran belum secara optimal dimanfaatkan oleh para Anggota Dewan. Pertama, terdapat kemungkinan bahwa eksistensi serta peranan Pusat Kajian Anggaran belum sepenuhnya diketahui dan dipahami baik oleh Anggota Dewan, Tenaga Ahli, maupun Sekretariat pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terutama Badan Anggaran (Banggar). Kedua, produk-produk yang dihasilkan di Pusat Kajian Anggaran umumnya merupakan analisis yang kompleks dan sistematis. Ditengah kesibukan Anggota Dewan, belum tentu para Anggota Dewan memiliki waktu yang cukup untuk membaca dan menelaah hasil analisis yang dibuat oleh Pusat Kajian Anggaran. Ketiga, bentuk penyajian yang lebih menarik mungkin dapat meningkatkan minat para Anggota Dewan untuk dapat membaca dan memanfaatkan produk-produk yang dihasilkan oleh Pusat Kajian Anggaran.

Sementara pada indikator kedua, kompetensi Analis APBN juga sangat perlu diperhatikan, mengingat bahwa Analis APBN memberikan dukungan substansi yang memerlukan kompetensi tertentu di bidang APBN. Disamping itu, dinamika APBN yang sangat dinamis dan

mengalami perubahan dalam waktu yang singkat, dan berubah-ubah setiap adanya suatu kebijakan baru, maka diperlukan adanya suatu sistematisasi pembelajaran secara berkala dan berkesinambungan bagi Analis APBN sehingga dapat mengikuti perkembangan dan permasalahan terkait dengan APBN. Pengembangan kompetensi bagi Analis APBN sangat diperlukan, agar data-data dan analisis yang dihasilkan dalam rangka mendukung kerja Anggota Dewan menjadi dapat dipertanggungjawabkan, dan didasari dengan teori dan dasar pemikiran yang kuat.

Dari kedua indikator tersebut, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa isu yang dapat dikembangkan, dan perlu dicari pemecahan masalahnya. Agar kedepannya Pusat Kajian Anggaran dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam membantu kerja-kerja para Anggota Dewan. Adapun isu yang dapat dikembangkan dari identifikasi masalah diatas antara lain:

1. Belum tersedianya petunjuk teknis serta model baku dalam penyusunan buku Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM);
2. Belum tersedianya fasilitas pengembangan kompetensi yang mandiri bagi para Analis APBN untuk meningkatkan kompetensinya;
3. Belum tersedianya Analisis APBN dalam bentuk yang ringkas, yang dapat menjadi suplemen bagi Anggota Dewan dalam rapat-rapat pembahasan sesuai siklus APBN dengan Pemerintah.

3. Kondisi Yang Diharapkan

Diharapkan dengan tersedianya solusi atas isu yang berkembang diatas, dapat mendukung upaya unit kerja untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Adapun kondisi jika isu-isu diatas terselesaikan antara lain:

I. Tersedianya petunjuk teknis dan model baku yang dapat digunakan dalam penyusunan buku Asumsi Dasar Ekonomi Makro

“Dengan tersedianya petunjuk teknis yang jelas dan model baku, dapat mempercepat proses penyusunan Buku Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan memperbaiki kualitas dari buku yang dihasilkan.

II. Tersedianya fasilitas pengembangan kompetensi sebagai wadah untuk pengembangan kompetensi bagi para Analis APBN

“Dengan tersedianya fasilitas pengembangan kompetensi seperti e-learning maupun fasilitas lainnya dan diupdate secara berkala, setiap Analis APBN dapat dengan mudah mengupdate dan meningkatkan kompetensi yang dimilikinya.”

III. Tersedianya suatu analisis APBN dalam bentuk yang ringkas, yang dapat menjadi suplemen bagi Anggota Dewan dalam rapat-rapat pembahasan sesuai siklus APBN dengan Pemerintah

“Dengan tersedianya suatu analisis APBN dalam bentuk ringkas, menarik, serta membahas suatu isu tertentu sesuai dengan siklus APBN yang ada (tepat sasaran), dan disajikan secara menarik, diharapkan dapat meningkatkan minat para Anggota DPR khususnya Badan Anggaran untuk membaca output yang dihasilkan Pusat Kajian Anggaran tersebut, serta dapat menjadi suplemen bagi Anggota Dewan dalam melakukan rapat-rapat dan koordinasi dengan Pemerintah.”

4. Identifikasi Isu

Berdasarkan kondisi saat ini yang penulis amati di Pusat Kajian Anggaran terhadap isu-isu yang berkembang tersebut, dirasa perlu untuk dilakukan identifikasi secara lebih terperinci terhadap ketiga isu tersebut agar selanjutnya dapat ditentukan isu mana yang akan penulis angkat dalam rancangan aktualisasi. Adapun penjabaran mengenai ketiga isu tersebut adalah sebagai berikut:

I. Belum tersedianya petunjuk teknis dan model baku yang dapat digunakan dalam penyusunan buku Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Pada bagian 1.3 mengenai Struktur Organisasi, telah disebutkan bahwa penulis berada dalam Bidang Perencanaan dan Asumsi Dasar Ekonomi Makro di Pusat Kajian Anggaran. Bidang Perencanaan dan Asumsi Dasar Ekonomi Makro setiap tahunnya selalu menerbitkan sebuah buku yang disebut Buku Prediksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro. Buku tersebut berisi mengenai prediksi yang dikeluarkan oleh Bidang Perencanaan dan Asumsi Dasar Ekonomi Makro terhadap tujuh asumsi makro (Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Suku Bunga SPN 3 Bulan, Kurs, ICP, Lifting Minyak, dan Lifting Gas) pada tahun yang akan datang.

Tujuan dari dibuatnya buku tersebut adalah sebagai bentuk dukungan Pusat Kajian Anggaran kepada Anggota Dewan untuk memberikan dukungan substansi dalam pembahasan siklus Kerangka Ekonomi Makro & Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM & PPKF).

Dalam penyusunan buku tersebut, selain dibutuhkan kemampuan dalam menganalisis isu-isu yang berkembang dalam asumsi dasar ekonomi makro, juga dibutuhkan kemampuan penggunaan alat analisis statistik (eviews, SPSS, Stata) untuk membentuk suatu permodelan analisis, sehingga dapat memprediksi (forecasting) besaran asumsi dasar ekonomi makro untuk periode yang akan datang.

Penulis mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam penyusunan Buku Prediksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro untuk tahun 2020. Berdasarkan observasi, pengalaman, serta hasil diskusi peserta dengan rekan dan atasan, terdapat beberapa kendala yang ditemui dalam penyusunan buku tersebut, yaitu belum tersedianya petunjuk teknis dalam penyusunan Buku Asumsi Dasar Ekonomi Makro, serta belum tersedianya model baku yang dapat digunakan secara konsisten untuk melakukan peralaman terhadap asumsi dasar ekonomi makro.

Akibat dari permasalahan tersebut, dalam penyusunan Buku Asumsi Dasar Ekonomi Makro, dibutuhkan waktu yang lebih panjang terutama untuk menemukan model terbaik yang dapat digunakan dalam analisis. Padahal, apabila terdapat petunjuk teknis serta model baku yang dapat digunakan tersebut, penyusunan Buku Asumsi Dasar Ekonomi Makro dapat lebih cepat, dan sisa waktu yang tersedia dapat difokuskan untuk memperbaiki kualitas dari isi tulisan serta memperindah penyajian, sehingga dapat lebih menarik bagi para Anggota Dewan untuk membacanya.

Berdasarkan identifikasi masalah yang dijelaskan diatas, penulis menilai **perlu adanya suatu petunjuk teknis serta model baku dalam penyusunan Buku Asumsi Dasar Ekonomi Makro.**

II. Belum tersedianya fasilitas pengembangan kompetensi sebagai wadah untuk pengembangan kompetensi bagi para Analis APBN

Dalam rangka memastikan Pusat Kajian Anggaran dapat memenuhi fungsinya dalam memberikan dukungan substansi kepada Anggota Dewan, setiap Analis APBN wajib memiliki kompetensi tertentu sehingga dapat mendukung kerja para Anggota Dewan dalam fungsi anggaran.

Adapun kompetensi tersebut diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 22 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis APBN, dijelaskan bahwa setiap Analis APBN harus memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan jenjang jabatan yang dimilikinya.

Namun, seiring dengan perkembangan waktu, ilmu pengetahuan juga mengalami perubahan, terutama dalam konteks APBN yang dapat berubah secara dinamis sesuai dengan perubahan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah. Perubahan-perubahan tersebut perlu dipahami dan diikuti oleh seluruh Analis APBN, ditengah kesibukan

Analisis APBN dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga pengetahuan yang dimiliki oleh Analisis APBN dapat selalu terupdate mengikuti perkembangan yang ada.

Saat ini, **belum tersedia suatu fasilitas yang dapat digunakan para analisis APBN sebagai wadah untuk mengupdate dan mengembangkan kompetensi yang mereka miliki.** Hal ini penting, karena berkaitan dengan kualitas analisis yang akan dihasilkan oleh Analisis APBN akan sangat dipengaruhi oleh kompetensi yang mereka miliki.

Harapannya, Pusat Kajian Anggaran dapat memiliki fasilitas e-learning, yang dapat menyajikan materi-materi diklat, baik dalam bentuk modul, video, maupun bentuk lainnya, dan disertai pertanyaan pada akhir setiap sesi, sehingga dapat membuat para Analisis APBN dapat mengembangkan kompetensi yang mereka miliki secara langsung hanya dengan mengakses melalui komputer masing-masing. Dalam hal ini Pusat Kajian Anggaran dapat berkoordinasi dan berkolaborasi baik dengan Pusdiklat, maupun BDTI dalam menyajikan fasilitas e-learning tersebut.

III. Belum tersedianya Analisis APBN dalam bentuk yang ringkas, yang dapat menjadi suplemen bagi Anggota Dewan dalam rapat-rapat pembahasan sesuai siklus APBN dengan Pemerintah.

Analisis APBN memiliki tugas dan fungsi dalam memberikan dukungan substansi bagi para Anggota Dewan dalam menjalankan fungsi anggaran yang dimilikinya. Selama ini, Analisis APBN telah memberikan dukungan substansi tersebut dengan menyediakan berbagai produk sesuai dengan yang dijelaskan pada bagian 1.3.

Produk-produk yang dihasilkan oleh Pusat Kajian Anggaran merupakan analisis secara mendalam dan detail, serta disajikan dalam bentuk buku, analisis, referensi, maupun jurnal yang dimuat dalam

halaman yang banyak. Secara substansi, produk-produk yang dihasilkan oleh Pusat Kajian Anggaran memiliki kualitas yang sangat baik, dan dapat berguna apabila analisis yang ada didalamnya dapat dimanfaatkan oleh para Anggota Dewan.

Namun, perlu disadari bahwa tidak setiap Anggota Dewan memiliki keleluasaan waktu untuk dapat membaca analisis yang dihasilkan oleh Pusat Kajian Anggaran di tengah kesibukan Anggota Dewan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dibutuhkan suatu analisis yang memang benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Anggota Dewan, mengangkat isu-isu yang sesuai dengan isu yang akan dibahas dalam rapat-rapat Anggota Dewan, disajikan secara menarik, dan berisikan *critical view* atas isu yang akan dibahas oleh Anggota Dewan dalam rapat-rapatnya.

Saat ini, memang **belum tersedianya Analisis APBN dalam bentuk yang ringkas, yang dapat menjadi suplemen bagi Anggota Dewan dalam rapat-rapat pembahasan sesuai siklus APBN dengan Pemerintah.** Dengan tersedianya analisis yang ringkas tersebut, diharapkan dapat diterima dan langsung di manfaatkan oleh Anggota Dewan, sehingga eksistensi dari Pusat Kajian Anggaran dapat diakui dan akan menjadi lebih termanfaatkan bagi para Anggota Dewan kedepannya

5. Teknik Analisis USG

Berdasarkan Identifikasi isu diatas, maka dapat dilakukan analisis dengan menggunakan teknik USG dengan matriks sebagai berikut:

Tabel 1 Matriks Pemilihan Isu Prioritas dengan Analisis

No	Isu	Kriteria			Jumlah Nilai
		U	S	G	
1	Belum tersedianya petunjuk teknis serta model baku yang digunakan dalam penyusunan buku Asumsi Dasar Ekonomi Makro	4	3	3	10
2	Belum tersedianya fasilitas pengembangan kompetensi sebagai wadah yang dapat dipergunakan bagi para Analis APBN untuk mengupgrade kompetensinya	3	3	3	9
3	Belum tersedianya Analisis APBN dalam bentuk yang ringkas, yang dapat menjadi suplemen bagi Anggota Dewan dalam rapat-rapat pembahasan sesuai siklus APBN dengan Pemerintah.	4	4	4	12

Berdasarkan pendekatan analisis USG, dimana Urgency (U) memiliki tingkatan antara 1-5, semakin besar angka yang ditetapkan, maka semakin Urgent isu tersebut untuk dilakukan. Begitupula dengan Seriousness (S) dan Growth (G), semakin besar angka yang ditetapkan maka semakin serius dan akan berkembang permasalahan/isu tersebut.

Berdasarkan Analisis USG tersebut di atas, maka isu yang dipilih adalah Isu ke-3 dengan rumusan isu: **Belum tersedianya Analisis APBN dalam bentuk yang ringkas, yang dapat menjadi suplemen bagi Anggota Dewan dalam rapat-rapat pembahasan sesuai siklus APBN dengan Pemerintah.** Adapun analisis atas pendekatan USG atas isu yang terpilih tersebut sebagai berikut:

Urgency

Berdasarkan analisis USG yang telah dilakukan, isu ketiga merupakan isu yang sangat perlu untuk segera diselesaikan. Karena, Isu ketiga tersebut berkaitan langsung dengan eksistensi Pusat Kajian Anggaran. Dengan tersedianya sebuah analisis ringkas dan menarik diharapkan Anggota Dewan dapat lebih tertarik untuk membacanya, karena disajikan dengan ringkas, dan isu yang diangkat sesuai dengan yang dibutuhkan Anggota Dewan. Dengan dimanfaatkannya analisis ini, diharapkan keberadaan Pusat Kajian Anggaran dapat lebih dirasakan manfaatnya, serta memberikan kontribusi secara langsung terhadap kinerja Anggota Dewan dalam melaksanakan Fungsi Anggaran yang dimilikinya.

Sementara dilihat dari ruang lingkupnya, isu ketiga merupakan isu yang paling luas ruang lingkupnya dibandingkan dengan kedua isu lainnya. Isu ketiga merupakan satu-satunya isu yang pemecahan masalahnya dapat mewakili peran Pusat Kajian Anggaran terhadap Anggota Dewan, serta manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh Anggota Dewan.

Sementara isu pertama, memiliki ruang lingkup yang lebih sempit yaitu terbatas pada Bidang Perencanaan & Asumsi Dasar Ekonomi Makro, walaupun manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh Anggota Dewan. Sementara isu kedua, memiliki ruang lingkup yang sama dengan isu ketiga yakni mencakup Pusat Kajian Anggaran, namun manfaatnya tidak dapat dirasakan langsung oleh para Anggota Dewan. Sehingga, penulis menilai bahwa isu ketiga merupakan isu yang paling urgent untuk segera dicari pemecahan masalahnya.

Seriousness

Sementara dinilai dari tingkat **keseriusannya (S)**, Isu ketiga ini selain berkaitan langsung terhadap kinerja dewan dalam menjalankan tugas-tugasnya, sehingga dapat memudahkan para Anggota Dewan dalam pengambilan keputusan, juga berdampak serius terhadap eksistensi Pusat Kajian Anggaran di mata Anggota Dewan. Belum Optimalnya pemanfaatan output dari Pusat Kajian Anggaran selama ini, dapat menyebabkan akan hilangnya eksistensi Pusat Kajian Anggaran kedepan, jika Pusat Kajian Anggaran tidak segera melakukan inovasi. Sementara kedua isu lainnya dinilai masih belum terlalu serius jika tidak segera diatasi.

Growth

Sementara dilihat dari kemungkinan *growth* nya, isu ketiga merupakan isu yang dapat terus berkembang kedepannya jika tidak segera diatasi. Dapat berkembang dalam artian peran dan eksistensi Pusat Kajian Anggaran dimata Anggota Dewan kedepannya dapat menghilang jika Pusat Kajian Anggaran tidak berbenah dan melakukan inovasi untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang memang benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan Anggota Dewan.

6. Gagasan Pemecahan Isu

Berdasarkan isu yang telah diuraikan dan telah dianalisis dengan teknik analisa USG, maka dalam rancangan aktualisasi ini penulis merekomendasikan gagasan pemecahan isu untuk membuat suatu Analisis APBN dalam bentuk ***Critical View Analysis***.

Critical View Analysis ini merupakan suatu analisis ringkas dengan paling banyak dua halaman (1 lembar) yang disajikan dalam format dan bentuk yang menarik. Adapun topik yang diangkat dalam *Critical View Analysis* ini merupakan topik yang disesuaikan dengan siklus dan pembahasan dalam APBN.

Sementara berdasarkan struktur tulisannya, *Critical View Analysis* dibagi dalam tiga bagian, dimana bagian pertama menyajikan data-data terkait dengan topik yang dibahas disertai analisis singkat, bagian kedua berisikan tantangan yang akan dihadapi Indonesia kedepan terkait dengan topik yang akan diangkat, dan bagian ketiga yang merupakan bagian inti dari analisis ini, berisikan daftar pertanyaan kritis yang nantinya dapat dipergunakan oleh para Anggota Dewan untuk bertanya kepada Pemerintah pada saat pembahasan.

Critical View Analysis bukan merupakan output utama yang dihasilkan oleh Pusat Kajian Anggaran, melainkan output tambahan (suplemen) yang disajikan bersamaan dengan penyajian output utama yang ada di Pusat Kajian Anggaran. *Critical View Analysis* ini nantinya dapat dijadikan sebagai suatu suplemen pendukung yang diberikan Pusat Kajian Anggaran untuk melengkapi output utama, dan **bertujuan** untuk “*menstimulus Anggota Dewan untuk lebih aktif bertanya pada saat pembahasan-pembahasan dengan Pemerintah*”.

Adapun *Critical View Analysis* ini muncul berdasarkan analisis gap yang telah dilakukan oleh penulis dan mentor. Analisis Gap dalam artian penulis berusaha untuk menyajikan suatu analisis dengan topik dan isu yang memang saat ini sedang berkembang, baik yang bersumber dari pembahasan dalam siklus pembicaraan pendahuluan, dalam

pembahasan Laporan Semester, maupun isu yang berkembang di media yang masih memerlukan pembahasan lebih lanjut, namun belum disediakan pembahasan analisisnya dalam output utama yang disajikan di Pusat Kajian Anggaran.

Critical View Analysis ini nantinya diharapkan dapat disajikan dan disampaikan kepada Anggota Dewan pada saat pembahasan di siklus APBN, dan akan dicetak sebanyak jumlah Anggota di Badan Anggaran (saat ini 98 Anggota).

Diharapkan dengan adanya suplemen ini Anggota Dewan dapat lebih tertarik untuk membacanya, karena hanya satu lembar dan disajikan dengan format yang menarik, sehingga dengan dibacanya Analisis *Critical View* tersebut oleh Anggota Dewan diharapkan eksistensi dari Pusat Kajian Anggaran dapat lebih meningkat serta message dalam analisis tersebut dapat tersampaikan. Selain itu, dengan dibacanya Analisis *Critical View* ini diharapkan dapat menstimulus para Anggota Dewan untuk lebih aktif dalam memberikan pertanyaan pada saat rapat-rapat pembahasan dengan Pemerintah.

B. Tujuan

Tujuan dari dibuatnya *Critical View Analysis* dengan mengangkat isu terkait APBN teraktual, beserta tantangan yang dihadapi, dan pertanyaan kritis terkait isu yang dibahas bertujuan untuk menarik minat baca para Anggota terutama dalam permasalahan di bidang Anggaran. Dengan tersampainya pesan analisis yang disertai dengan pertanyaan kritis terhadap suatu isu, diharapkan para Anggota Dewan akan lebih peka terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam perekonomian saat ini, sehingga dapat memberikan fungsi pengawasan terhadap anggaran secara lebih baik. Disamping itu, dengan disertainya pertanyaan kritis tersebut, dapat memicu para anggota dewan untuk lebih aktif terlibat dalam mengkritisi kebijakan yang diambil oleh Pemerintah, sebagai salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Anggota Dewan.

C. Manfaat

Dengan menyajikan suatu analisis yang ringkas namun terarah, diharapkan para Anggota Dewan lebih tertarik untuk membacanya, karena lebih simpel, praktis, namun sesuai dengan yang dibutuhkan Anggota Dewan. Dengan membaca analisis tersebut, diharapkan para Anggota Dewan juga akan lebih terbuka terhadap permasalahan-permasalahan yang berkembang terkait dengan APBN Indonesia. Disamping itu, dalam analisis yang akan disajikan juga akan disertai dengan daftar pertanyaan kritis yang dapat membantu para Anggota Dewan untuk mengkritisi dan mengajukan pertanyaan terhadap permasalahan-permasalahan dalam isu yang akan diangkat, secara langsung kepada Pemerintah pada saat pembahasan APBN Induk maupun rapat-rapat lainnya dengan Pemerintah.

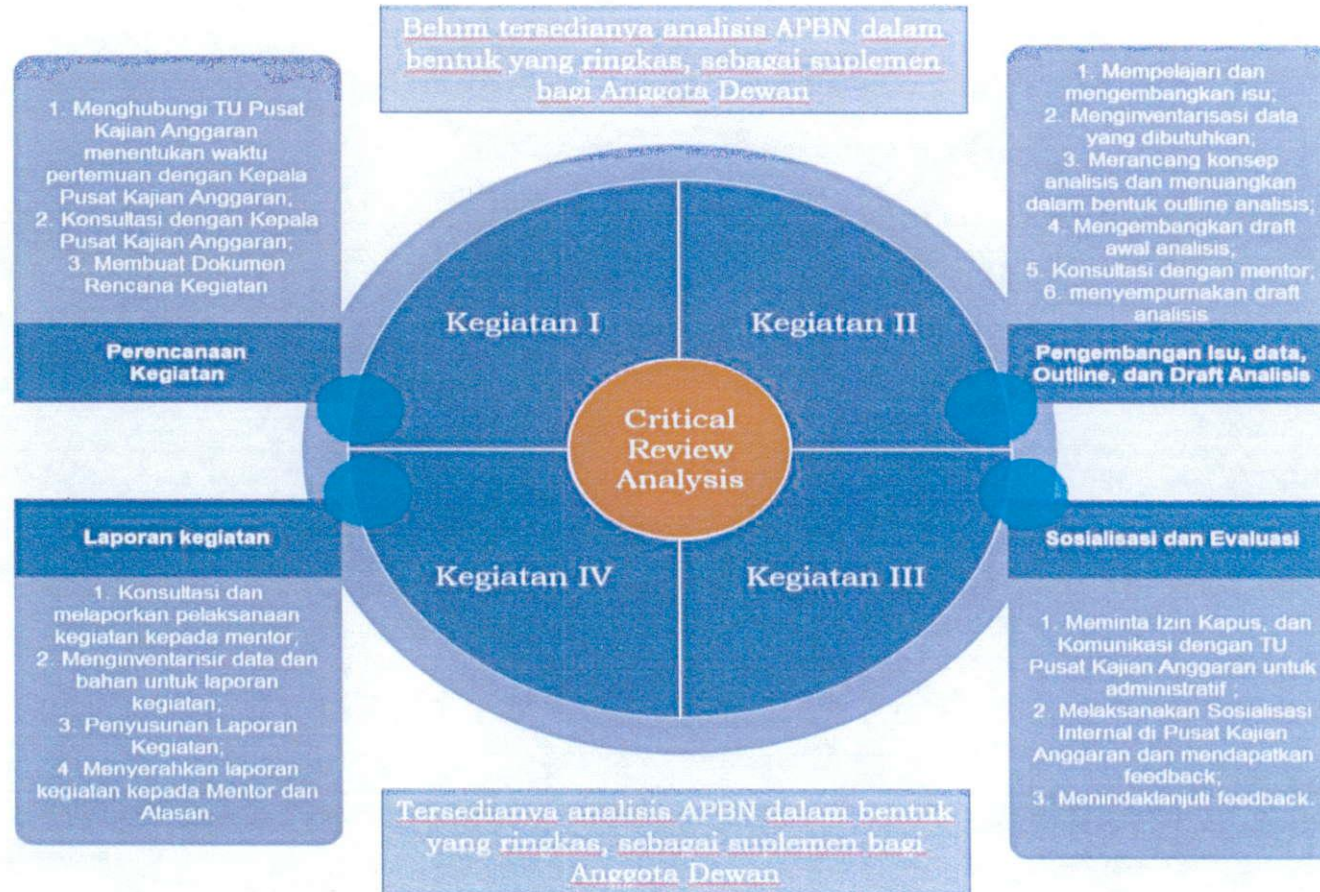
BAB II

PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. Rancangan Aktualisasi

Unit Kerja	: Pusat Kajian Anggaran
Identifikasi Isu	: <ol style="list-style-type: none">1. Belum tersedianya petunjuk teknis serta model baku yang digunakan dalam penyusunan buku Asumsi Dasar Ekonomi Makro2. Belum tersedianya fasilitas pengembangan kompetensi sebagai wadah yang dapat dipergunakan bagi para Analis APBN untuk mengupgrade kompetensinya3. Belum tersedianya Analisis APBN dalam bentuk yang ringkas, yang dapat menjadi suplemen bagi Anggota Dewan dalam rapat-rapat pembahasan sesuai siklus APBN dengan Pemerintah
Isu yang Diangkat	: Belum tersedianya Analisis APBN dalam bentuk yang ringkas, yang dapat menjadi suplemen bagi Anggota Dewan dalam rapat-rapat pembahasan sesuai siklus APBN dengan Pemerintah
Gagasan Pemecahan Isu	: Membuat Analisis dalam bentuk Critical View sebagai suplemen atas output utama, dengan mengangkat isu aktual terkait APBN beserta tantangan yang dihadapi, dan pertanyaan kritis terkait isu yang dibahas.

Gambar 2 Kegiatan, dan Tahapan Kegiatan Untuk Mencapai Kondisi Yang Diharapkan



Tabel 2 Matrik Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Melakukan konsultasi dengan atasan untuk merencanakan kegiatan dan isu yang akan dikembangkan dalam analisis	<p>1.1 Menghubungi Tata usaha Pusat Kajian Anggaran untuk mendapatkan tanggal konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran;</p> <p>1.2 Konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran & mentor terkait rancangan kegiatan dan penetapan isu yang akan dibahas;</p> <p>1.3 Membuat dokumen perencanaan kegiatan</p>	<p>1.1 Catatan Hasil komunikasi dengan Tata Usaha Pusat Kajian Anggaran;</p> <p>1.2 Laporan Singkat hasil konsultasi;</p> <p>1.3 Dokumen Perencanaan Kegiatan</p>	<p>Adapun Keterkaitan kegiatan satu terhadap mata pelatihan antara lain (*Penjelasan terinci pada bagian B. Penjelasan Tahapan Kegiatan):</p> <p>1. Etika Publik; 2. Akuntabilitas; 3. Komitmen Mutu.</p>	<p>Adapun Kontribusi kegiatan satu terhadap Tusi/Tujuan Organisasi antara lain: Dengan melakukan konsultasi bersama atasan maka fungsi organisasi yaitu koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pusat Kajian Anggaran dapat tercapai.</p> <p>Perencanaan yang baik dapat berkontribusi mewujudkan visi Pusat Kajian Anggaran yang profesional. Hal ini karena perencanaan berperan penting dalam mewujudkan profesionalitas organisasi.</p>	<p>Adapun Keterkaitan kegiatan satu terhadap mata pelatihan antara lain (*Penjelasan terinci pada bagian B. Penjelasan Tahapan Kegiatan):</p> <p>1. Akuntabilitas; 2. Profesional.</p>

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2.	Mengembangkan isu dan data yang digunakan dalam analisis, mengembangkan outline, dan draft awal Analisis	<p>2.1 Mempelajari dan mengembangkan isu-isu umum terkait APBN dalam Laporan APBN Semester I 2019;</p> <p>2.2 Mencari data-data yang akan digunakan berdasarkan isu yang dipilih;</p> <p>2.3 Merancang konsep analisis yang akan ditulis, dan menuangkan dalam bentuk Outline Analisis</p> <p>2.4 Mengembangkan outline menjadi draft awal analisis;</p> <p>2.5 Konsultasi dengan mentor untuk meminta masukan terkait draft awal;</p> <p>2.6 Menindaklanjuti masukan dari mentor, dan menyempurnakan analisis.</p>	<p>2.1 Daftar inventarisir isu;</p> <p>2.2 Daftar Inventarisir data;</p> <p>2.3 Rancangan Konsep tulisan dan outline analisis;</p> <p>2.4 Draft Awal Analisis;</p> <p>2.5 Catatan hasil konsultasi dengan mentor;</p> <p>2.6 Draft yang telah diperbaiki</p>	Adapun Keterkaitan kegiatan dua terhadap mata pelatihan antara lain (*Penjelasan terinci pada bagian B. Penjelasan Tahapan Kegiatan): 1. Akuntabilitas; 2. Komitmen Mutu; 3. Nasionalisme; 4. Pelayanan Publik.	Adapun Kontribusi kegiatan dua terhadap Tusi/Tujuan Organisasi antara lain: Dengan mengembangkan analisis dengan menggunakan data yang akurat, dan relevan, serta adanya pembaruan dalam bentuk penyajian analisis dalam bentuk Critical View yang ringkas dan terarah, maka akan membuat kualitas hasil analisis yang dihasilkan menjadi lebih baik, sehingga tujuan organisasi sebagai supporting sistem Anggota Dewan dapat tercapai.	Adapun Keterkaitan kegiatan dua terhadap mata pelatihan antara lain (*Penjelasan terinci pada bagian B. Penjelasan Tahapan Kegiatan): 1. Akuntabel; 2. Profesional; 3. Integritas.
3.	Sosialisasi Analisis kepada pihak internal Pusat Kajian Anggaran, memperoleh	3.1 Meminta izin kepada Kepala Pusat untuk mengadakan sosialisasi internal terkait Analisis yang dilakukan, serta	3.1 Surat Undangan Pelaksanaan Sosialisasi	Adapun Keterkaitan kegiatan tiga terhadap mata pelatihan antara lain (*Penjelasan terinci pada	Adapun Kontribusi kegiatan tiga terhadap Tusi/Tujuan Organisasi antara lain:	Adapun Keterkaitan kegiatan tiga terhadap mata pelatihan antara lain (*Penjelasan terinci pada bagian B.

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	feedback, dan menindaklanjuti feedback yang diterima	<p>Melakukan konsultasi dengan Tata Usaha di Pusat Kajian Anggaran untuk persiapan administrasi;</p> <p>3.2 Melakukan sosialisasi internal di Pusat Kajian Anggaran, dan mendapatkan masukan dari hasil sosialisasi;</p> <p>3.3 Menindaklanjuti masukan yang diterima</p>	<p>3.2 Daftar hadir sosialisasi;</p> <p>3.2 Laporan Singkat hasil sosialisasi;</p> <p>3.2 Bahan presentasi;</p> <p>3.3 Revisi analisis yang dibuat;</p>	<p>bagian B. Penjelasan Tahapan Kegiatan):</p> <p>1. Etika Publik;</p> <p>2. Komitmen Mutu;</p> <p>3. Whole of Government</p>	<p>Dengan mengadakan sosialisai terkait hasil analisis dalam bentuk Critical View Analysis ke rekan-rekan pegawai dalam lingkup internal diharapkan dapat menjadi inspirasi untuk berinovasi. Hal ini juga sebagai media untuk berbagi pengetahuan sehingga akan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan organisasi yakni terkait manajemen pengetahuan dan kemudian akan berdampak pada terciptanya profesionalitas organisasi melalui pembangunan profesionalisme pegawainya.</p> <p>Selain itu, sosialisasi yang dilakukan juga sebagai bentuk penjaminan mutu atas setiap output yang</p>	<p>Penjelasan Tahapan Kegiatan):</p> <p>1. Profesional.</p>

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
					dihasilkan di Pusat Kajian Anggaran, karena output tersebut akan di review dan diberikan masukan oleh seluruh Analis APBN di Pusat Kajian Anggaran.	
4.	Pembuatan Laporan Kegiatan	<p>4.1 Melakukan konsultasi dengan mentor, Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada mentor;</p> <p>4.2 Pengumpulan data dan bahan-bahan yang diperlukan untuk menyusun laporan kegiatan;</p> <p>4.3 Penyusunan laporan kegiatan;</p> <p>4.4 Menyerahkan laporan kegiatan ke mentor dan atasan</p>	<p>4.1 Catatan hasil konsultasi dengan mentor;</p> <p>4.2 Daftar inventarisir bahan-bahan yang digunakan;</p> <p>4.3 Laporan Hasil Kegiatan;</p> <p>4.4 Bukti terima Laporan dari mentor dan atasan</p>	Adapun Keterkaitan kegiatan empat terhadap mata pelatihan antara lain (*Penjelasan terinci pada bagian B. Penjelasan Tahapan Kegiatan): 1. Akuntabilitas; 2. Pelayanan Publik.	Adapun Kontribusi kegiatan empat terhadap Tusi/Tujuan Organisasi antara lain: Dengan melakukan pelaporan terhadap kegiatan yang telah dilakukan maka, hal tersebut dapat menunjukkan komitmen untuk menegakkan nilai-nilai akuntabilitas yaitu transparansi dan pelaporan.	Adapun Keterkaitan kegiatan empat terhadap mata pelatihan antara lain (*Penjelasan terinci pada bagian B. Penjelasan Tahapan Kegiatan): 1. Akuntabel

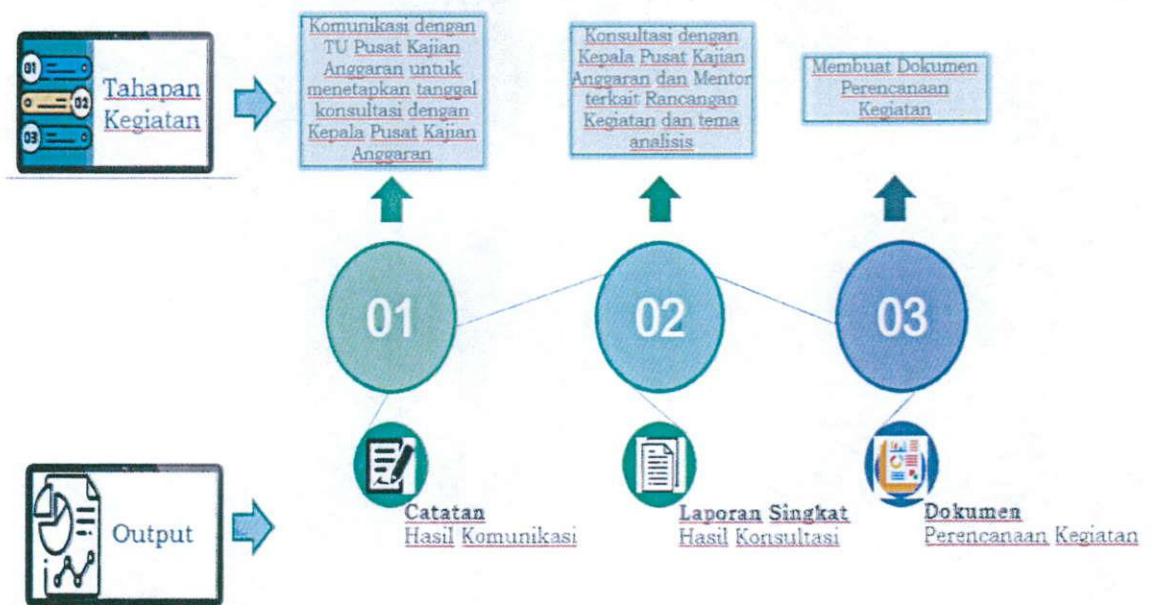
B. Penjelasan Tahapan Kegiatan & Bukti Kegiatan

Untuk dapat mencapai hasil yang optimal, setiap kegiatan dan tahapan kegiatan dalam rancangan aktualisasi ini harus dijabarkan secara detail agar dalam pelaksanaannya dapat direalisasikan dengan baik. Untuk itu, pada bagian ini kegiatan dan tahapan kegiatan tersebut akan dijelaskan secara lebih detail, beserta dengan implementasi hasil kegiatan yang telah dilakukan selama proses aktualisasi.

Deskripsi Kegiatan:

1. Konsultasi dengan atasan untuk merencanakan kegiatan dan isu yang akan dikembangkan dalam analisis

Gambar 3 Kegiatan 1: Tahapan Kegiatan dan Output yang dihasilkan



Tabel 3 Nilai-Nilai Yang Terkandung dalam Kegiatan 1

No	ANEKA	WoG, M.ASN, Pelayanan Publik	Nilai Organisasi (RAPI)
1.	Akuntabilitas	-	Akuntabel
2.	Etika Publik	-	Profesional
3.	Komitmen Mutu	-	-

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa apa yang akan dilakukan oleh penulis ini sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh unit kerja. Dalam kegiatan ini, penulis melakukan konsultasi

dengan Koordinator Bidang Asumsi Dasar Ekonomi Makro di Pusat Kajian Anggaran dan dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan Kepala Pusat Kajian Anggaran dapat mengetahui dengan jelas apa yang akan dilakukan oleh penulis selaku CPNS dalam aktualisasi yang akan dilakukan. Disamping itu, kegiatan pertama ini juga sebagai salah satu bentuk perencanaan yang dilakukan oleh penulis dalam melaksanakan aktualisasi.

1.1 Tahapan Kegiatan dan Output

Dalam kegiatan pertama ini terdiri atas tiga tahapan kegiatan, yaitu:

a) Melakukan komunikasi dengan bagian Tata Usaha di Pusat Kajian Anggaran untuk menetapkan waktu pertemuan dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran

Dalam tahapan kegiatan ini, penulis mencoba untuk melakukan koordinasi dengan tata usaha di Pusat Kajian Anggaran terkait dengan jadwal konsultasi yang akan dilakukan. Hal ini diperlukan ditengah kesibukan Kepala Pusat Kajian Anggaran dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga penulis perlu menyesuaikan dengan jadwal Kepala Pusat Kajian Anggaran. Bagian tata usaha yang mengurus administratif di Pusat Kajian Anggaran lebih mengetahui jadwal dan ketersediaan waktu dari Kepala Pusat Kajian Anggaran, sehingga penulis perlu melakukan komunikasi terlebih dahulu. Adapun output yang dihasilkan dalam tahapan kegiatan ini adalah catatan hasil komunikasi yang penulis lakukan dengan Bagian Tata Usaha di Pusat Kajian Anggaran (***Output terlampir Lampiran Kegiatan I 1.1**).

- b) Melaksanakan konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran & mentor terkait rancangan aktualisasi ang akan dilakukan***

Gambar 4 Proses Konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran



Pada tahapan kegiatan ini penulis menemui Kepala Pusat Kajian anggaran dengan CPNS lainnya beserta mentor untuk menjelaskan rancangan aktualisasi yang akan dilaksanakan. Setelah menjelaskan rancangan aktualisasi, Kepala Pusat Kajian Anggaran memberikan pandangan dan masukannya terkait dengan produk aktualisasi yang akan penulis buat. Selanjutnya, penulis bersama mentor dan Kepala Pusat Kajian Anggaran mendiskusikan mengenai tema analisis yang akan dibuat dan sistematika penulisan yang akan dikembangkan agar menarik dan tepat sasaran bagi Anggota Dewan. Berdasarkan pada tahapan kegiatan ini, disepakati sebagai berikut:

- I. Terdapat beberapa isu yang disarankan oleh mentor maupun atasan, yaitu mengenai a) Tingkat Inflasi yang rendah; b) Kondisi Neraca Perdagangan Indonesia; c)

Hilirisasi Industri; d) Mitigasi Risiko Nilai Tukar Rupiah. Dari empat isu yang disarankan tersebut, penulis memilih isu pertama yaitu mengenai **tingkat inflasi Indonesia yang rendah**.

II. Sistematika penulisan yang telah disepakati antara lain:

- a) Analisis disajikan dalam dua halaman;
- b) Analisis diberi nama *Critical View Analysis*;
- c) Pada bagian pertama analisis berisikan data realisasi inflasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir yang cenderung dibawah 3,5 persen, dan hasil prediksi inflasi Indonesia baik yang dilakukan tim Pusat Kajian Anggaran, maupun beberapa Lembaga Internasional (disajikan dalam bentuk yang menarik, gambar atau tabel perbandingan) disertai analisis singkat;
- d) Pada bagian kedua berisikan box yang menjelaskan tantangan Inflasi Indonesia saat ini dan kedepan;
- e) Pada bagian ketiga berisikan *critical view* berupa daftar pertanyaan kritis disertai analisis ringkas, dimana pertanyaan kritis ini nantinya dapat digunakan oleh Anggota Dewan untuk bertanya kepada Pemerintah pada saat pembahasan dengan Pemerintah;
- f) Analisis disajikan untuk APBN Induk, dan pembahasan setelahnya;

Pemilihan isu yang akan diangkat dalam analisis yang penulis buat, sebelumnya telah penulis komunikasikan dan konsultasikan kepada mentor pada saat pembuatan Rancangan Aktualisasi, sementara pada tahapan kegiatan ini penulis hanya mengkonfirmasi kepada mentor dan atasan bahwa penulis akhirnya mengangkat isu mengenai inflasi dalam analisis yang akan penulis buat.

Adapun latar belakang mengenai isu yang penulis angkat yaitu mengenai inflasi yang rendah berawal dari pembahasan pembicaraan pendahuluan siklus APBN, serta perkembangan di media yang banyak membahas mengenai rendahnya level inflasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini yang dibahas oleh banyak ekonom Indonesia, bahkan masih dibahas oleh Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla di dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi pada 25 Juli 2019 lalu.

Selanjutnya, penulis melihat bahwa terdapat output gap dimana isu tersebut saat ini tengah berkembang, namun belum terdapat analisis di Pusat Kajian Anggaran yang dapat mengakomodir pembahasan isu tersebut. Untuk itu, penulis merumuskan Analisis singkat dengan tema inflasi tersebut sebagai suplemen bagi Anggota Dewan di Badan Anggaran yang diharapkan dapat membantu pada saat pembahasan lebih lanjut dengan Pemerintah.

Selain itu, pada tahapan kegiatan ini juga dirumuskan mengenai konsep penulisan serta struktur penulisan yang dimuat dalam analisis tersebut. Adapun pada tahapan kegiatan ini output yang dihasilkan berupa Laporan Singkat konsultasi yang dilakukan (***Output terlampir Lampiran Kegiatan I 1.2**).

c) *Membuat dokumen perencanaan kegiatan*

Pada tahapan kegiatan ini, setelah konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran dan mentor dilakukan, serta telah mendapatkan kesepakatan tentang isu dan sistematika penulisan yang akan dibuat, selanjutnya penulis akan membuat perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. Perencanaan kegiatan ini penting untuk dibuat, selain

sebagai suatu bentuk perencanaan, juga digunakan sebagai alat kontrol dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang dilakukan oleh penulis. Dokumen perencanaan kegiatan ini berisikan penjabaran dari setiap kegiatan yang akan dilakukan, tahapan-tahapannya, dan timeline yang dapat digunakan sebagai checklist untuk mengukur ketercapaian/realisasi dari setiap kegiatan yang telah direncanakan. Adapun output dari tahapan kegiatan ini adalah dokumen perencanaan kegiatan itu sendiri (***Output terlampir Lampiran Kegiatan I 1.3**).

1.2 Keterkaitan substansi dengan mata pelatihan

Adapun dalam kegiatan pertama ini terdapat beberapa keterkaitan dengan nilai dasar ASN, antara lain:

a. Etika Publik

Melakukan konsultasi dan meminta persetujuan kepada mentor dan atasan atas setiap kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan salah satu bentuk penerapan etika publik terkait dengan jabatan antara bawahan dengan atasan. Agar setiap kegiatan yang dilaksanakan diketahui oleh atasan dan sesuai dengan visi misi yang ingin dicapai oleh unit kerja.

b. Akuntabilitas

Melakukan konsultasi dengan atasan dan melaporkan kegiatan yang akan dilakukan selain mengandung nilai etika publik, juga termasuk dalam bentuk akuntabilitas yang penulis lakukan sebagai seorang CPNS, sebagai bentuk tanggung jawab atas tugas dan tanggungjawabnya untuk melaksanakan aktualisasi. Selain itu, dengan dibuatnya suatu dokumen perencanaan kegiatan yang didalamnya berisikan langkah-langkah dan checklist atas setiap kegiatan yang

akan dilaksanakan, yang juga digunakan sebagai alat kontrol dan monitoring atas pelaksanaan aktualisasi yang dilakukan, merupakan salah satu bentuk akuntabilitas yang penulis lakukan terkait dengan tanggungjawab penulis dalam melaksanakan aktualisasi di unit kerja.

c. Komitmen Mutu

Dalam kegiatan pertama ini, selain menjelaskan rancangan aktualisasi yang akan penulis lakukan, penulis juga melakukan diskusi dengan mentor dan atasan perihal tema dan isu yang akan diangkat dalam analisis, dan sistematika penulisan. Hal tersebut bertujuan agar output yang dihasilkan dalam analisis merupakan isu-isu terupdate dan disajikan dalam bentuk yang dapat menarik minat baca para Anggota Dewan. Proses perencanaan yang baik bertujuan agar hasil output yang dihasilkan memiliki mutu yang baik.

1.3 Penguatan Nilai Organisasi

Terdapat beberapa keterkaitan antara kegiatan yang dilakukan tersebut dengan nilai dasar organisasi (Religius, Akuntabel, Profesional, Integritas), antara lain:

a. Akuntabilitas

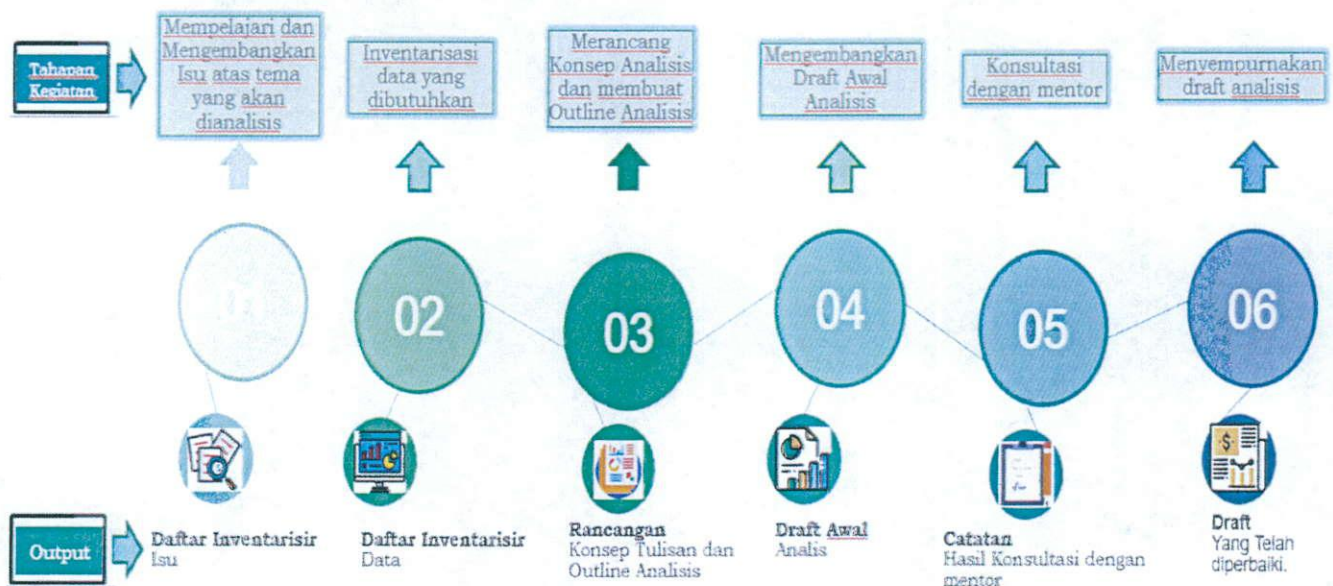
Proses komunikasi dengan atasan, dan proses pembahasan perencanaan kegiatan dan output yang akan dihasilkan merupakan salah satu bentuk akuntabilitas yang dilakukan CPNS sebagai bentuk tanggungjawab bawahan kepada atasan untuk melaporkan kegiatan dan tugas yang akan dilaksanakan oleh CPNS, agar tugas dan kegiatan yang akan dilaksanakan sejalan dengan visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi.

b. Profesional

Proses pembuatan perencanaan yang baik, bertujuan agar output yang dihasilkan berkualitas dan dapat digunakan secara maksimal oleh penggunanya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk profesionalitas penulis untuk menghasilkan produk dengan sungguh-sungguh dan memiliki kualitas yang baik.

2. Mengembangkan isu dan data yang digunakan, mengembangkan outline, dan draft awal analisis

Gambar 5 Kegiatan 2: Tahapan Kegiatan dan Output yang dihasilkan



Tabel 4 Nilai-Nilai Yang Terkandung dalam Kegiatan 2

No	ANEKA	WoG, M.ASN, Pelayanan Publik	Nilai Organisasi (RAPI)
1.	Akuntabilitas	Pelayanan Publik	Akuntabel
2.	Komitmen Mutu	-	Profesional
3.	Nasionalisme	-	Integritas

Sebelum membuat suatu tulisan dalam bentuk analisis, dibutuhkan tahapan untuk memperkaya bangunan dari tulisan yang akan dibuat. Diperlukan adanya inventarisasi data yang akan digunakan dalam analisis, serta artikel/jurnal yang dapat dijadikan dasar rujukan dalam analisis yang akan memperkuat argumentasi dalam analisis. Setelah data dan isu telah dikembangkan, baru dapat dilakukan analisis dan dituangkan dalam bentuk tulisan. Tujuan dari kegiatan II ini adalah agar analisis critical view yang akan dihasilkan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan data-data yang akurat.

2.1 Tahapan Kegiatan dan Output

Dalam kegiatan kedua ini terdiri atas enam tahapan kegiatan, yaitu:

a. Mencari dan mengembangkan isu-isu umum terkait *inflasi*

Pada tahapan kegiatan ini, setelah di kegiatan sebelumnya ditentukan mengenai isu yang akan diangkat (yaitu inflasi), maka selanjutnya penulis menelusuri lebih jauh lagi perkembangan inflasi di Indonesia saat ini, mencari dasar teori yang dapat mendukung argumentasi penulis dalam analisis yang akan dibuat, serta permasalahan-permasalahan yang timbul terkait dengan inflasi saat ini. Adapun dokumen-dokumen yang dijadikan rujukan dalam mengembangkan isu ini haruslah dokumen yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan isinya, yakni dapat bersumber dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Laporan APBN Semester I 2019 agar informasi yang diperoleh merupakan informasi aktual, jurnal serta artikel yang terpublikasi sebagai dasar teori dalam analisis, serta beberapa informasi dari media masa yang terpercaya, sebagai tambahan referensi dalam analisis yang akan dilakukan.

Dalam proses tahapan kegiatan ini, dalam pengerjaannya penulis memerlukan waktu kurang lebih sekitar 1 minggu (5 hari

kerja) untuk dapat mengumpulkan dan memahami isu serta permasalahan secara lebih dalam. Penulis membaca beberapa artikel, jurnal, dan publikasi lainnya sebagai rujukan penulis dalam mengembangkan isu dan kerangka tulisan.

Setelah isu dikembangkan, dan kerangka pikir tulisan mulai tergambar, selanjutnya penulis melanjutkan ke tahapan selanjutnya yaitu mulai menginventarisir data-data apa saja yang akan digunakan dalam tulisan. Adapun output yang akan dihasilkan dalam tahapan kegiatan ini adalah daftar inventarisasi isu (***Output terlampir Lampiran Kegiatan II 2.1**).

b. Mencari data-data yang akan digunakan terkait dengan inflasi dan isu yang akan dikembangkan

Dalam tahapan kegiatan ini, setelah isu dikembangkan dan kerangka pikir tulisan sudah mulai terbentuk, penulis akan mencari data-data yang sekiranya akan dibutuhkan dalam analisis. Adapun data-data yang akan penulis gunakan dalam analisis ini merupakan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta bersumber dari sumber yang dapat dipercaya seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, data-data dari Kementerian/Lembaga, data-data dari Lembaga Internasional, maupun data-data hasil analisis dalam jurnal maupun artikel yang terpublikasi.

Pada tahapan kegiatan ini, penulis mengumpulkan beberapa data yang selanjutnya dijadikan sebagai referensi dan rujukan dalam melakukan analisis, antara lain: a) Data Pendapatan Domestik Bruto (PDB) beserta komponennya; b) Data Ekspor Impor; c) Data Tingkat Pengangguran Terbuka; d) Data Perkembangan Investasi di Indonesia; e) Data Perkembangan Inflasi beserta komponennya. Data-data tersebut masing-masing penulis ambil paling sedikit dalam tiga tahun terakhir, dan penulis kumpulkan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank

Indonesia (BI), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia (BKPM).

Adapun waktu yang penulis butuhkan untuk mengumpulkan data-data tersebut kurang lebih sekitar dua hari kerja. Selanjutnya data-data yang digunakan tersebut di inventarisasi. Adapun output yang dihasilkan dalam tahapan kegiatan ini adalah daftar inventarisasi data (***Output terlampir Lampiran Kegiatan II 2.2**).

c. Merancang konsep analisis dan menuangkannya dalam outline analisis

Dalam tahapan kegiatan ini, setelah kerangka pikir tulisan dan data-data yang akan digunakan diperoleh, selanjutnya penulis akan mulai merancang konsep analisis. Setelah pada kegiatan I penulis telah melakukan diskusi dengan mentor dan juga atasan terkait sistematika penulisan, pada tahapan kegiatan ini menjadi lebih mudah bagi penulis untuk merancang konsep analisis.

Rancangan konsep analisis tersebut kemudian dituangkan atau disajikan dalam bentuk outline analisis yang berisikan pointer-pointer isi analisis. Waktu yang penulis butuhkan untuk membuat rancangan konsep analisis serta mengembangkan outline analisis kurang lebih sekitar dua hari kerja. Adapun output yang akan dihasilkan dalam tahapan kegiatan ini adalah Outline Analisis (***Output terlampir Lampiran Kegiatan II 2.3**).

d. Mengembangkan outline analisis menjadi draft awal analisis

Pada tahapan kegiatan ini, setelah pointer-pointer dibuat dalam outline analisis, pada tahapan ini pointer-pointer tersebut akan dikembangkan menjadi draft analisis yang utuh. Untuk dapat membuat draft analisis yang utuh tersebut, penulis perlu untuk mengkombinasikan antara isu-isu yang telah diperoleh

dan data-data yang telah dikumpulkan pada tahapan kegiatan sebelumnya, untuk selanjutnya dianalisis terlebih dahulu sebelum dituangkan dalam bentuk tulisan.

Dalam tahapan kegiatan ini, penulis memerlukan waktu kurang lebih sekitar lima hari kerja untuk dapat membuat draft awal analisis. Adapun output dalam tahapan kegiatan ini adalah draft awal analisis (***Output terlampir Lampiran Kegiatan II 2.4**).

e. Konsultasi dengan mentor untuk meminta arahan dan masukan terkait draft awal analisis

Pada tahapan kegiatan ini, setelah draft awal analisis selesai dikerjakan, untuk menjamin kualitas dari analisis yang dilakukan, penulis melakukan konsultasi dengan mentor untuk meminta masukan dan arahan atas hasil analisis yang telah penulis buat sebelumnya. Hal ini penting untuk menjamin kualitas mutu tulisan, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban penulis atas analisis yang dibuat kepada atasan. Adapun output dalam tahapan ini adalah catatan hasil konsultasi, serta arahan dan masukan dari mentor (***Output terlampir Lampiran Kegiatan II 2.5**).

f. Menindaklanjuti masukan dari mentor dan menyempurnakan tulisan analisis

Setelah konsultasi dengan mentor dan mendapatkan arahan serta masukan yang dapat digunakan untuk memperbaiki dan memperkaya tulisan, pada tahapan kegiatan ini penulis akan menindaklanjuti dan merevisi hasil tulisan setelah mendapatkan arahan dan masukan dari mentor. Hal ini untuk memperbaiki kualitas dari output yang penulis hasilkan. Waktu yang penulis butuhkan untuk menindaklanjuti masukan yang diberikan oleh mentor kurang lebih satu hari kerja. Adapun output dalam

tahapan kegiatan ini adalah draft analisis yang telah disempurnakan (*Output terlampir Lampiran Kegiatan II 2.6).

2.2 Keterkaitan substansi dengan mata pelatihan

Adapun dalam kegiatan kedua ini terdapat beberapa keterkaitan dengan nilai dasar ASN, antara lain:

a. Akuntabilitas

Dalam penyusunan analisis, penulis menggunakan isu dan data-data yang bersumber dari sumber-sumber yang dapat dipercaya serta dapat dipertanggungjawabkan, sehingga isi dari analisis yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, proses konsultasi dengan mentor tersebut juga sebagai bentuk akuntabilitas penulis, untuk melaporkan progres dan perkembangan dari kegiatan dan output yang telah penulis buat kepada atasan.

b. Komitmen Mutu

Data-data dan isu yang bersumber dari sumber yang dapat dipercaya tersebut juga meningkatkan kualitas analisis yang dihasilkan. Bahwa analisis yang dihasilkan bukan merupakan analisis yang didasari dari opini-opini semata, namun disertai data-data yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut sebagai salah satu upaya untuk menjaga mutu analisis yang dihasilkan. Disamping itu, untuk meningkatkan mutu output yang dihasilkan, penulis juga meminta arahan serta masukan kepada mentor yang memiliki pengetahuan serta pengalaman yang jauh lebih baik dibandingkan penulis.

c. Nasionalisme

Dalam kegiatan ini dimana penulis menulis suatu analisis mengenai suatu masalah teraktual yang dihadapi Indonesia saat ini mengenai inflasi, serta mengingatkan mengenai

tantangan inflasi Indonesia saat ini sebagai salah satu bentuk kepedulian penulis tentang kondisi dan perkembangan bangsa Indonesia saat ini. Hal tersebut didasari oleh kecintaan dan jiwa nasionalisme penulis pada bangsa dan negara, sehingga dirasa perlu disuarakan melalui Anggota Dewan (Legislatif) agar segera dicari pemecahan solusinya oleh pihak-pihak yang dapat mengambil keputusan (Pemerintah)

d. Pelayanan Publik

ASN sebagai salah satu pelayan publik, terutama dalam hal ini Pusat Kajian Anggaran, sebagai salah satu supporting sistem dari Anggota Dewan, perlu untuk memberikan suatu analisis diluar dari produk-produk yang telah di kontrakkan, dalam bentuk yang inovatif, menarik, dan kritis, sehingga dapat dipergunakan sebagai mana mestinya oleh para Anggota Dewan. Hal tersebut sebagai salah satu bentuk upaya pelayanan publik yang dilakukan oleh penulis (Pusat Kajian Anggaran) terhadap customernya.

2.3 Penguatan Nilai Organisasi

Terdapat beberapa keterkaitan antara kegiatan yang dilakukan tersebut dengan nilai dasar organisasi (Religius, Akuntabel, Profesional, Integritas), antara lain:

a. Akuntabel

Dalam proses kegiatan dua ini, penulis mulai melaksanakan kegiatan pembuatan analisis, dimulai dari mencari dan mengembangkan isu dan data yang akan digunakan, sampai dengan mengembangkan dan menuangkan analisis kedalam tulisan. Dalam proses pencarian data dan isu, penulis menjamin bahwa data dan isu yang digunakan adalah data-data dan isu yang akurat, bersumber dari sumber yang dapat

dipercaya serta dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, setelah draft analisis yang penulis buat jadi, penulis melakukan konsultasi dengan atasan, yang merupakan bentuk akuntabilitas penulis kepada atasan terkait perkembangan dan realisasi kegiatan yang telah penulis lakukan. Dari kedua tahapan kegiatan tersebut, penulis berusaha menjamin akuntabilitas baik dalam proses maupun dari output yang dihasilkan.

b. Profesional

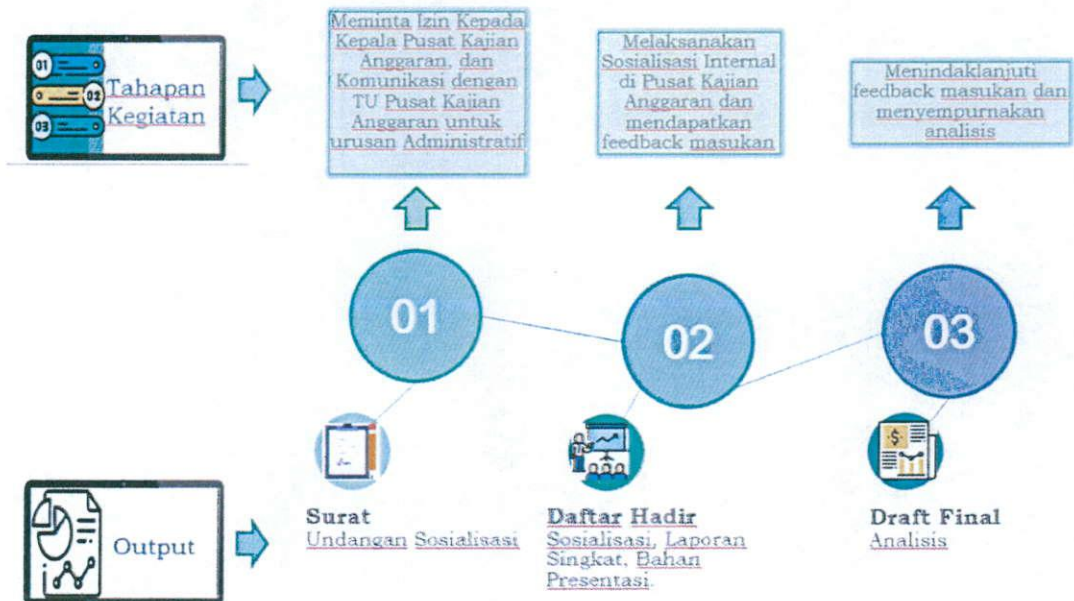
Dalam proses kegiatan kedua ini, penulis mulai menuangkan pikiran-pikiran yang ada kedalam bentuk tulisan dalam analisis. Penulis menyadari bahwa penulis merupakan calon ASN yang dituntut harus netral dan tidak memihak. Sehingga dalam analisis yang penulis buat, harus objektif dan tidak memihak kepada siapapun, serta harus didasarkan kepada keadaan sebenarnya.

c. Integritas

Dalam proses kegiatan kedua ini, penulis mungkin bisa saja menggunakan data-data yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yang bersumber dari berita-berita yang asal usulnya tidak jelas. Namun, demi menjaga integritas serta kualitas dari output yang penulis hasilkan, penulis hanya menggunakan data-data dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk integritas penulis dalam menjalankan tugas yang diberikan kepada penulis.

3. Sosialisasi hasil critical view analysis kepada pihak internal Pusat Kajian Anggaran, Mencetak dan mendistribusikan output

Gambar 6 Kegiatan 3: Tahapan Kegiatan dan Output yang dihasilkan



Tabel 5 Nilai-Nilai Yang Terkandung dalam Kegiatan 3

No	ANEKA	WoG, M.ASN, Pelayanan Publik	Nilai Organisasi (RAPI)
1.	Etika Publik	Whole of Government	Profesional
2.	Komitmen Mutu	-	

Setelah draft awal analisis telah dihasilkan di kegiatan II, maka dalam kegiatan III ini analisis yang telah dibuat tersebut akan di presentasikan kepada seluruh Analis APBN di Pusat Kajian Anggaran untuk mendapatkan saran perbaikan dan masukan. Selanjutnya saran perbaikan dan masukan yang diperoleh tersebut akan ditindaklanjuti oleh penulis sehingga kualitas analisis yang dihasilkan menjadi lebih baik. Setelah perbaikan selesai dilakukan, selanjutnya draft final analisis

tersebut akan di cetak, dan didistribusikan setelahnya kepada pengguna akhir yaitu Anggota Dewan, khususnya di Badan Anggaran melalui Sekertariat Badan Anggaran.

3.1 Tahapan Kegiatan dan Output

Dalam kegiatan ketiga ini terdiri atas enam tahapan kegiatan, yaitu:

a. Meminta izin kepada Kepala Pusat Kajian Anggaran untuk mengadakan sosialisasi internal terkait analisis *critical view* yang dibuat

Dalam tahapan kegiatan ini, setelah berdiskusi dengan mentor selanjutnya penulis akan meminta izin kepada Kepala Pusat Kajian Anggaran agar penulis diizinkan untuk mengadakan sosialisasi internal terkait analisis *critical view* yang penulis buat. Tujuan dari tahapan kegiatan ini adalah sebagai bentuk etika dan tanggungjawab penulis kepada atasan untuk menyampaikan, memberitahukan, serta meminta izin atas setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

Setelah penulis mendapatkan izin dari Kepala Pusat Kajian Anggaran untuk melakukan sosialisasi, selanjutnya penulis akan melakukan komunikasi dengan bagian Tata Usaha di Pusat Kajian Anggaran untuk mengkomunikasikan tempat dan waktu kegiatan, serta proses administrasi yang perlu disiapkan. Adapun tujuan dari tahapan kegiatan ini adalah agar setiap kegiatan yang penulis lakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku serta memenuhi proses administrasi yang ada di Pusat Kajian Anggaran. Output dalam tahapan kegiatan ini adalah Surat Undangan Pelaksanaan Kegiatan (***Output terlampir Lampiran Kegiatan III 3.1**).

b. Melakukan sosialisasi internal di Pusat Kajian Anggaran

Gambar 7 Pelaksanaan Sosialisasi Aktualisasi CPNS Pusat Kajian Anggaran



Pada tahapan kegiatan ini, penulis mempresentasikan hasil analisis yang penulis buat kepada seluruh Analis APBN di Pusat Kajian Anggaran. Tujuan dari tahapan kegiatan ini adalah selain memperkenalkan output yang penulis hasilkan, yang disajikan dalam bentuk yang baru yaitu *Critical View Analysis*, pada tahapan kegiatan ini juga sebagai bentuk pengendalian mutu tulisan yang penulis buat. Perlu diketahui, bahwa pada setiap output yang dihasilkan di Pusat Kajian Anggaran perlu di presentasikan kepada seluruh Analis APBN sebagai bentuk pengendali mutu tulisan.

Setelah proses sosialisasi ini penulis mendapatkan masukan dan saran perbaikan dalam analisis yang penulis buat. Pada tahapan kegiatan ini, output yang dihasilkan adalah laporan hasil

sosialisasi yang berisikan laporan singkat serta daftar pertanyaan dan masukan terhadap tulisan, bahan presentasi, dan daftar hadir dalam kegiatan sosialisasi (***Output terlampir Lampiran Kegiatan III 3.2**).

c. Mendapatkan masukan dari hasil sosialisasi, Menindaklanjuti masukan yang diterima, menyempurnakan analisis, dan menyajikan dalam format yang menarik

Setelah analisis yang penulis buat di presentasikan, dan menerima masukan serta saran perbaikan dari seluruh Analis APBN di Pusat Kajian Anggaran, pada tahapan kegiatan ini penulis akan menyempurnakan dan memperbaiki analisis berdasarkan masukan dari seluruh analis APBN, serta menyajikan analisis dalam bentuk dan format yang menarik dengan menggunakan aplikasi piktochart. Tujuan dari tahapan kegiatan ini adalah agar kualitas mutu yang dihasilkan di dalam analisis menjadi semakin baik. Waktu yang penulis butuhkan untuk dapat menyempurnakan dan menyajikan analisis dalam format yang lebih menarik tersebut kurang lebih tiga hari kerja. Adapun output dari tahapan kegiatan ini adalah *Draft Final Analisis* (***Output terlampir Lampiran Kegiatan III 3.3**).

3.2 Keterkaitan substansi dengan mata pelatihan

Adapun dalam kegiatan ketiga ini terdapat beberapa keterkaitan dengan nilai dasar ASN, antara lain:

a. Etika Publik

Dalam kegiatan ini, sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan, penulis perlu memberitahukan, serta meminta izin kepada mentor dan Kepala Pusat Kajian Anggaran, serta perlu mengkomunikasikan kepada Tata Usaha di Pusat Kajian Anggaran. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk

etika publik yang penulis lakukan, dimana penulis berkewajiban untuk melaporkan progres dan kegiatan yang akan dilaksanakan kepada atasan.

b. Komitmen Mutu

Salah satu tujuan dilaksanakannya sosialisasi selain dari memperkenalkan output yang penulis hasilkan, yang disajikan dalam bentuk baru, juga bertujuan untuk memperoleh saran dan masukan perbaikan dari seluruh Analis APBN di Pusat Kajian Anggaran sebagai salah satu bentuk pengendalian mutu atas setiap output yang dihasilkan di Pusat Kajian Anggaran.

c. Whole of Government

Setelah analisis diperbaiki sesuai dengan saran masukan dari seluruh Analis APBN di Pusat Kajian Anggaran, output selanjutnya di cetak dan didistribusikan ke pengguna melalui Badan Anggaran. Sehingga, dalam proses penyusunan analisis agar dapat sampai kepada pengguna, memerlukan koordinasi dengan unit kerja lainnya, dalam hal ini Sekertariat Badan Anggaran.

3.3 Penguatan Nilai Organisasi

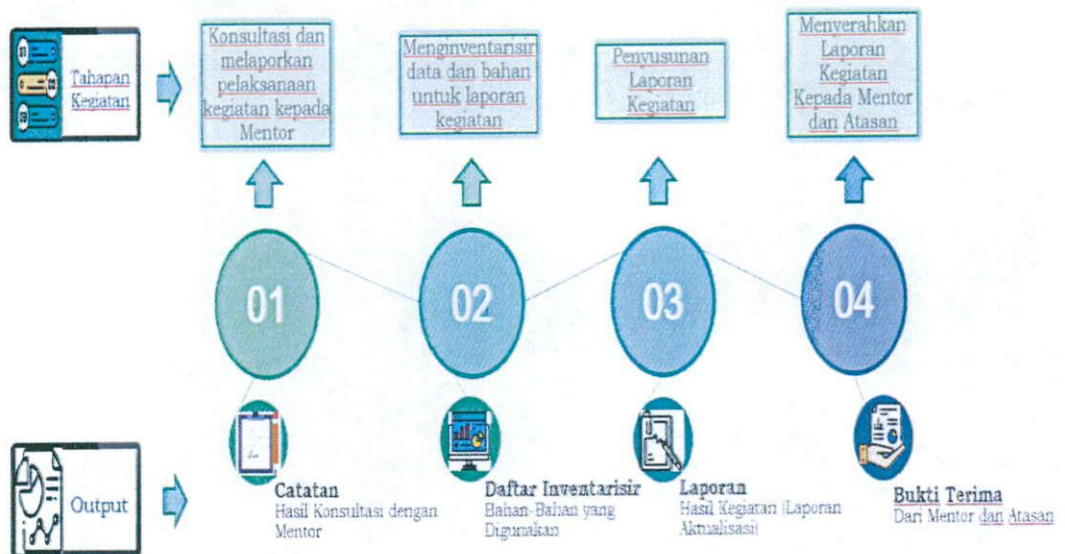
Terdapat beberapa keterkaitan antara kegiatan yang dilakukan tersebut dengan nilai dasar organisasi (Religius, Akuntabel, Profesional, Integritas), antara lain:

a. Profesional

Proses perbaikan berkesinambungan dari output yang dihasilkan oleh penulis, menunjukkan bahwa penulis secara bersungguh-sungguh ingin menghasilkan produk dengan kualitas yang baik. Hal tersebut menggambarkan profesionalitas dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan.

4. Pembuatan Laporan Kegiatan

Gambar 8 Kegiatan 4: Tahapan Kegiatan dan Output yang



dihasilkan

Tabel 6 Nilai-Nilai Yang Terkandung dalam Kegiatan 4

No	ANEKA	WoG, M.ASN, Pelayanan Publik	Nilai Organisasi (RAPI)
1.	Akuntabilitas	-	Akuntabel
2.	Etika Publik	-	-

Setelah kegiatan ketiga dilaksanakan, dimana analisis telah didistribusikan kepada stakeholders terkait, maka dalam kegiatan IV ini penulis akan menyusun Laporan Kegiatan Pelaksanaan Aktualisasi dalam bentuk “Laporan Aktualisasi” sebagai bentuk pertanggungjawaban penulis atas kegiatan aktualisasi yang telah dijalankan dari proses kegiatan I sampai dengan kegiatan III.

4.1 Tahapan Kegiatan dan Output

Dalam kegiatan keempat ini terdiri atas empat tahapan kegiatan, yaitu:

a. Melakukan konsultasi dengan mentor, melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada mentor

Pada tahapan kegiatan ini, setelah seluruh proses kegiatan I-III selesai dilaksanakan, penulis akan melaporkan kepada mentor secara verbal (sebelum laporan kegiatan dibuat) tentang pelaksanaan kegiatan I-III. Tujuan dari tahapan kegiatan ini adalah sebagai bentuk tanggungjawab penulis kepada mentor yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam kegiatan aktualisasi yang penulis lakukan. Adapun output yang akan dihasilkan dalam tahapan kegiatan ini adalah *catatan konsultasi dengan mentor* (*Output terlampir Lampiran Kegiatan IV 4.1).

b. Mengumpulkan data-data dan bahan-bahan yang diperlukan untuk menyusun laporan kegiatan

Setelah melakukan konsultasi dengan mentor, pada tahapan kegiatan ini, penulis akan melengkapi dan menginventarisasi data-data, bahan-bahan, dan berbagai evidence lainnya yang digunakan selama proses pelaksanaan kegiatan. Tujuan dari tahapan kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap tahapan kegiatan disertai dengan bukti/evidence, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban penulis terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Adapun output yang dihasilkan dalam tahapan kegiatan ini adalah Daftar Inventarisir bahan-bahan yang digunakan (*Output terlampir Lampiran Kegiatan IV 4.2).

c. Penyusunan Laporan Kegiatan

Setelah data-data, bahan-bahan, serta evidence telah terkumpulkan semua, pada tahapan kegiatan ini penulis akan mulai menyusun laporan kegiatan yang telah dilakukan dalam bentuk Laporan Aktualisasi. Di dalam laporan ini akan terangkum semua proses kegiatan aktualisasi yang penulis buat

mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan realisasinya, serta bukti-bukti yang dihasilkan selama proses kegiatan. Tujuan dari dibuatnya laporan ini adalah sebagai bentuk akuntabilitas penulis atas tugas yang diberikan kepada penulis. Adapun output yang dihasilkan dalam tahapan kegiatan ini adalah *Laporan Aktualisasi* (*Output terlampir Lampiran Kegiatan IV 4.3).

d. Menyerahkan laporan kegiatan ke mentor dan atasan

Setelah pada tahapan kegiatan sebelumnya laporan aktualisasi dibuat, pada tahapan ini laporan kegiatan aktualisasi akan dilaporkan kepada atasan dan mentor sebagai bentuk pertanggungjawaban penulis atas kegiatan yang telah dilakukan. Adapun output yang akan dihasilkan dalam tahapan kegiatan ini adalah *tanda bukti terima* yang akan ditandatangani oleh mentor dan atasan (*Output terlampir Lampiran Kegiatan IV 4.4).

4.2 Keterkaitan substansi dengan mata pelatihan

Adapun dalam kegiatan ketiga ini terdapat beberapa keterkaitan dengan nilai dasar ASN, antara lain:

a. Akuntabilitas

Dalam kegiatan keempat ini, penulis melaporkan realisasi dari kegiatan-kegiatan yang telah penulis lakukan dalam proses aktualisasi serta output yang penulis hasilkan kepada Kepala Pusat Kajian Anggaran dan mentor. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang penulis lakukan atas tugas dan pekerjaan yang diberikan kepada penulis.

b. Etika Publik

Proses pelaporan yang penulis lakukan kepada atasan tersebut juga merupakan salah satu bentuk etika penulis kepada atasan dengan melaporkan hasil dari pekerjaan yang telah penulis lakukan.

4.3 Penguatan Nilai Organisasi

Terdapat beberapa keterkaitan antara kegiatan yang dilakukan tersebut dengan nilai dasar organisasi (Religius, Akuntabel, Profesional, Integritas), antara lain:

a. Akuntabel

Proses pelaporan merupakan salah satu bentuk dari akuntabilitas yang dilakukan dari setiap pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai. Dengan adanya proses pelaporan, atasan dapat mengetahui sejauh mana pekerjaan yang telah dilakukan tercapai, dan apakah pekerjaan yang telah dilakukan tersebut sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga dapat menjadi suatu bahan evaluasi untuk perbaikan kedepannya.

C. Stakeholders

Adapun Stakeholders yang akan terlibat dalam proses penyusunan Analisis, sampai dengan analisis tersebut tersedia dan dapat dimanfaatkan antara lain:

Tabel 7 Stakeholders yang Terlibat dalam Proses Aktualisasi

No	Stakeholders	
	Internal	Eksternal
1.	Kepala Pusat Kajian Anggaran	Anggota Badan Anggaran DPR RI
2.	Koordinator Bidang (Mentor)	Masyarakat Umum
3.	Kepala Subbagian Tata Usaha & Staf Tata Usaha Pusat Kajian Anggaran	Institusi/Kementerian/Lembaga Negara (sebagai penyedia data)
4.	Seluruh staf di Pusat Kajian Anggaran	Sekretariat Badan Anggaran

D. Analisis Dampak Jika Kegiatan Tidak Dilakukan

Berikut adalah dampak yang akan terjadi jika salah satu dari kegiatan maupun tahapan kegiatan tidak dilakukan:

Tabel 8 Analisis Dampak Jika Kegiatan Maupun Tahapan Kegiatan Tidak Dilakukan

No.	Tahapan Kegiatan	Analisis Dampak Jika Kegiatan Tidak Dilakukan
1.	Melakukan konsultasi dengan atasan untuk merencanakan kegiatan dan isu yang akan dikembangkan dalam analisis	Tidak adanya kejelasan dalam isu yang akan diangkat dalam analisis, serta kesesuaian antara analisis yang dibuat dengan tujuan unit kerja belum tentu sejalan jika tidak ada konsultasi
2.	Mengembangkan isu dan data yang digunakan dalam analisis, mengembangkan outline, draft awal Analisis	Tanpa adanya data dan isu yang akurat, sebuah analisis akan dipertanyakan kebenarannya.
3.	Sosialisasi Analisis kepada pihak internal Pusat Kajian Anggaran, memperoleh feedback, dan menindaklanjuti feedback yang diterima	Tanpa adanya sosialisasi maka analisis yang dilakukan menjadi tidak bermanfaat, dan tidak akan memperoleh masukan (untuk penyempurnaan) dari pihak yang diberi sosialisasi.
4.	Pembuatan Laporan Kegiatan	Tanpa adanya suatu laporan kegiatan, maka eksistensi suatu kegiatan tidak dapat dibuktikan.

E. Time Schedule

Pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini berlangsung mulai pada minggu keempat bulan Juli 2019, sampai dengan presentasi akhir laporan aktualisasi pada minggu pertama bulan September 2019. Selama periode tersebut, realisasi penggunaan waktu dari setiap kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 9 Time Table Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi

O	KEGIATAN	JULI											AGUSTUS																													
		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1.	Konsultasi dengan Atasan																																									
	1.1 Komunikasi dengan Tata Usaha menjadwalkan pertemuan;																																									
	1.2 Konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran dan Mentor;																																									
	1.3 Membuat Dokumen Perencanaan Kegiatan																																									
2.	Mengembangkan Isu dan Data, Outline dan Draft Awal Analisis																																									

NO	KEGIATAN	JULI											AGUSTUS																												
		2	2	2	2	2	2	2	2	3	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		2	3	4	5	6	7	8	9	0																															
	2.1 Mempelajari & Mengembangkan Isu;																																								
	2.2 Mencari Data-Data yang akan digunakan																																								
	2.3 Merancang konsep analisis, dan membuat outline analisis																																								
	2.4 Mengembangkan outline menjadi draft awal analisis																																								
	2.5 Konsultasi dengan Mentor																																								
	2.6 Menindak lanjuti masukan mentor																																								
3.	Sosialisasi Analisis kepada pihak internal Pusat Kajian Anggaran																																								
	3.1 Meminta Izin kepada Kepala Pusat Kajian Anggaran dan komunikasi dengan Tata Usaha untuk																																								

NO	KEGIATAN	JULI											AGUSTUS																															
		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
	persiapan administrasi;																																											
	3.2 Melakukan sosialisasi & mendapatkan feedback;																																											
	3.3 Menindaklanjuti feedback dan finalisasi analisis																																											
4.	Pembuatan Laporan Kegiatan																																											
	4.1 Melakukan konsultasi dengan mentor;																																											
	4.2 Mengumpulkan bahan yang diperlukan dalam penyusunan laporan;																																											
	4.3 Penyusunan Laporan Kegiatan																																											
	5 Menyerahkan Laporan																																											

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan pelaksanaan kegiatan aktualisasi pelatihan dasar CPNS Angkatan II Setjen dan Badan Keahlian DPR RI ini dilaksanakan dalam rentang waktu 20 Juli 2019 s.d. 31 Agustus 2019. Berdasarkan hasil pelaksanaan aktualisasi yang penulis lakukan, penulis dapat memahami esensi dari dilakukannya kegiatan aktualisasi ini. Penulis menyadari bahwa dalam setiap kegiatan yang dilakukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kita sebagai pegawai, sebagai calon ASN dituntut untuk dapat bekerja berdasarkan dengan nilai-nilai dasar ASN serta pengetahuan mengenai peran dan kedudukan PNS dalam NKRI.

Secara garis besar, pada pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang penulis lakukan lebih banyak menekankan kepada penerapan nilai ANEKA **Akuntabilitas**, **Etika Publik**, dan **Komitmen Mutu**. Pada proses pelaksanaan aktualisasi tidak terlalu banyak mengalami perubahan dari rancangan aktualisasi yang semula penulis buat. Hanya saja, pada waktu pelaksanaannya terdapat beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan target waktu pengerjaan dalam perencanaan pada rancangan aktualisasi. Hal tersebut karena terdapat tugas-tugas dan pekerjaan dari unit kerja yang harus penulis laksanakan.

Untuk hasil output yang telah penulis buat, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan, namun telah sesuai dengan apa yang diharapkan, dan telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil sosialisasi yang dilaksanakan di Pusat Kajian Anggaran. Namun, sampai dengan laporan ini selesai dibuat, produk yang penulis buat belum di distribusikan ke Badan Anggaran karena masih menunggu proses cetak dari output utama di Pusat Kajian Anggaran, karena output yang penulis

buat merupakan suplemen atau pelengkap dari output utama yang akan disajikan di Pusat Kajian Anggaran.

Secara keseluruhan, pelaksanaan aktualisasi ini telah memberikan manfaat bagi penulis mengenai bagaimana implementasi dari nilai-nilai ANEKA dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penulis. Diharapkan kedepannya nilai-nilai ini dapat terus dapat dipertahankan oleh penulis dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari.

B. Saran

Selama proses pembelajaran klasikal maupun non klasikal dalam rangkaian pendidikan dan pelatihan dasar (Diklatsar) CPNS DPR RI termasuk pelaksanaan program aktualisasi ini, maka terdapat beberapa saran dimana penulis berharap melalui kegiatan dan laporan aktualisasi ini bisa menjadi salah satu gagasan yang dapat dikembangkan dan berkelanjutan sehingga tidak hanya terhenti sebagai gagasan prasyarat dalam program diklatsar CPNS. Output yang penulis buat ini diharapkan kedepannya agar lebih optimal dilakukan sesuai dengan siklus APBN.

LAMPIRAN KEGIATAN I

Lampiran 1.1 Catatan Hasil Komunikasi Dengan Tata Usaha Pusat Kajian Anggaran

Lampiran 1.2 Laporan Singkat Hasil Konsultasi Dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran

Lampiran 1.3 Dokumen Perencanaan Kegiatan

LAMPIRAN 1.1 Catatan Hasil Komunikasi Dengan Tata Usaha di Pusat Kajian Anggaran



Pusat Kajian Anggaran
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Kode Pos 10270

Telp. (021) 5715730 Fax. (021) 5715933 Laman: puskajianggaran.dpr.go.id

CATATAN HASIL KOMUNIKASI CPNS DENGAN BAGIAN TATA USAHA PUSAT KAJIAN ANGGARAN

<u>Hari, Tanggal</u>	:	Senin, 22 Juli 2019
<u>Pukul</u>	:	10.00 WIB
<u>Tempat</u>	:	Ruang Tata Usaha Pusat Kajian Anggaran Gedung Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI
<u>Acara</u>	:	Melakukan Komunikasi dengan Bagian Tata Usaha di Pusat Kajian Anggaran untuk mendapatkan tanggal konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran.
<u>Narasumber</u>	:	Ibu Musbiyatun – Staff Tata Usaha di Pusat Kajian Anggaran

1. PEMBUKAAN

CPNS di Pusat Kajian Anggaran melakukan komunikasi dengan Bagian Tata Usaha di Pusat Kajian Anggaran dan menyampaikan maksud serta tujuannya yaitu ingin melakukan konsultasi dan meminta arahan dari Kepala Pusat Kajian Anggaran terkait Rancangan Aktualisasi yang sedang dilakukan oleh CPNS, sehingga CPNS bermaksud untuk meminta izin untuk menemui Kepala Pusat Kajian Anggaran. Komunikasi dilakukan pada hari Selasa, 22 Juli 2019 pada pukul 10.00 WIB dengan Ibu Musbiyatun (Staff Tata Usaha di Pusat Kajian Anggaran).

2. POKOK- POKOK HASIL PEMBAHASAN

- a. CPNS menemui Bagian Tata Usaha Pusat Kajian Anggaran Ibu Musbiyatun, dan menyampaikan maksud & tujuan CPNS, memohon izin untuk menemui Kepala Pusat Kajian Anggaran, serta menanyakan ketersediaan waktu dari Kepala Pusat Kajian Anggaran untuk bisa ditemui;
- b. Berdasarkan hasil komunikasi tersebut, diketahui bahwa pada hari Senin, 22 Juli 2019 tersebut Kepala Pusat Kajian Anggaran sedang melaksanakan rapat koordinasi dengan unit kerja lainnya, sehingga CPNS dijadwalkan untuk menemui Kepala Pusat Kajian Anggaran pada hari Selasa, 23 Juli 2019.

3. PENUTUP

Demikianlah Catatan atas hasil komunikasi Riza Aditya Syafri dengan Bagian Tata Usaha di Pusat Kajian Anggaran.

Jakarta, 22 Juli 2019

Mengetahui,
Tata usaha Pusat Kajian Anggaran



Musbiyatun

NIP. 197011101997032006

LAMPIRAN 1.2 Laporan Singkat Hasil Konsultasi Dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran



Pusat Kajian Anggaran
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Kode Pos 10270

Telp. (021) 5715730 Fax. (021) 5715933 Laman: puskajianggaran.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT KONSULTASI AKTUALISASI CPNS PUSAT KAJIAN ANGGARAN

<u>Hari, Tanggal</u>	:	Selasa, 23 Juli 2019
<u>Pukul</u>	:	09.00 s/d 11.00 WIB
<u>Tempat</u>	:	Ruang Rapat Kepala Pusat Kajian Anggaran Gedung Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI
<u>Acara</u>	:	Menginformasikan mengenai Rancangan Aktualisasi, Konsultasi Tema, Konsep, Serta Output yang akan dihasilkan dalam Aktualisasi kepada Kepala Pusat Kajian Anggaran
<u>Pimpinan</u>	:	Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

1. PEMBUKAAN

Agenda konsultasi dimulai pada pukul 09.00 WIB di Ruang Rapat Kepala Pusat Kajian Anggaran, dihadiri oleh Kepala Pusat Kajian Anggaran, Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si., serta Koordinator Bidang Perencanaan dan Asumsi Dasar Ekonomi Makro (PADEM), Rastri Paramita, S.E., M.M. Agenda dimulai dengan CPNS Riza Aditya Syafri selaku Calon Analis APBN Ahli Pertama menjelaskan mengenai konsep Rancangan Aktualisasi yang telah dibuat kepada Kepala Pusat Kajian Anggaran. Selanjutnya, dilanjutkan dengan konsultasi mengenai tema, konsep, bentuk serta isu yang akan diangkat dalam Analisis yang akan dihasilkan oleh CPNS dalam Aktualisasinya.

2. POKOK- POKOK HASIL PEMBAHASAN

a. Agenda Kegiatan Aktualisasi

Berdasarkan konsultasi yang dilakukan, telah disepakati jadwal tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jul 2019					Aug 2019					Keterangan
		Week					Week					
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1	Melakukan konsultasi dengan atasan untuk merencanakan kegiatan dan isu yang akan dikembangkan dalam analisis.											
2	Mengembangkan isu dan data yang digunakan dalam analisis, mengembangkan outline, draft awal Analisis											
3	Sosialisasi Analisis kepada pihak internal Pusat Kajian Anggaran, memperoleh feedback, dan menindaklanjuti feedback yang diterima											Jum'at, 23 Agustus 2019 Presentasi produk kepada PKA
4	Pembuatan Laporan Kegiatan											

b. Penentuan Tema, Topik Bahasan

Berdasarkan hasil konsultasi yang dilakukan, terdapat beberapa isu yang dapat dipilih dalam analisis yang dilakukan antara lain: i) Tingkat Inflasi yang rendah; ii) Kondisi Neraca Perdagangan Indonesia; iii) Hilirisasi Industri; iv) Mitigasi Risiko Nilai Tukar Rupiah. Dari empat isu yang disarankan tersebut, penulis memilih isu pertama yaitu mengenai **tingkat inflasi Indonesia yang rendah**.

c. Penentuan Format/Struktur Tulisan

Berdasarkan hasil konsultasi yang dilakukan, telah disepakati mengenai format dan struktur tulisan yang akan dihasilkan yaitu: (i) Analisis disajikan dalam dua halaman; (ii) Analisis diberi nama *Critical View Analysis*; (iii) Pada bagian pertama analisis berisikan data realisasi inflasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir yang cenderung dibawah 3,5 persen, dan hasil prediksi inflasi Indonesia baik yang dilakukan tim Pusat Kajian Anggaran, maupun beberapa

Lembaga Internasional (disajikan dalam bentuk yang menarik, gambar atau tabel perbandingan) disertai analisis singkat; (iv) Pada bagian kedua berisikan box yang menjelaskan tantangan Inflasi Indonesia saat ini dan kedepan; (v) Pada bagian ketiga berisikan *critical view* berupa daftar pertanyaan kritis disertai analisis ringkas, dimana pertanyaan kritis ini nantinya dapat digunakan oleh Anggota Dewan untuk bertanya kepada Pemerintah pada saat pembahasan dengan Pemerintah.

d. Penentuan Desain Produk

Berdasarkan hasil konsultasi yang dilakukan, disepakati bahwa desain produk yang akan disajikan akan berupa analisis deskriptif, namun akan disajikan dalam bentuk template yang menarik seperti infografis.

e. Output yang dihasilkan

Berdasarkan hasil konsultasi yang dilakukan, disepakati bahwa output yang akan dihasilkan akan masuk dalam bagian output dari Pusat Kajian Anggaran yang telah ada, yaitu dalam bentuk suplemen yang akan di distribusikan bersamaan dengan output lainnya sesuai pada siklus APBN, namun baik bentuk, konten, maupun penyajiannya dilakukan optimalisasi sehingga dapat lebih memberikan manfaat serta menarik para Anggota Dewan untuk membacanya.

3. PENUTUP

Demikianlah acara konsultasi aktualisasi Riza Aditya Syafri dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran, rapat ditutup pukul 11.00 wib.

Jakarta, 23 Juli 2019

Mengetahui,
Kepala Pusat Kajian Anggaran



Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.
NIP. 197109111997031005

LAMPIRAN 1.3 Dokumen Perencanaan Kegiatan

PERENCANAAN KEGIATAN

AKTUALISASI

Output Aktualisasi yang akan CPNS hasilkan bertujuan untuk menunjang tugas, fungsi, dan peran dari Pusat Kajian Anggaran, serta memperkuat eksistensi dari Pusat Kajian Anggaran. Output yang akan dihasilkan oleh CPNS sesuai dengan Rancangan Aktualisasi berbentuk suatu Analisis Ringkas yang kritis (*Critical View Analysis*) dengan mengangkat suatu isu yang sedang teraktual mengenai APBN dan kondisi perekonomian saat ini sesuai dengan pembedangan CPNS. Untuk menunjang kualitas output yang akan dihasilkan, dibutuhkan perencanaan kegiatan yang baik. Untuk itu, dokumen Perencanaan Kegiatan Aktualisasi ini dibuat sebagai dokumen perencanaan, sekaligus sebagai bentuk kontrol dalam pelaksanaan setiap kegiatan yang dilakukan dalam proses aktualisasi.

Kegiatan I

Kegiatan pertama menitikberatkan pada proses konsultasi baik kepada mentor, maupun kepada Kepala Pusat Kajian Anggaran sebagai bentuk komunikasi antara bawahan dengan atasan, agar apa yang dilakukan oleh CPNS selaras dengan kebutuhan dan tujuan dari unit kerja. Berdasarkan time table dalam kegiatan I, waktu yang dimiliki CPNS untuk menyelesaikan kegiatan I beserta laporannya adalah 1 minggu antara tanggal 22 Juli 2019 – 26 Juli 2019. Adapun tahapan kegiatan, serta hasil yang diperoleh dari setiap kegiatan antara lain:

Tabel I. Daftar Tahapan Kegiatan dan Hasil dari Setiap Tahapan Kegiatan

No	Tahapan Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Stakeholders	Hasil
1.	Berkomunikasi dengan Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Kajian Anggaran, untuk menjadwalkan pertemuan dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran;	22 Juli 2019	Tata Usaha Pusat Kajian Anggaran	Berdasarkan hasil komunikasi dengan bagian Tata Usaha di Pusat Kajian Anggaran (Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Kajian Anggaran Sedang mengikuti diklat), didapatkan informasi bahwa pada tanggal 22 Juli 2019 pada saat CPNS melakukan konsultasi, Kepala Pusat Kajian Anggaran sedang melaksanakan rapat dengan unit kerja lain, sehingga pertemuan antara CPNS dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran dijadwalkan pada tanggal 23 Juli 2019 pagi hari.
2.	Konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran & mentor terkait rancangan kegiatan dan penetapan isu yang akan dibahas;	22 Juli 2019	Kepala Pusat Kajian Anggaran	Setelah CPNS menjelaskan rancangan aktualisasi yang dibuat, Kepala Pusat Kajian Anggaran memberikan beberapa masukan atas Rancangan Aktualisasi yang dilakukan, serta menyetujui dan mendukung Rancangan Aktualisasi yang direncanakan oleh CPNS, membahas Tema Analisis, dan sistematika penulisan yang akan dibuat
3.	Membuat dokumen perencanaan kegiatan	23 Juli 2019	Peserta	.

Setelah melakukan diskusi dan konsultasi dengan mentor terkait tema analisis dan sistematika penulisan, disepakati bahwa analisis yang akan ditulis mengangkat tema mengenai *inflasi Indonesia saat ini*, dan

permasalahannya. Sementara sistematika penulisan yang telah disepakati bahwa pada **bagian pertama** akan menampilkan data mengenai kondisi inflasi saat ini, target dan realisasi dari inflasi Indonesia dalam beberapa tahun, serta prediksi inflasi dari beberapa institusi internasional. **Bagian kedua** akan menjelaskan data yang disajikan pada bagian pertama. **Bagian ketiga** akan menjelaskan mengenai tantangan inflasi Indonesia saat ini dan kedepannya. **Bagian keempat** akan memberikan pertanyaan kritis mengenai kondisi Inflasi Indonesia saat ini, disertai deskripsi singkat yang melatar belakangi pertanyaan tersebut. Adapun analisis yang akan disajikan berjumlah 2 halaman, dan akan disajikan dalam bentuk analisis naratif/infografis.

Setelah diketahui bentuk output yang akan dihasilkan dan tema yang akan diangkat, maka perlu dilakukan perencanaan mengenai data-data yang harus dikumpulkan, dan artike/jurnal yang diperlukan sebagai penguat untuk argumentasi.

Setelah data-data tersebut diperoleh maka dapat dilanjutkan untuk melakukan analisis ringkas, dan kemudian akan dituangkan dalam draft tulisan analisis.

Kegiatan II

Dalam kegiatan II, sebelum membuat suatu tulisan dalam bentuk analisis, dibutuhkan step-step untuk memperkaya bangunan dari tulisan yang akan diangkat. Diperlukan adanya inventarisasi data yang akan digunakan dalam analisis, serta artikel/jurnal yang dapat dijadikan dasar rujukan dalam analisis yang akan memperkuat argumentasi dalam analisis. Setelah data dan isu telah dikembangkan, baru dapat dilakukan analisis dan dituangkan dalam bentuk tulisan. Berdasarkan analisis yang akan dibuat tersebut, maka data-data dan artikel/jurnal yang sekiranya akan dibutuhkan antara lain:

- Data Inflasi Indonesia dalam 5 tahun terakhir;

- Data Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 5 tahun terakhir;
- Data Pertumbuhan konsumsi masyarakat dalam 5 tahun terakhir beserta breakdownnya;
- Data pertumbuhan harga minyak Indonesia (ICP) dalam 5 tahun terakhir;
- Data Jumlah Pengangguran Dalam 5 Tahun Terakhir;
- Data Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Beberapa negara di Asia Tenggara;
- Data Suku Bunga Kebijakan The Fed dan BI terkini;
- Data instrumen pembentuk IHK dalam 5 tahun terakhir;
- Jurnal mengenai determinan dari inflasi;
- Jurnal mengenai hubungan inflasi dengan indikator perekonomian lainnya (ex. Pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, dll);
- Artikel/buku yang membahas mengenai teori-teori tentang inflasi
- Lainnya (sepanjang dibutuhkan).

Adapun kegiatan II ini direncanakan akan memakan waktu kurang lebih 3 minggu dalam pengerjaannya yakni antara tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan 16 Agustus 2019. Tahap kegiatan serta hasil yang diperoleh dari setiap tahapan kegiatan akan disajikan dalam Tabel II.

Tabel II. Daftar Tahapan Kegiatan dan Hasil dari Setiap Tahapan Kegiatan

No	Tahapan Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Stakeholders	Hasil
1.	Mempelajari dan mengembangkan isu-isu yang akan diangkat;		CPNS	
2.	Mencari data-data yang digunakan berdsarkan isu yang dipilih;		CPNS	
3.	Merancang konsep analisis yang akan ditulis dalam bentuk Outline Analisis		CPNS	

No	Tahapan Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Stakeholders	Hasil
4.	Mengembangkan outline menjadi draft awal analisis;		CPNS	
5.	Konsultasi dengan mentor untuk meminta masukan terkait draft awal;		Mentor	
6.	Menindaklanjuti masukan dari mentor, dan menyempurnakan analisis		CPNS	

Output dari kegiatan II ini merupakan draft awal yang siap untuk di presentasikan oleh CPNS kepada seluruh Analis APBN di Pusat Kajian Anggaran.

Kegiatan III

Setelah draft awal analisis telah dihasilkan di kegiatan II, maka dalam kegiatan III ini analisis yang telah dibuat tersebut akan di presentasikan kepada seluruh Analis APBN di Pusat Kajian Anggaran untuk mendapatkan saran perbaikan dan masukan. Selanjutnya saran perbaikan dan masukan yang diperoleh tersebut akan ditindaklanjuti oleh CPNS sehingga kualitas analisis yang dihasilkan menjadi lebih baik. Adapun dalam kegiatan III ini dijadwalkan akan memakan waktu kurang lebih 2 minggu antara tanggal 19 Agustus 2019 – 30 Agustus 2019. Tahap kegiatan serta hasil yang diperoleh dari setiap tahapan kegiatan akan disajikan dalam Tabel III.

Tabel II. Daftar Tahapan Kegiatan dan Hasil dari Setiap Tahapan Kegiatan

No	Tahapan Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Stakeholders	Hasil
1.	Meminta izin kepada Kepala Pusat untuk mengadakan sosialisasi internal terkait Analisis		Kepala Pusat, dan Tata Usaha Pusat Kajian Anggaran	

No	Tahapan Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Stakeholders	Hasil
	yang dilakukan, serta Melakukan konsultasi dengan Tata Usaha di Pusat Kajian Anggaran untuk persiapan administrasi;			
2.	Melakukan sosialisasi internal di Pusat Kajian Anggaran, dan mendapatkan masukan dari hasil sosialisasi;		Seluruh Pegawai di Pusat Kajian Anggaran	
3.	Menindaklanjuti masukan yang diterima;		CPNS	

Setelah tahapan III ini dilaksanakan maka selanjutnya Analisis yang telah disempurnakan tersebut akan dicetak dan didistribusikan kepada Sekertariat Badan Anggaran DPR RI, untuk selanjutnya analisis tersebut dapat dimanfaatkan oleh para Anggota Dewan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan, serta dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkritisi hasil/capaian Pemerintah.

Kegiatan IV

Setelah kegiatan ketiga dilaksanakan, dimana analisis telah didistribusikan kepada stakeholders terkait, maka dalam kegiatan IV ini CPNS akan menyusun Laporan Kegiatan Pelaksanaan Aktualisasi dalam bentuk "Laporan Aktualisasi" sebagai bentuk pertanggungjawaban CPNS atas kegiatan aktualisasi yang telah dijalankan dari proses kegiatan I sampai dengan kegiatan III. Penyusunan Laporan Kegiatan Aktualisasi dijadwalkan selama 1 minggu yaitu dari tanggal 29 Agustus 2019 – 1 September 2019.

Tahap kegiatan serta hasil yang diperoleh dari setiap tahapan kegiatan akan disajikan dalam Tabel IV.

Tabel II. Daftar Tahapan Kegiatan dan Hasil dari Setiap Tahapan Kegiatan

No	Tahapan Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Stakeholders	Hasil
1.	Melakukan konsultasi dengan mentor, Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada mentor;		Mentor	
2.	Mengumpulkan data-data dan bahan yang diperlukan untuk penyusunan laporan kegiatan;		CPNS	
3.	Penyusunan Laporan Kegiatan (Laporan Aktualisasi);		CPNS	
4.	Menyerahkan laporan kegiatan ke Mentor dan Kepala Pusat Kajian Anggaran.		Mentor, Kepala Pusat Kajian Anggaran	

Setelah laporan kegiatan dibuat dan dilaporkan kepada Mentor dan Kepala Pusat Kajian Anggaran, selanjutnya pada tanggal 2-4 September 2019 CPNS akan melaksanakan evaluasi atas aktualisasi yang dilakukannya.

Demikianlah Dokumen Rancangan Kegiatan ini dibuat, sebagai bentuk perencanaan yang dilakukan oleh CPNS dalam melaksanakan kegiatan Aktualisasinya.

Jakarta, Juli 2019

Mengetahui,
Kepala Pusat Kajian Anggaran



Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

NIP. 197109111997031005

LAMPIRAN KEGIATAN II

Lampiran 2.1 Daftar Inventarisir Isu;

Lampiran 2.2 Daftar Inventarisir Data;

Lampiran 2.3 Rancangan Konsep Tulisan dan Outline Analisis;

Lampiran 2.4 Draft Awal Analisis;

Lampiran 2.5 Catatan Hasil Konsultasi Dengan Mentor;

Lampiran 2.6 Draft Analisis Yang Telah Direvisi

LAMPIRAN 2.1 Daftar Inventarisir Isu



Pusat Kajian Anggaran
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Kode Pos 10270
Telp. (021) 5715730 Fax. (021) 5715933 Laman: puskajianggaran.dpr.go.id

DAFTAR INVENTARISIR ISU YANG DIGUNAKAN DALAM ANALISIS “CRITICAL VIEW INFLASI INDONESIA”

Artikel I

Penulis : Shane Oliver

Judul : Could low Inflation be a bad Thing?

Date : 30 April 2019

Link : <https://corporate.amp.com.au/newsroom/2019/april/could-low-inflation-be-a-bad-thing-->

Artikel II

Penulis : Deutsche Bank Research

Judul : “Low inflation presents challenges for the economy,” says Matthew Luzzetti

Date : 11 Juni 2019

Link : https://www.db.com/newsroom_news/2019/low-inflation-presents-challenges-for-the-economy-says-matthew-luzzetti-en-11520.htm

Artikel III

Penulis : Tejvan Pettinger

Judul : Effects of a falling inflation rate

Date : 25 November 2017

Link : <https://www.economicshelp.org/blog/357/inflation/effects-of-a-falling-inflation-rate/>

Artikel IV

Penulis: Òscar Jordà, Chitra Marti, Fernanda Nechio, and Eric Tallman

Judul : Why Is Inflation Low Globally?

Date : 15 Juli 2019

Link : <https://www.frbsf.org/economic-research/publications/economic-letter/2019/july/why-is-inflation-low-globally/>

Artikel V

Penulis: Michael Klein (Fletcher School, Tufts University)

Judul : What's the Problem with Low Inflation?

Date : 6 Agustus 2017

Link : <https://econofact.org/whats-the-problem-with-low-inflation>

Artikel VI

Penulis: Agus Herta Sumarto Peneliti INDEF

Judul : Bahaya Inflasi Rendah

Date : 22 Juni 2016

Link : <https://mediaindonesia.com/read/detail/52240-bahaya-inflasi-rendah>

Artikel VII

Penulis: Dias Prasongko

Judul : Indef Ingatkan Inflasi Rendah Juga Tunjukkan Kemampuan Daya Beli

Date : 16 November 2018

Link : <https://bisnis.tempo.co/read/1147047/indef-ingatkan-inflasi-rendah-juga-tunjukkan-kemampuan-daya-beli>

Artikel VIII

Penulis: Sahminan (Peneliti Ekonomi Bank Indonesia)

Judul : Inflasi Inti dan Respon Kebijakan Moneter

Artikel IX

Penulis: Indonesia-Investments.com

Judul : Inflation In Indonesia (Consumer Price Index)

Date : 10 November 2018

Link : <https://www.indonesia-investments.com/finance/macroeconomic-indicators/inflation-in-indonesia/item254>

Artikel X

Penulis: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Judul : Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2020

Date : Mei 2019

Artikel XI

Penulis: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Judul : Realisasi Semester I Tahun 2019 dan *Outlook* APBN Tahun 2019

Date : 16 Juli 2019



LAMPIRAN 2.2 Daftar Inventarisir Data
Pusat Kajian Anggaran
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
 Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Kode Pos 10270
 Telp. (021) 5715730 Fax. (021) 5715933 Laman: puskajianggaran.dpr.go.id

Produk Domestik Bruto (PDB)

No.	Aggregate Demand	Tahun				Pertumbuhan
		2016	2017	Pertumbuhan	2018	
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,126,307.97	5,379,752.54	4.94%	5,851,230.38	5.05%
2	Pengeluaran Konsumsi LNPR	105,362.27	112,884.35	6.93%	122,884.11	9.08%
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	774,304.53	790,789.09	2.13%	828,714.25	4.80%
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	3,041,584.88	3,228,783.01	6.15%	3,444,118.42	6.67%
6	Ekspor Barang Dan Jasa	1,971,182.64	2,146,803.17	8.91%	2,285,871.94	6.48%
7	Impor Barang Dan Jasa	1,818,133.16	1,984,802.35	8.08%	2,201,127.44	12.04%
8	Net Export	153,049.48	182,200.82	19.05%	84,744.50	-63.49%
	Total Aggregate Demand	9,200,608.93	9,694,169.81	5.36%	10,131,701.66	4.51%
	PDB	9,434,613.40	9,912,703.60	5.07%	10,425,316.30	5.17%

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka	2016		2017		2018	
	Mar	Agust	Mar	Agust	Mar	Agust
	5.5	5.61	5.33	5.5	5.13	5.34

*TPT menurun dari tahun ke tahun

Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara:

Negara	2016		2017		2018		Rata-Rata Pertumbuhan	Rata-Rata Inflasi
	Pertumbuhan	Inflasi	Pertumbuhan	Inflasi	Pertumbuhan	Inflasi		
Thailand	3.36%	0.19%	4.02%	0.66%	4.13%	1.06%	3.84%	0.64%
Philipina	6.88%	1.25%	6.68%	2.85%	6.24%	5.21%	6.60%	3.11%
Malaysia	4.22%	2.09%	5.90%	3.87%	4.72%	0.89%	4.95%	2.28%
Vietnam	6.21%	3.24%	6.81%	3.52%	7.08%	3.54%	6.70%	3.43%
Indonesia	5.03%	3.53%	5.07%	3.81%	5.17%	3.20%	5.09%	3.51%
US	1.57%	1.26%	2.22%	2.13%	2.86%	2.44%	2.21%	1.95%
Uni Eropa	2.03%	0.22%	2.48%	1.47%	2.00%	1.78%	2.17%	1.15%
Jepang	0.61%	-0.12%	1.93%	0.47%	0.79%	0.98%	1.11%	0.44%
China	6.74%	2%	6.76%	1.59%	6.60%	2.08%	6.70%	1.89%



Pusat Kajian Anggaran
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
 Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Kode Pos 10270
 Telp. (021) 5715730 Fax. (021) 5715933 Laman: puskajianggaran.dpr.go.id

LAMPIRAN 2.2 Daftar Inventarisir Data

		2016 PMDN	2016 PMA	2017 PMDN	2017 PMA	2018 PMDN	2018 PMA
		Investasi (Rp. Juta)	Investasi (US\$. Juta)	Investasi (Rp. Juta)	Investasi (US\$. Juta)	Investasi (Rp. Juta)	Investasi (US\$. Ribu)
Sektor Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	21,232,024.4	1,589.1	22,741,967.5	1,433.1	31,186,205.9	1,721,235.9
	Kehutanan	203,839.1	78.2	30,144.2	48.1	3,053,166.7	43,207.7
	Perikanan	2,570.7	43.3	33,072.2	59.3	87,560.0	24,289.3
	Pertambangan	6,033,623.8	2,742.4	20,635,053.8	4,375.9	32,650,691.8	3,038,612.5
	Total(Sektor)	27,472,058.0	4,453.0	43,440,237.7	5,916.4	66,977,624.4	4,827,345.40
Sektor Sekunder	Industri Makanan	31,950,243.8	2,115.0	38,338,754.3	1,970.3	38,539,396.0	1,307,308.50
	Industri Tekstil	3,183,659.9	321.3	7,863,199.6	372.2	3,596,769.3	305,392.20
	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	69,111.7	144.4	195,830.0	368.9	282,124.6	243,649.90
	Industri Kayu	3,150,998.1	267.5	1,569,067.5	395.7	1,535,698.4	276,005.70
	Industri Kertas dan Percetakan	5,257,885.0	2,786.6	9,022,896.2	595.6	2,893,979.9	668,077.80
	Industri Kimia Dan Farmasi	30,054,364.9	2,889.1	13,734,273.4	2,578.5	12,788,570.0	1,938,339.10
	Industri Karet dan Plastik	3,576,878.1	737.3	4,823,352.7	633.1	3,414,533.3	447,030.60
	Industri Mineral Non Logam	15,404,576.5	1,076.0	7,641,200.7	671.7	4,522,387.6	456,328.90
	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	10,127,622.1	3,897.1	11,345,409.5	3,781.6	10,467,552.1	2,219,080.50
	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	1,445,894.9	8.8	2,464,120.7	5.3	1,950,487.2	1,341,148.80
	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	1,713,856.1	2,369.3	1,312,611.7	1,271.4	1,836,819.8	971,319.50
	Industri Lainnya	744,150.5	75.2	677,911.2	504.3	717,428.4	173,951.80
	Total(Sektor)	106,679,241.6	16,687.6	98,988,627.6	13,148.6	82,545,746.5	10,347,633.20
Sektor Tersier	Listrik, Gas dan Air	22,794,423.4	2,139.6	25,426,406.6	4,241.4	37,264,868.2	4,383,812.7
	Konstruksi	14,039,124.1	186.9	30,334,307.6	224.7	44,979,667.6	248,135.1
	Perdagangan dan Reparasi	4,513,374.1	670.4	3,711,997.0	1,294.1	6,429,823.4	609,279.9
	Hotel dan Restoran	1,559,865.9	887.8	4,794,175.5	1,089.6	9,092,157.2	868,893.8
	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	26,648,709.0	750.2	34,473,483.1	1,899.6	58,730,747.7	3,027,154.4
	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	9,192,785.1	2,321.5	16,762,196.6	2,873.7	15,402,783.6	4,302,741.8
	Jasa Lainnya	2,873,224.2	818.2	3,558,492.4	1,391.9	5,551,340.0	692,905.1
	Total(Sektor)	81,621,505.9	7,774.6	119,061,058.8	13,015.0	177,451,387.7	14,132,922.80
Total		215,772,805.5	28,915.2	261,489,924.1	32,080.0	326,974,758.6	29,307,901.40



LAMPIRAN 2.2 Daftar Inventarisir Data
Pusat Kajian Anggaran
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
 Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Kode Pos 10270
 Telp. (021) 5715730 Fax. (021) 5715933 Laman: puskajianggaran.dpr.go.id

Tahun/Bulan	Umum	Inti	Harga Yang Diatur Pemerintah	Barang Bergejolak
2019	2.36	1.89	0.21	6.13
Juli	0.31	0.33	-0.36	0.89
Juni	0.55	0.38	-0.09	1.7
Mei	0.68	0.27	0.48	2.18
April	0.44	0.17	0.16	1.59
Maret	0.11	0.16	0.08	-0.02
Februari	-0.08	0.26	0.06	-1.3
Januari	0.32	0.3	-0.12	0.97
2018	3.13	3.07	3.36	3.39
Desember	0.62	0.17	1.2	1.55
November	0.27	0.22	0.52	0.23
Oktober	0.28	0.29	0.32	0.17
September	-0.18	0.28	0	-1.83
Agustus	-0.05	0.3	-0.06	-1.24
Juli	0.28	0.41	-0.68	0.9
Juni	0.59	0.24	1.38	0.9
Mei	0.21	0.21	0.27	0.19
April	0.1	0.15	0.24	-0.29
Maret	0.2	0.19	0.2	0.15
Februari	0.17	0.26	0.07	0.1
Januari	0.62	0.31	-0.15	2.58
2017	3.61	2.95	8.7	0.71
Desember	0.71	0.13	0.91	2.46
November	0.2	0.13	0.21	0.38
Oktober	0.01	0.17	-0.01	-0.53
September	0.13	0.35	0.15	-0.67
Agustus	-0.07	0.28	-0.48	-0.87
Juli	0.22	0.26	0.07	0.17
Juni	0.69	0.26	2.1	0.65
Mei	0.39	0.16	0.69	0.91
April	0.09	0.13	1.27	-1.26
Maret	-0.02	0.1	0.37	-0.77
Februari	0.23	0.37	0.58	-0.36
Januari	0.97	0.56	2.57	0.67
2016	3.02	3.07	0.21	5.92
Desember	0.42	0.23	0.97	0.47
November	0.47	0.15	0.13	1.84
Oktober	0.14	0.1	0.57	-0.26
September	0.22	0.33	0.14	-0.09
Agustus	-0.02	0.36	-0.52	-0.8
Juli	0.69	0.34	1.32	1.2
Juni	0.66	0.33	0.72	1.71
Mei	0.24	0.23	0.27	0.32
April	-0.45	0.15	-1.7	-1.04
Maret	0.19	0.21	-0.35	0.75
Februari	-0.09	0.31	-0.76	-0.68
Januari	0.51	0.29	-0.55	2.4
2015	3.35	3.95	0.39	4.84
Desember	0.96	0.23	0.86	3.53
November	0.21	0.16	0.2	0.35
Oktober	-0.08	0.23	0.03	-1.22
September	-0.05	0.44	-0.4	-1.25
Agustus	0.39	0.52	-0.45	0.95
Juli	0.93	0.34	1.67	2.13
Juni	0.54	0.26	0.26	1.74
Mei	0.5	0.23	0.38	1.52
April	0.36	0.24	1.88	-0.91
Maret	0.17	0.29	0.83	-0.83
Februari	-0.36	0.34	-1.24	-1.69
Januari	-0.24	0.61	-3.51	0.55

Bulan	2016		2017		2018		2019	
	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi
Januari	123.62	0.51	127.94	0.97	132.1	0.62	135.83	0.32
Februari	123.51	-0.09	128.24	0.23	132.32	0.17	135.72	-0.08
Maret	123.75	0.19	128.22	-0.02	132.58	0.2	135.87	0.11
April	123.19	-0.45	128.33	0.09	132.71	0.1	136.47	0.44
Mei	123.48	0.24	128.83	0.39	132.99	0.21	137.4	0.68
Juni	124.29	0.66	129.72	0.69	133.77	0.59	138.16	0.55
Juli	125.15	0.69	130	0.22	134.14	0.28	138.59	0.31
Agustus	125.13	-0.02	129.91	-0.07	134.07	-0.05		
September	125.41	0.22	130.08	0.13	133.83	-0.18		
Oktober	125.59	0.14	130.09	0.01	134.2	0.28		
November	126.18	0.47	130.35	0.2	134.56	0.27		
Desember	126.71	0.42	131.28	0.71	135.39	0.62		
Tingkat Inflasi		3.02		3.61		3.13		2.36

Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara:

	2016		2017		2018		Rata-Rata Pertumbuhan	Rata-Rata Inflasi		
	Pertumbuhan	Inflasi	Pertumbuhan	Inflasi	Pertumbuhan	Inflasi				
Thailand	3.36%	0.19%	4.02%	0.66%	4.13%	1.06%	3.84%	0.64%	3.20%	3.81%
Philipina	6.88%	1.25%	6.68%	2.85%	6.24%	5.21%	6.60%	3.11%	3.50%	6.40%
Malaysia	4.22%	2.09%	5.90%	3.87%	4.72%	0.89%	4.95%	2.28%	2.67%	4.84%
Vietnam	6.21%	3.24%	6.81%	3.52%	7.08%	3.54%	6.70%	3.43%	3.27%	6.48%
Indonesia	5.03%	3.53%	5.07%	3.81%	5.17%	3.20%	5.09%	3.51%	1.58%	4.92%
US	1.57%	1.26%	2.22%	2.13%	2.86%	2.44%	2.21%	1.95%	0.27%	2.17%
Uni Eropa	2.03%	0.22%	2.48%	1.47%	2.00%	1.78%	2.17%	1.15%	1.02%	2.14%
Jepang	0.61%	-0.12%	1.93%	0.47%	0.79%	0.98%	1.11%	0.44%	0.67%	1.10%
China	6.74%	2%	6.76%	1.59%	6.60%	2.08%	6.70%	1.89%	4.81%	6.57%

LAMPIRAN 2.3 Rancangan Konsep Tulisan dan Outline Analisis

RANCANGAN KONSEP TULISAN DAN OUTLINE ANALISIS

RANCANGAN KONSEP TULISAN:

Seperti yang telah dijabarkan dalam kegiatan 1, telah disepakati rancangan tulisan sebagai berikut:

- a) Tema yang diangkat dalam analisis adalah mengenai Tingkat Inflasi yang rendah serta dampaknya terhadap perekonomian Indonesia;
- b) Analisis yang dihasilkan merupakan produk pendukung dalam bentuk suplemen yang nantinya akan didistribusikan bersamaan dengan output utama di Pusat Kajian Anggaran yang akan didistribusikan sesuai dengan pembahasan siklus APBN;
- c) Analisis disajikan maksimal 2 halaman;
- d) Bagian pertama berisikan data realisasi inflasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir yang cenderung dibawah 3,5 persen, dan hasil prediksi inflasi Indonesia baik yang dilakukan tim Pusat Kajian Anggaran, maupun beberapa Lembaga Internasional (disajikan dalam bentuk yang menarik, gambar atau tabel perbandingan) disertai analisis singkat;
- e) Pada bagian kedua berisikan box yang menjelaskan tantangan Inflasi Indonesia saat ini dan kedepan;
- f) Pada bagian ketiga berisikan *critical view* berupa daftar pertanyaan kritis disertai analisis ringkas, dimana pertanyaan kritis ini nantinya dapat digunakan oleh Anggota Dewan untuk bertanya kepada Pemerintah pada saat pembahasan dengan Pemerintah.
- g) Disajikan dalam bentuk yang menarik bisa dalam bentuk Infografis.

OUTLINE ANALISIS

Bagian Pertama:

Akan menyajikan mengenai data-data realisasi inflasi dalam beberapa tahun terakhir, target yang akan dicapai pada APBN 2019 dan RAPBN 2020, serta prediksi dari Pusat Kajian Anggaran dan beberapa institusi internasional. Disamping data inflasi, pada bagian pertama ini juga akan menampilkan beberapa data lainnya diantaranya data pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, data Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Tujuan dari disajikannya data-data tersebut menunjukkan bahwa analisis yang dilakukan adalah analisis dengan menggunakan data-data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua:

Pada bagian kedua akan menjelaskan analisis singkat, korelasi antara data yang disajikan pada bagian pertama terhadap perekonomian Indonesia. Poin penting dalam yang ingin disampaikan pada bagian kedua: **Pertama**, agar pembaca dapat melihat bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini inflasi Indonesia berada dalam level yang rendah. **Kedua**, menjelaskan faktor-faktor yang mendorong inflasi yang rendah, dikaitkan dengan data yang telah disajikan di bagian pertama. **Ketiga**, menjelaskan hubungan antara inflasi dengan pertumbuhan ekonomi, dimana inflasi yang rendah didorong pertumbuhan ekonomi yg rendah dapat menjadi warning bagi Indonesia, namun jika inflasi rendah disertai pertumbuhan ekonomi tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah sukses menjaga level inflasi. **Keempat**, menyimpulkan bahwa kondisi inflasi yang rendah saat ini disebabkan oleh adanya tren perlambatan ekonomi. Namun, hal tersebut wajar mengingat bahwa arah pembangunan presiden saat ini lebih memprioritaskan pemerataan dan stabilitas ketimbang pertumbuhan yang tinggi.

Bagian Ketiga:

Pada bagian ini akan menjelaskan mengenai beberapa tantangan yang akan dihadapi Indonesia terutama berkaitan dengan inflasi Indonesia yang rendah saat ini, diantaranya:

- Pemerintah perlu mewaspadaai inflasi yang rendah sebagai pertanda resesi, dimana ada indikasi bahwa konsumsi masyarakat trennya menurun;
- Inflasi yang terlalu rendah akan membuat industri tidak bergairah, karena pelaku usaha dan investor cenderung tidak akan berminat melakukan investasi dan ekspansi, dan dalam jangka panjang akan berdampak terhadap phk, dan mengakibatkan pengangguran dalam jangka panjang;
- Tren pergerakan harga minyak mentah dunia yang saat ini masih bergejolak;
- Inflasi rendah, namun inflasi volatile food cenderung meningkat lebih tinggi;
- Inflasi rendah menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi.

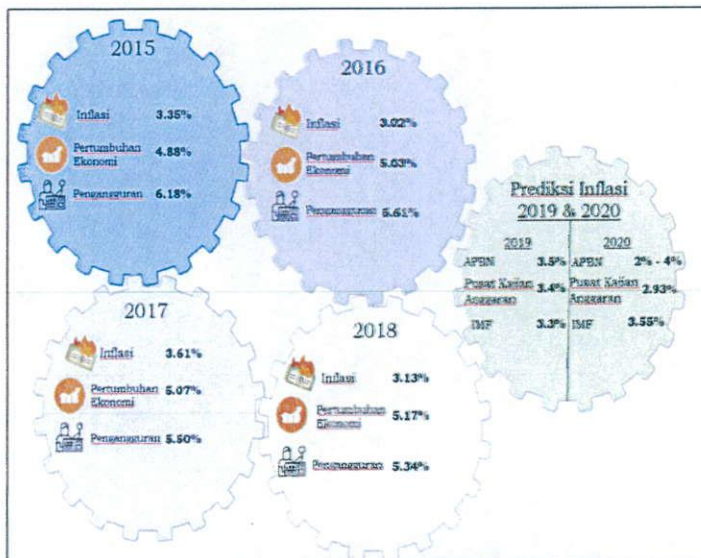
Bagian Keempat:

Pada bagian keempat ini akan menyajikan pertanyaan kritis mengenai kondisi inflasi Indonesia yang rendah saat ini, yang bertujuan untuk memicu dan menyediakan pertanyaan kepada anggota dewan untuk bertanya kepada pemerintah.

LAMPIRAN 2.4 Draft Awal Analisis

Critical View Analysis: Inflasi Rendah dan Faktanya terhadap Perekonomian Indonesia

Rata-rata inflasi Indonesia mengalami penurunan signifikan, bahkan lebih rendah dari yang ditetapkan pada APBN dalam 5 tahun terakhir. Inflasi yang rendah dapat berpengaruh positif maupun negatif tergantung dari faktor yang mendorong inflasi tersebut. Jika inflasi didorong oleh penurunan cost dari faktor-faktor produksi sementara Aggregate Demand tetap atau justru meningkat, maka inflasi yang rendah tersebut dapat mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi. Namun sebaliknya, jika inflasi yang rendah dimotori oleh melambatnya aktivitas ekonomi, maka inflasi yang rendah tersebut dapat menjadi sinyal akan perlambatan ekonomi. Lantas, bagaimana dengan inflasi yang terjadi di Indonesia saat ini?



Disatu sisi, Aggregate Demand masih tumbuh sekitar 5 persen, tingkat pengangguran mengalami penurunan, dan investasi masih tumbuh (terutama Investasi dalam negeri) dalam 3 tahun terakhir, mengindikasikan bahwa

perekonomian masih dalam kondisi baik. Namun, disisi lain pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih tertahan sekitar 5.02 persen secara rata-rata tahunan dalam 5 tahun terakhir juga telah menjawab pertanyaan mengenai apakah inflasi yang rendah tersebut pada akhirnya mampu mendrive pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, nyatanya tidak.

Arah pembangunan di era Presiden Jokowi-JK menitikberatkan kepada pemerataan ekonomi, dengan salah satu fokusnya yakni pengendalian harga guna mempertahankan daya beli masyarakat. Sehingga tidak heran jika dengan arah pembangunan ini inflasi terjaga pada level yang rendah, dengan konsekuensi pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah.

Tantangan Inflasi Yang Rendah Terhadap Perekonomian Indonesia

Inflasi yang rendah menghadirkan tantangan tersendiri bagi perekonomian Indonesia, beberapa tantangan yang harus diperhatikan oleh Pemerintah antaranya:

Pertama, Pemerintah perlu mewaspadai rendahnya inflasi saat ini sebagai indikasi terhadap perlambatan ekonomi Indonesia. Perlambatan ekonomi tersebut terutama dapat dipicu oleh melambatnya perekonomian global saat ini yang disebabkan polemik seperti perang dagang, proteksi dagang, dan faktor lainnya yang mempengaruhi iklim perekonomian dunia, serta berimbas terhadap penurunan Agregat Demand. Saat ini bukan hanya Indonesia yang memiliki inflasi rendah, sebagian besar negara di dunia tengah mengalami gejala yang serupa mulai dari negara maju seperti US, Uni Eropa, Jepang, dan China. Sampai dengan negara berkembang lainnya seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Sehingga, Pemerintah perlu mencari cara agar inflasi yang rendah saat ini tidak sampai mengakibatkan perlambatan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di periode yang akan datang.

Kedua, Inflasi yang rendah serta ekspektasi inflasi yang hampir selalu meleset dari target dalam APBN dalam kurun 5 tahun terakhir, dikhawatirkan berpotensi menurunkan keinginan para pelaku usaha untuk melakukan investasi maupun ekspansi di Indonesia. Pasalnya, ekspektasi inflasi yang cukup rendah akan berdampak terhadap rendahnya keuntungan yang diperoleh pelaku usaha, yang kemudian akan berdampak terhadap penurunan jumlah produksi, penurunan jumlah produksi dalam jangka panjang berpotensi menyebabkan PHK, dan mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi kedepannya. Pemerintah perlu konsisten dalam mencapai target inflasi yang ditetapkan, serta mendorong agar inflasi berada pada level optimum untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, Salah satu penyebab rendahnya inflasi sejak tahun 2015 adalah harga minyak mentah dunia yang cenderung mengalami penurunan kala itu sebagai imbas dari perlambatan perekonomian dunia. Harga minyak mentah merupakan salah satu komoditas yang berdampak signifikan terhadap inflasi, selain volatile foods. Namun, Pemerintah perlu mewaspadai adanya tren kenaikan harga minyak mentah dunia dalam kurun dua tahun terakhir ini. Perlu adanya upaya segera untuk mengembangkan potensi energi baru dan terbarukan sebagai pengganti energi fosil untuk memitigasi volatilitas dari harga minyak dunia.

Keempat, Walaupun inflasi secara keseluruhan rendah, namun untuk inflasi volatile food cenderung bergejolak lebih tinggi. Hal ini berpotensi

mempengaruhi daya beli masyarakat khususnya 40 persen masyarakat berpenghasilan terendah, dimana pada golongan ini lebih dari 70-75 persen penghasilannya dipergunakan untuk membeli bahan makanan. Sebagai negara yang bergantung terhadap konsumsi masyarakat, perlu adanya upaya Pemerintah untuk menjaga inflasi volatile food secara lebih ketat lagi, agar daya beli masyarakat tidak tergerus.

Kelima, Jika Pemerintah meyakini bahwa rendahnya inflasi merupakan kinerja dari Pemerintahan saat ini, dan bukan diakibatkan indikasi akan perlambatan perekonomian, semestinya Pemerintah mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi ke level yang lebih tinggi. Ditambah lagi momentum pelonggaran suku bunga yang dilakukan The Fed, dapat memicu penurunan suku bunga kebijakan BI ke level yang lebih rendah, sehingga konsumsi dan investasi diharapkan dapat tumbuh lebih baik kedepannya, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Pertanyaan Kritis Terkait Rendahnya Inflasi Indonesia

1. Pemerintah optimis bahwa rendahnya level inflasi saat ini merupakan hasil kerja keras pemerintah. Namun, **Apa dampak dari rendahnya inflasi saat ini terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.** Mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 5 tahun terakhir secara rata-rata tetap berada di level 5.02 persen. **Apakah inflasi yang rendah tersebut hanya sebagai implikasi dari gejala perlambatan perekonomian nasional dan global?**
2. Inflasi yang terlalu rendah, akan menekan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terlalu tinggi juga akan membuat daya beli masyarakat turun mengakibatkan roda perekonomian tidak berjalan. Negara-negara Eropa dan Jepang tengah mengalami tekanan deflasi yang menekan pertumbuhan ekonomi mereka, sementara Indonesia memiliki pengalaman inflasi tinggi pada krisis ekonomi 1998 yang juga menekan pertumbuhan ekonomi. **Lantas, pada level berapa sebenarnya inflasi Indonesia dikatakan optimal untuk mendrive laju pertumbuhan Ekonomi Indonesia? Serta apakah level inflasi Indonesia yang rendah saat ini dapat dikatakan optimal dalam mendrive pertumbuhan ekonomi?**
3. Tingkat Inflasi dapat menjadi insentif bagi para pelaku usaha untuk melakukan investasi dan ekspansi. Karena level inflasi yang tinggi dan stabil mengindikasikan adanya konsumsi yang tinggi. Rendahnya inflasi berpotensi menurunkan minat para pelaku usaha dan investor untuk berinvestasi dan melakukan ekspansi. **Bagaimana Pemerintah dapat meyakinkan kepada para pelaku**

usaha dan investor, untuk tetap berinvestasi dan melakukan ekspansi di Indonesia, ditengah ketidakpastian perekonomian global saat ini?

4. Pemerintah berupaya menjaga inflasi pada level yang rendah dan stabil guna menjaga daya beli masyarakat agar tidak turun. Namun disisi lain, inflasi volatile food yang merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi daya beli masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah justru cenderung meningkat lebih tinggi. Sebagai contoh di tahun 2019, sampai dengan Juli 2019 inflasi Indonesia secara umum sebesar 2.36 persen, sementara inflasi volatile food sampai dengan Juli 2019 sebesar 6.13 persen. **Upaya apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah untuk dapat menjaga inflasi volatile food agar lebih stabil di level yang rendah?**
5. **Akankah inflasi yang rendah saat ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia kearah yang lebih tinggi? Atau justru akan berdampak terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi kedepannya? Serta sejauh mana ekonomi Indonesia mampu terus tumbuh ditengah perlambatan ekonomi dunia saat ini?** Hal tersebut sangat penting diidentifikasi oleh Pemerintah, mengingat inflasi yang rendah dapat menjadi salah satu indikator untuk menilai kondisi perekonomian saat ini.

LAMPIRAN 2.5 Catatan Hasil Konsultasi Dengan Mentor



**Pusat Kajian Anggaran
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Kode Pos 10270

Telp. (021) 5715730 Fax. (021) 5715933 Laman: puskajianggaran.dpr.go.id

CATATAN HASIL KONSULTASI CPNS DENGAN MENTOR

<u>Hari, Tanggal</u>	:	Jum'at, 23 Agustus 2019
<u>Pukul</u>	:	07.00 WIB
<u>Tempat</u>	:	Ruang Analis APBN Pusat Kajian Anggaran Gedung Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI
<u>Acara</u>	:	Melakukan Konsultasi dan meminta saran masukan atas draft awal analisis yang telah penulis buat kepada mentor.
<u>Narasumber</u>	:	Rastri Paramita, S.E., M.M.

1. PEMBUKAAN

CPNS melakukan konsultasi dengan Koordinator Bidang Perencanaan dan Asumsi Dasar Ekonomi Makro (PADEM), dengan menyerahkan draft awal analisis yang telah dikerjakan kepada mentor untuk meminta saran dan masukan perbaikan sebelum dilaksanakannya presentasi kepada seluruh Analis APBN di Pusat Kajian Anggaran. Kegiatan dilakukan pada hari Jum'at, 23 Agustus 2019 pada pukul 07.00 WIB.

2. POKOK- POKOK HASIL PEMBAHASAN

Adapun dari pokok-pokok hasil konsultasi yang dilakukan tersebut, penulis mendapatkan beberapa saran dan masukan untuk perbaikan, antara lain:

- a) Pada tantangan pertama diawali dengan menggambarkan tantangan global yang berdampak pada rendahnya permintaan sehingga mengakibatkan penurunan aggregate demand produk Indonesia. Digambarkan tantangan

pemerintah dalam memanfaatkan inflasi rendah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

- b) Pada tantangan kedua, apakah lebih ke target inflasi yang rendah atau inflasi tidak capai target? Kalau targetnya kerendahan bisa dimanfaatkan tetapi tantangannya pemerintah harus mampu membuat kebijakan yang meningkatkan sisi konsumsi agregat untuk mendorong pertumbuhan produksi sektor industri.
- c) Pada tantangan ketiga, Volatilitas harga komoditas minyak memengaruhi inflasi Indonesia melalui harga bahan bakar. Tantangan pemerintah bagaimana meminimalisir dampak volatilitas harga minyak terhadap perekonomian.
- d) Pada tantangan keempat, sebaiknya pembukanya adalah faktor yang mengakibatkan inflasi, jadi kalimatnya bisa seperti ini: volatile food merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap inflasi di Indonesia. Kondisi disebabkan karena karakteristik contributor terbesar terhadap PDB adalah dari konsumsi." Setelah itu baru jabarkan tantangan pemerintah dalam mengendalikan volatile food ini.
- e) Pada tantangan kelima, Pelonggaran moneter dilakukan oleh BI dengan memprediksi suku bunga internasional akan dovish. Tolong di cek apakah the Fed sudah melakukan penurunan suku bunga. Tantangan kelima bisa menyinggung bagaimana kebijakan pemerintah mengakomodasi pelonggaran moneter yang dilakukan BI agar transmisi kebijakan moneter dapat terasa pada sektor riil.

3. PENUTUP

Demikianlah Catatan atas hasil komunikasi Riza Aditya Syafri dengan Koordinator Bidang Perencanaan dan Asumsi Dasar Ekonomi Makro yang juga sekaligus mentor.

Jakarta, 23 Agustus 2019

Mengetahui,
Mentor

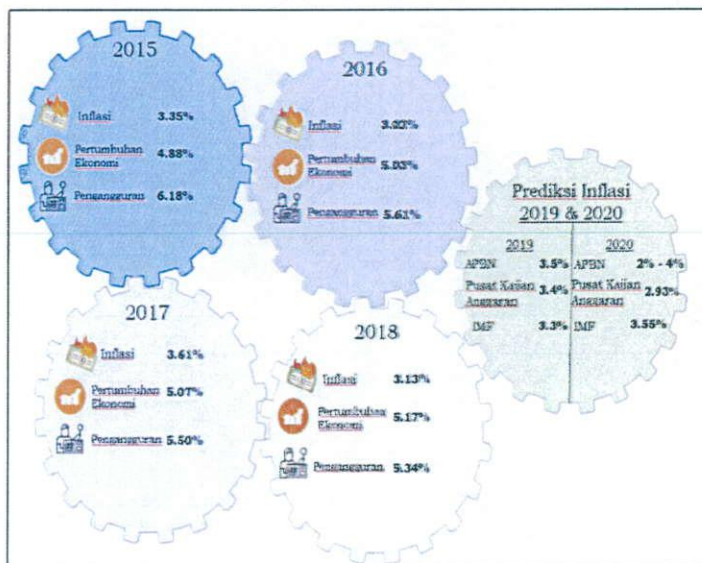


Rastri Paramita, S.E., M.M
NIP. 198001262014022002

LAMPIRAN 2.6 Draft Analisis Yang Telah Direvisi Masukan Mentor

Critical View Analysis: Inflasi Rendah dan Faktanya terhadap Perekonomian Indonesia

Rata-rata inflasi Indonesia mengalami penurunan signifikan, bahkan lebih rendah dari yang ditetapkan pada APBN dalam 5 tahun terakhir. Inflasi yang rendah dapat berpengaruh positif maupun negatif tergantung dari faktor yang mendorong inflasi tersebut. Jika inflasi didorong oleh penurunan cost dari faktor-faktor produksi sementara Aggregate Demand tetap atau justru meningkat, maka inflasi yang rendah tersebut dapat mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi. Namun sebaliknya, jika inflasi yang rendah dimotori oleh melambatnya aktivitas ekonomi, maka inflasi yang rendah tersebut dapat menjadi sinyal akan perlambatan ekonomi. Lantas, bagaimana dengan inflasi yang terjadi di Indonesia saat ini?



Disatu sisi, Aggregate Demand masih tumbuh sekitar 5 persen, tingkat pengangguran mengalami penurunan, dan investasi masih tumbuh (terutama Investasi dalam negeri) dalam 3 tahun terakhir, mengindikasikan bahwa perekonomian

masih dalam kondisi baik. Namun, disisi lain pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih tertahan sekitar 5.02 persen secara rata-rata tahunan dalam 5 tahun terakhir juga telah menjawab pertanyaan mengenai apakah inflasi yang rendah tersebut pada akhirnya mampu mendrive pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, nyatanya tidak.

Arah pembangunan di era Presiden Jokowi-JK menitikberatkan kepada pemerataan ekonomi, dengan salah satu fokusnya yakni pengendalian harga guna mempertahankan daya beli masyarakat. Sehingga tidak heran jika dengan arah pembangunan ini inflasi terjaga

pada level yang rendah, dengan konsekuensi pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah.

Tantangan Inflasi Yang Rendah Terhadap Perekonomian Indonesia

Inflasi yang rendah menghadirkan tantangan tersendiri bagi perekonomian Indonesia, beberapa tantangan yang harus diperhatikan oleh Pemerintah antaranya:

Pertama, Pemerintah perlu mewaspadaikan rendahnya inflasi saat ini sebagai indikasi terhadap perlambatan ekonomi Indonesia. Perlambatan ekonomi tersebut terutama dapat dipicu oleh melambatnya perekonomian global saat ini yang disebabkan polemik seperti perang dagang, proteksi dagang, dan faktor lainnya yang mempengaruhi iklim perekonomian dunia, serta berimbas terhadap penurunan Agregat Demand. Saat ini bukan hanya Indonesia yang memiliki inflasi rendah, sebagian besar negara di dunia tengah mengalami gejala yang serupa mulai dari negara maju seperti US, Uni Eropa, Jepang, dan China. Sampai dengan negara berkembang lainnya seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Sehingga, Pemerintah perlu mencari cara agar inflasi yang rendah saat ini tidak sampai mengakibatkan perlambatan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di periode yang akan datang.

Kedua, Inflasi yang rendah dalam kurun 5 tahun terakhir, dikhawatirkan berpotensi menurunkan keinginan para pelaku usaha untuk melakukan investasi maupun ekspansi di Indonesia. Pasalnya, ekspektasi inflasi yang cukup rendah akan berdampak terhadap rendahnya keuntungan yang diperoleh pelaku usaha, yang kemudian akan berdampak terhadap penurunan jumlah produksi, penurunan jumlah produksi dalam jangka panjang berpotensi menyebabkan PHK, dan mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi kedepannya. Pemerintah perlu mendorong agar inflasi berada pada level optimum, dengan membuat kebijakan yang mampu meningkatkan sisi konsumsi agregat, sehingga dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, Salah satu penyebab rendahnya inflasi sejak tahun 2015 adalah harga minyak mentah dunia yang cenderung mengalami penurunan kala itu sebagai imbas dari perlambatan perekonomian dunia. Harga minyak mentah merupakan salah satu komoditas yang berdampak signifikan terhadap inflasi, selain volatile foods. Namun, Pemerintah perlu mewaspadaikan adanya tren kenaikan harga minyak mentah dunia dalam kurun dua tahun terakhir ini. Perlu adanya upaya segera untuk mengembangkan potensi energi baru dan terbarukan sebagai pengganti energi fosil untuk memitigasi volatilitas dari harga minyak terhadap perekonomian.

Keempat, Volatile food merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia. Kondisi tersebut disebabkan karena karakteristik PDB Indonesia yang lebih dari 50 persen ditopang dari konsumsi. Saat ini, walaupun inflasi secara keseluruhan rendah, namun untuk inflasi volatile food cenderung bergejolak lebih tinggi. Hal ini berpotensi mempengaruhi daya beli masyarakat khususnya 40 persen masyarakat berpenghasilan terendah, dimana pada golongan ini lebih dari 70-75 persen penghasilannya dipergunakan untuk membeli bahan makanan. Sebagai negara yang bergantung terhadap konsumsi masyarakat, perlu adanya upaya Pemerintah untuk menjaga inflasi volatile food secara lebih ketat lagi, agar daya beli masyarakat tidak tergerus.

Kelima, Jika Pemerintah meyakini bahwa rendahnya inflasi merupakan kinerja dari Pemerintahan saat ini, dan bukan diakibatkan indikasi akan perlambatan perekonomian, semestinya Pemerintah mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi ke level yang lebih tinggi. Ditambah lagi momentum pelonggaran suku bunga yang telah dilakukan The Fed sebesar 25 basis poin pada Juli 2019 lalu menjadi 2.25 persen, dan diperkirakan akan terus dovish sekitar 25-50 basis poin lagi, diharapkan dapat memicu penurunan suku bunga kebijakan BI (BI 7-days repo rate) ke level yang lebih rendah. Pemerintah diharapkan mampu menyediakan kebijakan yang dapat mengakomodir pelonggaran moneter yang dilakukan BI, agar dapat dirasakan pada sektor riil. Sehingga, konsumsi dan investasi diharapkan dapat tumbuh lebih baik kedepannya, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Pertanyaan Kritis Terkait Rendahnya Inflasi Indonesia

1. Pemerintah optimis bahwa rendahnya level inflasi saat ini merupakan hasil kerja keras pemerintah. Namun, **Apa dampak dari rendahnya inflasi saat ini terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.** Mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 5 tahun terakhir secara rata-rata tetap berada di level 5.02 persen. **Apakah inflasi yang rendah tersebut hanya sebagai implikasi dari gejala perlambatan perekonomian nasional dan global?**
2. Inflasi yang terlalu rendah, akan menekan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terlalu tinggi juga akan membuat daya beli masyarakat turun mengakibatkan roda perekonomian tidak berjalan. Negara-negara Eropa dan Jepang tengah mengalami tekanan deflasi yang menekan pertumbuhan ekonomi mereka, sementara Indonesia memiliki pengalaman inflasi tinggi pada krisis ekonomi 1998 yang juga menekan pertumbuhan ekonomi. **Lantas, pada level berapa sebenarnya inflasi Indonesia dikatakan optimal untuk mendrive laju pertumbuhan Ekonomi**


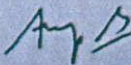
Indonesia? Serta apakah level inflasi Indonesia yang rendah saat ini dapat dikatakan optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi?

3. Tingkat Inflasi dapat menjadi insentif bagi para pelaku usaha untuk melakukan investasi dan ekspansi. Karena level inflasi yang tinggi dan stabil mengindikasikan adanya konsumsi yang tinggi. Rendahnya inflasi berpotensi menurunkan minat para pelaku usaha dan investor untuk berinvestasi dan melakukan ekspansi. **Bagaimana Pemerintah dapat meyakinkan kepada para pelaku usaha dan investor, untuk tetap berinvestasi dan melakukan ekspansi di Indonesia, ditengah ketidakpastian perekonomian global saat ini?**
4. Pemerintah berupaya menjaga inflasi pada level yang rendah dan stabil guna menjaga daya beli masyarakat agar tidak turun. Namun disisi lain, inflasi volatile food yang merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi daya beli masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah justru cenderung meningkat lebih tinggi. Sebagai contoh di tahun 2019, sampai dengan Juli 2019 inflasi Indonesia secara umum sebesar 2.36 persen, sementara inflasi volatile food sampai dengan Juli 2019 sebesar 6.13 persen. **Upaya apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah untuk dapat menjaga inflasi volatile food agar lebih stabil di level yang rendah?**
5. **Akankah inflasi yang rendah saat ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia kearah yang lebih tinggi? Atau justru akan berdampak terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi kedepannya? Serta sejauh mana ekonomi Indonesia mampu terus tumbuh ditengah perlambatan ekonomi dunia saat ini?** Hal tersebut sangat penting diidentifikasi oleh Pemerintah, mengingat inflasi yang rendah dapat menjadi salah satu indikator untuk menilai kondisi perekonomian saat ini.

LAMPIRAN KEGIATAN III

- Lampiran 3.1 Surat Undangan Pelaksanaan Sosialisasi**
- Lampiran 3.2 Daftar Hadir Sosialisasi, Laporan Singkat Hasil Sosialisasi, Bahan Presentasi**
- Lampiran 3.3 Draft Final Analisis**

LAMPIRAN 3.1 Surat Undangan Pelaksanaan Sosialisasi

		SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA JL. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 TELP. (021) 5715730 FAX. (021) 5715933 LAMAN www.dpr.go.id												
Nomor	BK/13281/SETJEN DAN BK DPR RI/PA/08/2019	20 Agustus 2019												
Sifat	Penting													
Derajat	Segera													
Lampiran	1 (satu) Berkas													
Perihal	Permohonan Sebagai Peserta													
Yth. Pejabat dan Analis di Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI Jakarta														
<p>Dengan hormat, bersama ini kami beritahukan bahwa dalam rangka peningkatan pemberian dukungan keahlian kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Dewan bermaksud mengadakan Presentasi Aktualisasi CPNS Pusat Kajian Anggaran yang akan dilaksanakan pada:</p> <p>Hari/Tanggal : Jumat, 23 Agustus 2019 Waktu : Pukul 14.00 WIB - Selesai Tempat : Ruang Rapat Pusat Kajian Anggaran Gedung Setjen dan Badan Keahlian Dewan lantai 6 Ruang 611</p> <p>Agenda</p> <table border="0"><tr><td>1</td><td>Riza Aditya Syafri, S. AK</td><td>: Critical Review Analysis Inflasi Indonesia</td></tr><tr><td>2</td><td>Damia Liana, S.E.</td><td>: Pemutakhiran Data Postur APBN pada Website PKA</td></tr><tr><td>3</td><td>Mutiara Shinta Andini, S.E.</td><td>: Budget Issue Review Pertumbuhan Ekonomi Indonesia</td></tr><tr><td>4</td><td>Ervita Luluk Zahara, S.E.</td><td>: Pemutakhiran Menu Formula pada Website PKA</td></tr></table> <p>Sehubungan dengan kegiatan tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara untuk menjadi Peserta dalam kegiatan dimaksud.</p> <p>Atas perhatian dan kehadiran Saudara, kami ucapkan terima kasih.</p> <p>Kepala Pusat Kajian Anggaran,</p> <p> Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si, NIP. 197109111997031005</p>			1	Riza Aditya Syafri, S. AK	: Critical Review Analysis Inflasi Indonesia	2	Damia Liana, S.E.	: Pemutakhiran Data Postur APBN pada Website PKA	3	Mutiara Shinta Andini, S.E.	: Budget Issue Review Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	4	Ervita Luluk Zahara, S.E.	: Pemutakhiran Menu Formula pada Website PKA
1	Riza Aditya Syafri, S. AK	: Critical Review Analysis Inflasi Indonesia												
2	Damia Liana, S.E.	: Pemutakhiran Data Postur APBN pada Website PKA												
3	Mutiara Shinta Andini, S.E.	: Budget Issue Review Pertumbuhan Ekonomi Indonesia												
4	Ervita Luluk Zahara, S.E.	: Pemutakhiran Menu Formula pada Website PKA												

LAMPIRAN 3.2.1 Laporan Singkat Hasil Sosialisasi



**Pusat Kajian Anggaran
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Kode Pos 10270

Telp. (021) 5715730 Fax. (021) 5715933 Laman: puskajiananggaran.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT HASIL SOSIALISASI AKTUALISASI CPNS PUSAT KAJIAN ANGGARAN

<u>Hari, Tanggal</u>	:	Jum'at, 23 Agustus 2019
<u>Pukul</u>	:	14.00 WIB s/d 15.30 WIB
<u>Tempat</u>	:	Ruang Rapat Pusat Kajian Anggaran Gedung Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI
<u>Acara</u>	:	CPNS Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Output Aktualisasi yang dilakukan untuk mendapatkan saran dan masukan perbaikan
<u>Pimpinan</u>	:	Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

1. PEMBUKAAN

CPNS melakukan Sosialisasi terkait dengan output yang dihasilkan dalam aktualisasi, serta meminta saran perbaikan dari hasil analisis yang telah dihasilkan. Acara sosialisasi dilaksanakan pada Jum'at, 23 Agustus 2019 pada pukul 14.00 WIB sampai dengan 15.30 WIB. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Pusat Kajian Anggaran, Kepala Sub. Bagian Tata Usaha di Pusat Kajian Anggaran, Para Koordinator Bidang di Pusat Kajian Anggaran, serta seluruh Analis APBN di Pusat Kajian Anggaran.

2. POKOK- POKOK HASIL PEMBAHASAN

Adapun dari hasil sosialisasi yang dilakukan tersebut, penulis mendapatkan beberapa saran dan masukan untuk perbaikan analisis yang penulis lakukan, antara lain:

- a) Pada bagian pertanyaan kritis, tepatnya pada pertanyaan kedua. Penulis membuat pertanyaan mengenai titik inflasi yang optimal bagi Indonesia. Berdasarkan hasil masukan dari Analis APBN di Pusat Kajian agar pertanyaan tersebut diganti, karena sangat sulit untuk menghitung inflasi yang optimum;
- b) Pada analisis, penulis mengatakan bahwa Aggregate Demand meningkat. Berdasarkan masukan dari para Analis APBN mengatakan bahwa memang pasti secara nominal Aggregate Demand/PDB akan meningkat, tapi coba penulis melakukan kroscek terhadap deltanya (Selisih kenaikan PDB dari beberapa tahun terakhir), maka akan didapati walaupun tumbuh, tapi pertumbuhan Indonesia saat ini mengalami perlambatan;
- c) Terdapat masukan untuk bagian judul agar diganti menjadi "*Critical View*" bukan "*Critical Review*" karena agak kurang pas jika melakukan review namun dalam sebuah analisis ringkas cepat;
- d) Terdapat masukan dari para Analis APBN agar menambahkan bagian pertanyaan kritisnya, karena poin utamanya adalah bagian tersebut;
- e) Ada beberapa masukan mengenai judul baru, antara lain "*Critical Point Analysis*";
- f) Ada masukan dari Para Analis APBN agar pertanyaan dibuat lebih banyak dan dijabarkan secara runtun;
- g) Ada masukan dari Para Analis APBN agar pada bagian judul "Faktanya" lebih baik diganti, karena agak sedikit kontradiksi, lebih baik diganti menjadi "Dampaknya";
- h) Ada masukan jika analisis inflasi tersebut mau lebih dilihat dari sisi produksi, atau dari sisi konsumsinya, atau keduanya. Karena dampaknya akan berbeda. Inflasi rendah dari sisi produksi akan berdampak negatif, sementara dari sisi konsumsi akan berdampak positif;

3. PENUTUP

Demikianlah Laporan Singkat atas hasil Sosialisasi aktualisasi Riza Aditya Syafri dengan para Analis APBN di Pusat Kajian Anggaran, serta hasil masukan dan feedback perbaikan yang diperoleh.

Jakarta, 23 Agustus 2019

Mengetahui,
Kepala Pusat Kajian Anggaran

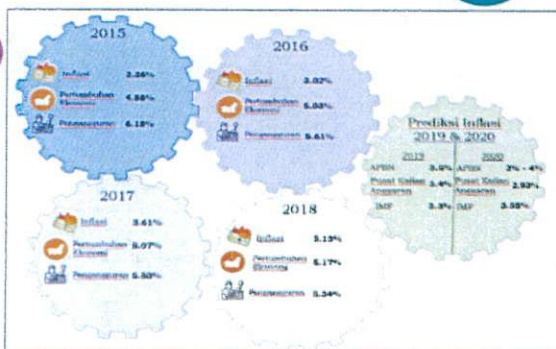


Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

NIP. 197109111997031005

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Critical Review Analysis: Inflasi Rendah dan Faktanya Terhadap Perekonomian Indonesia



Rata-rata inflasi Indonesia mengalami penurunan signifikan, bahkan lebih rendah dari yang ditetapkan pada APBN dalam 5 tahun terakhir. Inflasi yang rendah dapat berpengaruh positif maupun negatif tergantung dari faktor yang mendorong inflasi tersebut. Jika inflasi didorong oleh penurunan cost dari faktor-faktor produksi sementara Aggregate Demand tetap atau justru meningkat, maka inflasi yang rendah tersebut dapat mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi. Namun sebaliknya, jika inflasi yang rendah dimotori oleh melambatnya aktivitas ekonomi, maka inflasi yang rendah tersebut dapat menjadi sinyal akan perlambatan ekonomi. Lantas, bagaimana dengan inflasi yang terjadi di Indonesia saat ini?

Disatu sisi, Aggregate Demand masih tumbuh sekitar 5 persen, tingkat pengangguran mengalami penurunan, dan investasi masih tumbuh (terutama Investasi dalam negeri) dalam 3 tahun terakhir, mengindikasikan bahwa perekonomian masih dalam kondisi baik. Namun, disisi lain pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih tertahan sekitar 5.02 persen secara rata-rata tahunan dalam 5 tahun terakhir juga telah menjawab pertanyaan mengenai apakah inflasi yang rendah tersebut pada akhirnya mampu mendrive pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, nyatanya tidak.

Arah pembangunan di era Presiden Jokowi-JK menitikberatkan kepada pemerataan ekonomi, dengan salah satu fokusnya yakni pengendalian harga guna mempertahankan daya beli masyarakat. Sehingga tidak heran jika dengan arah pembangunan ini inflasi terjaga pada level yang rendah, dengan konsekuensi pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah.

Tantangan Inflasi yang Rendah Terhadap Perekonomian Indonesia



Pertama, Pemerintah perlu mewaspadai rendahnya inflasi saat ini sebagai indikasi terhadap perlambatan ekonomi Indonesia. Perlambatan ekonomi tersebut terutama dapat dipicu oleh melambatnya perekonomian global saat ini yang disebabkan polemik seperti perang dagang, proteksi dagang, dan faktor lainnya yang mempengaruhi iklim perekonomian dunia, serta berimbas terhadap penurunan Agregat Demand. Saat ini bukan hanya Indonesia yang memiliki inflasi rendah, sebagian besar negara di dunia tengah mengalami gejala yang serupa mulai dari negara maju seperti US, Uni Eropa, Jepang, dan China. Sampai dengan negara berkembang lainnya seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Sehingga, Pemerintah perlu mencari cara agar inflasi yang rendah saat ini tidak sampai mengakibatkan perlambatan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di periode yang akan datang.

Kedua, Inflasi yang rendah serta ekspektasi inflasi yang hampir selalu meleset dari target dalam APBN dalam kurun 5 tahun terakhir, dikhawatirkan berpotensi menurunkan keinginan para pelaku usaha untuk melakukan investasi maupun ekspansi di Indonesia. Pasalnya, ekspektasi inflasi yang cukup rendah akan berdampak terhadap rendahnya keuntungan yang diperoleh pelaku usaha, yang kemudian akan berdampak terhadap penurunan jumlah produksi, penurunan jumlah produksi dalam jangka panjang berpotensi menyebabkan PHK, dan mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi kedepannya. Pemerintah perlu konsisten dalam mencapai target inflasi yang ditetapkan, serta mendorong agar inflasi berada pada level optimum untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi.

Tantangan Inflasi yang Rendah Terhadap Perekonomian Indonesia



Ketiga, Salah satu penyebab rendahnya inflasi sejak tahun 2015 adalah harga minyak mentah dunia yang cenderung mengalami penurunan kala itu sebagai imbas dari perlambatan perekonomian dunia. Harga minyak mentah merupakan salah satu komoditas yang berdampak signifikan terhadap inflasi, selain volatile foods. Namun, Pemerintah perlu mewaspadai adanya tren kenaikan harga minyak mentah dunia dalam kurun dua tahun terakhir ini. Perlu adanya upaya segera untuk mengembangkan potensi energi baru dan terbarukan sebagai pengganti energi fosil untuk memitigasi volatilitas dari harga minyak dunia.

Keempat, Walaupun inflasi secara keseluruhan rendah, namun untuk inflasi volatile food cenderung bergejolak lebih tinggi. Hal ini berpotensi mempengaruhi daya beli masyarakat khususnya 40 persen masyarakat berpenghasilan terendah, dimana pada golongan ini lebih dari 70-75 persen penghasilannya dipergunakan untuk membeli bahan makanan. Sebagai negara yang bergantung terhadap konsumsi masyarakat, perlu adanya upaya Pemerintah untuk menjaga inflasi volatile food secara lebih ketat lagi, agar daya beli masyarakat tidak tergerus.

Kelima, Jika Pemerintah meyakini bahwa rendahnya inflasi merupakan kinerja dari Pemerintahan saat ini, dan bukan diakibatkan indikasi akan perlambatan perekonomian, semestinya Pemerintah mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi ke level yang lebih tinggi. Ditambah lagi momentum pelonggaran suku bunga yang dilakukan The Fed, dapat memicu penurunan suku bunga kebijakan BI ke level yang lebih rendah, sehingga konsumsi dan investasi diharapkan dapat tumbuh lebih baik kedepannya, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

PERTANYAAN KRITIS Terkait Rendahnya Inflasi Indonesia

1

Pemerintah optimis bahwa rendahnya level inflasi saat ini merupakan hasil kerja keras pemerintah. Namun, Apa dampak dari rendahnya inflasi saat ini terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 5 tahun terakhir secara rata-rata tetap berada di level 5.02 persen. Apakah inflasi yang rendah tersebut hanya sebagai implikasi dari gejala perlambatan perekonomian nasional dan global?

2

Inflasi yang terlalu rendah, akan menekan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terlalu tinggi juga akan membuat daya beli masyarakat turun mengakibatkan roda perekonomian tidak berjalan. Negara-negara Eropa dan Jepang tengah mengalami tekanan deflasi yang menekan pertumbuhan ekonomi mereka, sementara Indonesia memiliki pengalaman inflasi tinggi pada krisis ekonomi 1998 yang juga menekan pertumbuhan ekonomi. Lantas, pada level berapa sebenarnya inflasi Indonesia dikatakan optimal untuk mendrive laju pertumbuhan Ekonomi Indonesia? Serta apakah level inflasi Indonesia yang rendah saat ini dapat dikatakan optimal dalam mendrive pertumbuhan ekonomi?

3

Tingkat Inflasi dapat menjadi insentif bagi para pelaku usaha untuk melakukan investasi dan ekspansi. Karena level inflasi yang tinggi dan stabil mengindikasikan adanya konsumsi yang tinggi. Rendahnya inflasi berpotensi menurunkan minat para pelaku usaha dan investor untuk berinvestasi dan melakukan ekspansi. Bagaimana Pemerintah dapat meyakinkan kepada para pelaku usaha dan investor, untuk tetap berinvestasi dan melakukan ekspansi di Indonesia, ditengah ketidakpastian perekonomian global saat ini?

4


Pemerintah berupaya menjaga inflasi pada level yang rendah dan stabil guna menjaga daya beli masyarakat agar tidak turun. Namun disisi lain, inflasi volatile food yang merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi daya beli masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah justru cenderung meningkat lebih tinggi. Sebagai contoh di tahun 2019, sampai dengan Juli 2019 inflasi Indonesia secara umum sebesar 2.36 persen, sementara inflasi volatile food sampai dengan Juli 2019 sebesar 6.13 persen. Upaya apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah untuk dapat menjaga inflasi volatile food agar lebih stabil di level yang rendah?

5

Apakah inflasi yang rendah saat ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia kearah yang lebih tinggi? Atau justru akan berdampak terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi kedepannya? Serta sejauh mana ekonomi Indonesia mampu terus tumbuh ditengah perlambatan ekonomi dunia saat ini? Hal tersebut sangat penting diidentifikasi oleh Pemerintah, mengingat inflasi yang rendah dapat menjadi salah satu indikator untuk menilai kondisi perekonomian saat ini.

PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN DPR RI
Telp. 021-5715635

LAMPIRAN 3.2.3 Daftar Hadir Sosialisasi

 **SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
JL. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5719730 FAX. (021) 5719933 LAMAN www.dpr.go.id

**DAFTAR HADIR RAPAT
TENTANG
"PRESENTASI AKTUALISASI CPNS PUSAT KAJIAN ANGGARAN"**

Hari/tanggal: Jumat, 23 Agustus 2019
Waktu: Pukul 14.00 WIB – Selesai
Tempat: Ruang Rapat Kepala Pusat Kajian Anggaran DPR RI
Gedung Setjen dan BK Lantai 6

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	DR. ASEP AHMAD SAEPULCH, SE, M.Si	KEPALA PUSAT KAJIAN ANGGARAN	
2.	DR. INDRA PAHLEVI	KEPALA PUSAT PENELITIAN	
3.	HUSNUL LATIFAH, S.SOS	KEPALA SUBAG TATA USAHA PUSAT KAJIAN ANGGARAN	
4.	SLAMET WODOO, S.E, M.E	ANALIS APBN AHLI MADYA	
5.	ROBBY ALEXANDER SIRAIT, S.E, M.E	ANALIS APBN AHLI PERTAMA	
6.	RASTRI PARAMITA, S.E, M.M	ANALIS APBN AHLI PERTAMA	
7.	DWI RESTI PRATIWI, S.T, MPM	ANALIS APBN AHLI PERTAMA	
8.	MARIHOT NASUTION, SE, M.Si	ANALIS APBN AHLI PERTAMA	
9.	ADHI PRASETYO SATRIO W., S.M	ANALIS APBN AHLI PERTAMA	
10.	MARTHA CAROLINA, SE, AK, M.AK	ANALIS APBN AHLI PERTAMA	
11.	RATNA CHRISTIANINGRUM, S.Si, M.Si	ANALIS APBN AHLI PERTAMA	
12.	DAHIRI, S.Si, M.SC	ANALIS APBN AHLI PERTAMA	
13.	ADE NURUL AIDA, S.E	ANALIS APBN AHLI PERTAMA	

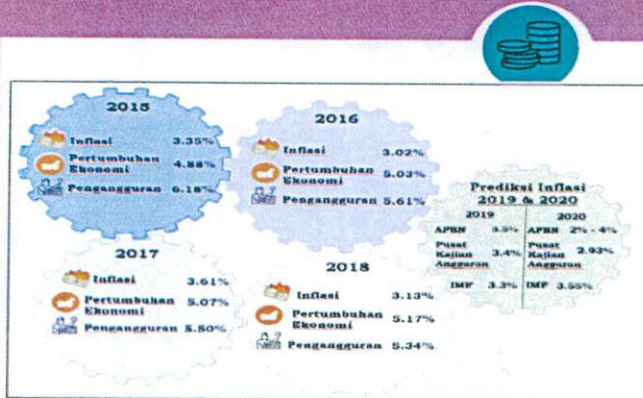
14.	RENDY ALVARO, S.SOS	ANALIS APBN AHLI PERTAMA MUDA	
15.	DEASY DWI RAMAYU, S.E	ANALIS APBN (CPNS)	
16.	ERVITA LULUK ZAHARA, S.E	ANALIS APBN (CPNS)	
17.	MUTIARA SHINTA ANDRI, S.E	ANALIS APBN (CPNS)	
18.	NADYA ANDA, S.E	ANALIS APBN (CPNS)	
19.	ROSALINA TINEKE KUSUMA WARDHANI, S.E	ANALIS APBN (CPNS)	
20.	RIZA ADITYA SYAFRI, S. AK	ANALIS APBN (CPNS)	
21.	SATRIO ARGA EFFENDI, S.E	ANALIS APBN (CPNS)	
22.	SAVITRI WULANDARI, S.E	ANALIS APBN (CPNS)	
23.	TIO RIYONO, S.E	ANALIS APBN (CPNS)	
24.	DAMIA LIANA, SE	ANALIS APBN (CPNS)	
25.	MEMED SOBARI	STAF PUSAT KAJIAN ANGGARAN	
26.	MUSBIYATUN	STAF PUSAT KAJIAN ANGGARAN	
27.	HILDA PISKA RANDINI, S.I.P	STAF PUSAT KAJIAN ANGGARAN	
28.	DESSY MULYANTI HARAHAP		
29.	RAMA WARDIANSYAH		
30.	DYAH MATARAH	Analisis APBN Non fungsional	
31.	Ferry Hui Agastony	Analisis APBN	
32.	Nekah Nuhudun		
33.	Laras Lintang A	Analisis APBN Non fungsional	
34.	Fadhla Fala Leneggo Gern	Analisis APBN Non fungsional	
35.			
36.			

LAMPIRAN 3.3 Draft Final Analisis

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Critical View Analysis:

Inflasi Rendah dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia



Rata-rata inflasi Indonesia mengalami penurunan signifikan, bahkan lebih rendah dari yang ditetapkan pada APBN dalam 5 tahun terakhir. Inflasi yang rendah dapat berpengaruh positif maupun negatif tergantung dari faktor yang mendorong inflasi tersebut. Jika inflasi didorong oleh penurunan cost dari faktor-faktor produksi, sementara Aggregate Demand tetap atau justru meningkat, maka inflasi yang rendah tersebut dapat mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi. Namun sebaliknya, jika inflasi yang rendah dimotori oleh melambatnya aktivitas ekonomi, maka inflasi yang rendah tersebut dapat menjadi sinyal akan perlambatan ekonomi. Lantas, bagaimana dengan inflasi yang terjadi di Indonesia saat ini?

Disatu sisi, *Aggregate Demand* masih tumbuh sekitar 5 persen, tingkat pengangguran mengalami penurunan, dan investasi masih tumbuh (terutama investasi dalam negeri) dalam 3 tahun terakhir, mengindikasikan bahwa perekonomian masih dalam kondisi baik. Namun, disisi lain pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih tertahan sekitar 5.02 persen secara rata-rata tahunan dalam 5 tahun terakhir juga telah menjawab pertanyaan mengenai apakah inflasi yang rendah tersebut pada akhirnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, nyatanya tidak.

Arah pembangunan di era Presiden Jokowi-JK menitikberatkan kepada pemerataan ekonomi, dengan salah satu fokusnya yakni pengendalian harga guna mempertahankan daya beli masyarakat. Sehingga tidak heran jika dengan arah pembangunan ini inflasi terjaga pada level yang rendah, dengan konsekuensi pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah.

Tahukah Anda?

Selain Indonesia, beberapa negara Peer seperti Thailand, Malaysia, Philippines, dan Vietnam juga memiliki tren inflasi yang rendah, dengan rata-rata inflasi dibawah 3.6 persen dalam 3 tahun terakhir. Namun Philippines dan Vietnam berhasil mencatatkan Pertumbuhan Ekonomi yang lebih baik dari Indonesia, dengan rata-rata Pertumbuhan Ekonomi diatas 6.6 persen dalam 3 tahun terakhir.

Tantangan Inflasi yang Rendah Terhadap Perekonomian Indonesia



Pertama, Perang dagang, proteksi dagang, serta faktor lainnya secara global mempengaruhi iklim perekonomian dunia. Faktor-faktor tersebut mengakibatkan volume perdagangan global menurun dari 3.7 persen pada 2018, menjadi 2.5 persen pada 2019 ini. Penurunan volume perdagangan global tersebut juga dapat berdampak terhadap penurunan permintaan ekspor Indonesia, terutama ke dua negara tujuan ekspor Indonesia yakni AS dan China yang kemungkinan akan mengalami perlambatan ekonomi di 2019 dan 2020 mendatang. Pemerintah perlu mewaspadai rendahnya inflasi saat ini sebagai indikasi terhadap perlambatan ekonomi Indonesia, yang didorong dari perlambatan ekonomi global. Pemerintah perlu mencari cara agar inflasi yang rendah saat ini tidak sampai mengakibatkan perlambatan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di periode yang akan datang.

Kedua, Inflasi yang rendah dalam kurun 5 tahun terakhir, dikhawatirkan berpotensi menurunkan keinginan para pelaku usaha untuk melakukan investasi maupun ekspansi di Indonesia. Pasalnya, ekspektasi inflasi yang cukup rendah akan berdampak terhadap rendahnya keuntungan yang diperoleh pelaku usaha, yang kemudian akan berdampak terhadap penurunan jumlah produksi, penurunan jumlah produksi dalam jangka panjang berpotensi menyebabkan PHK, dan mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi kedepannya. Pemerintah perlu mendorong agar inflasi berada pada level optimum, dengan membuat kebijakan yang mampu meningkatkan sisi konsumsi agregat, sehingga dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi.

Tantangan Inflasi yang Rendah Terhadap Perekonomian Indonesia



Ketiga, Salah satu penyebab rendahnya inflasi sejak tahun 2015 adalah harga minyak mentah dunia yang cenderung mengalami penurunan kala itu sebagai imbas dari perlambatan perekonomian dunia. Harga minyak mentah merupakan salah satu komoditas yang berdampak signifikan terhadap inflasi, selain *volatile foods*. Namun, Pemerintah perlu mewaspadai adanya tren kenaikan harga minyak mentah dunia dalam kurun dua tahun terakhir ini. Perlu adanya upaya segera untuk mengembangkan potensi energi baru dan terbarukan sebagai pengganti energi fosil untuk memitigasi volatilitas dari harga minyak terhadap perekonomian.

Keempat, *Volatile food* merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia. Kondisi tersebut disebabkan karena karakteristik PDB Indonesia yang lebih dari 50 persen ditopang dari konsumsi. Saat ini, walaupun inflasi secara keseluruhan rendah, namun untuk inflasi *volatile food* cenderung bergejolak lebih tinggi. Hal ini berpotensi mempengaruhi daya beli masyarakat khususnya 40 persen masyarakat berpenghasilan terendah, dimana pada golongan ini lebih dari 70-75 persen penghasilannya dipergunakan untuk membeli bahan makanan. Sebagai negara yang bergantung terhadap konsumsi masyarakat, perlu adanya upaya Pemerintah untuk menjaga inflasi *volatile food* secara lebih ketat lagi, agar daya beli masyarakat tidak tergerus.

Kelima, Jika Pemerintah meyakini bahwa rendahnya inflasi merupakan kinerja dari Pemerintahan saat ini, dan bukan diakibatkan indikasi akan perlambatan perekonomian, semestinya Pemerintah mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi ke level yang lebih tinggi. Ditambah lagi momentum pelonggaran suku bunga yang telah dilakukan The Fed sebesar 25 basis poin pada Juli 2019 lalu menjadi 2.25 persen, dan diperkirakan akan terus *dovish* sekitar 25-50 basis poin lagi, diharapkan dapat memicu penurunan suku bunga kebijakan BI (BI 7-days repo rate) ke level yang lebih rendah. Pemerintah diharapkan mampu menyediakan kebijakan yang dapat mengakomodir pelonggaran moneter yang dilakukan BI, agar dapat dirasakan pada sektor riil. Sehingga, konsumsi dan investasi diharapkan dapat tumbuh lebih baik kedepannya, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

PERTANYAAN KRITIS Terkait Rendahnya Inflasi Indonesia

- 1 Pemerintah optimis bahwa rendahnya level inflasi saat ini merupakan hasil kerja keras pemerintah. Namun, **Apa dampak dari rendahnya inflasi saat ini terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia**. Mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 5 tahun terakhir secara rata-rata tetap berada di level 5.02 persen. **Apakah inflasi yang rendah tersebut hanya sebagai implikasi dari gejala perlambatan perekonomian nasional dan global?**
- 2 Inflasi yang terlalu rendah, akan menekan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terlalu tinggi juga akan membuat daya beli masyarakat turun mengakibatkan roda perekonomian tidak berjalan. Negara-negara Eropa dan Jepang tengah mengalami tekanan deflasi yang menekan pertumbuhan ekonomi mereka, sementara Indonesia memiliki pengalaman inflasi tinggi pada krisis ekonomi 1998 yang juga menekan pertumbuhan ekonomi. Lantas, **pada level berapa sebenarnya inflasi Indonesia dikatakan optimal untuk mendorong laju pertumbuhan Ekonomi Indonesia? Serta apakah level inflasi Indonesia yang rendah saat ini dapat dikatakan optimal dalam mendrive pertumbuhan ekonomi?**
- 3 Tingkat Inflasi dapat menjadi insentif bagi para pelaku usaha untuk melakukan investasi dan ekspansi. Karena level inflasi yang tinggi dan stabil mengindikasikan adanya konsumsi yang tinggi. Rendahnya inflasi berpotensi menurunkan minat para pelaku usaha dan investor untuk berinvestasi dan melakukan ekspansi. **Bagaimana Pemerintah dapat meyakinkan kepada para pelaku usaha dan investor, untuk tetap berinvestasi dan melakukan ekspansi di Indonesia, ditengah ketidakpastian perekonomian global saat ini?**
- 4 Pemerintah berupaya menjaga inflasi pada level yang rendah dan stabil guna menjaga daya beli masyarakat agar tidak turun. Namun disisi lain, inflasi *volatile food* yang merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi daya beli masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah justru cenderung meningkat lebih tinggi. Sebagai contoh di tahun 2019, sampai dengan Juli 2019 inflasi Indonesia secara umum sebesar 2.36 persen, sementara inflasi *volatile food* sampai dengan Juli 2019 sebesar 6.13 persen. **Upaya apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah untuk dapat menjaga inflasi *volatile food* agar lebih stabil di level yang rendah?**
- 5 Akankah inflasi yang rendah saat ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia kearah yang lebih tinggi? Atau justru akan berdampak terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi kedepannya? Serta sejauh mana ekonomi Indonesia mampu terus tumbuh ditengah perlambatan ekonomi dunia saat ini? Hal tersebut sangat penting diidentifikasi oleh Pemerintah, mengingat inflasi yang rendah dapat menjadi salah satu indikator untuk menilai kondisi perekonomian saat ini.

PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN DPR RI
Telp. 021-5715635 / 021-5715656

LAMPIRAN KEGIATAN IV

Lampiran 4.1 Catatan Hasil Konsultasi Dengan Mentor;

Lampiran 4.2 Daftar Inventarisir Data-Data Yang Digunakan;

Lampiran 4.3 Laporan Hasil Kegiatan (Laporan Aktualisasi);

Lampiran 4.4 Bukti Terima Laporan dari Mentor dan Atasan

LAMPIRAN 4.1 Catatan Hasil Konsultasi Dengan Mentor



Pusat Kajian Anggaran
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Kode Pos 10270
Telp. (021) 5715730 Fax. (021) 5715933 Laman: puskajiananggaran.dpr.go.id

CATATAN HASIL KONSULTASI CPNS DENGAN MENTOR

<u>Hari, Tanggal</u>	:	Selasa, 27 Agustus 2019
<u>Pukul</u>	:	08.00 WIB – 09.00 WIB
<u>Tempat</u>	:	Ruang Analis APBN Pusat Kajian Anggaran Gedung Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI
<u>Acara</u>	:	Melakukan Konsultasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi serta meminta arahan dalam penyusunan laporan kegiatan (laporan aktualisasi) kepada mentor
<u>Narasumber</u>	:	Rastri Paramita, S.E., M.M.

1. PEMBUKAAN

CPNS melakukan konsultasi dengan Koordinator Bidang Perencanaan dan Asumsi Dasar Ekonomi Makro (PADEM). Kegiatan dimulai dengan CPNS melaporkan hasil kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan sebelumnya, menanyakan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti setelah sosialisasi, serta meminta masukan dan saran terkait penyusunan laporan kegiatan (Laporan Aktualisasi). Kegiatan dilakukan pada hari Selasa, 27 Agustus 2019 pukul 08.00 – 09.00 WIB.

2. POKOK- POKOK HASIL PEMBAHASAN

Adapun dari pokok-pokok hasil konsultasi yang dilakukan tersebut, penulis mendapatkan beberapa saran dan masukan untuk perbaikan, antara lain:

- a) Mentor meminta agar analisis yang telah dipresentasikan tersebut disempurnakan berdasarkan saran masukan yang telah didapatkan dari hasil sosialisasi;
- b) Mentor merekomendasikan agar dalam Laporan Aktualisasi ditekankan mengenai detail produk, dimana produk yang dihasilkan ini merupakan suplemen yang diberikan kepada para Anggota Dewan sesuai dengan siklus dalam pembahasan APBN;
- c) Mentor merekomendasikan agar dalam Laporan Aktualisasi dapat lebih ditekankan mengenai dasar pemilihan isu/topik dalam analisis yang dilakukan, detail lama pengerjaan analisis, detail mengenai data-data apa saja yang digunakan, serta sumber data tersebut diperoleh darimana;
- d) Mentor merekomendasikan agar dalam Laporan Aktualisasi dapat dijelaskan mengenai analisis gap yang melatar belakangi dibuatnya analisis ini.

3. PENUTUP

Demikianlah Catatan atas hasil komunikasi Riza Aditya Syafri dengan Koordinator Bidang Perencanaan dan Asumsi Dasar Ekonomi Makro yang juga sekaligus mentor.

Jakarta, 27 Agustus 2019

Mengetahui,

Mentor



Rastri Paramita, S.E., M.M

NIP. 198001262014022002

Lampiran 4.2 Daftar Inventarisir Bahan yang digunakan

Gambar 9 Folder Inventarisir Data yang digunakan

1. Draft Analisis	8/28/2019 10:01 PM	File folder
2. Isu dan Data	8/28/2019 8:36 PM	File folder
3. Evidence	8/27/2019 12:49 PM	File folder
4. Template & Rancangan terkait	8/13/2019 8:19 AM	File folder

Gambar Draft Laporan Aktualisasi

peraturan terakrit	8/8/2019 10:02 AM	File folder	
referensi	8/28/2019 10:16 PM	File folder	
10_Riza Aditya Syafri - Draft Laporan Aktualisasi	8/7/2019 1:50 PM	Microsoft Word D...	413 KB
10_Riza Aditya Syafri - Draft Laporan Aktualisasi_V2	8/12/2019 10:09 AM	Microsoft Word D...	808 KB
10_Riza Aditya Syafri - Draft Laporan Aktualisasi_V3	8/27/2019 9:11 AM	Microsoft Word D...	1,076 KB
10_Riza Aditya Syafri - Draft Laporan Aktualisasi_V4	8/28/2019 1:09 PM	Microsoft Word D...	1,383 KB
10_Riza Aditya Syafri - Draft Laporan Aktualisasi_V5	8/28/2019 10:01 PM	Microsoft Word D...	3,197 KB
10_Riza Aditya Syafri - Rancangan Aktualisasi	8/8/2019 3:39 PM	Microsoft Word D...	521 KB
10_Riza Aditya Syafri - Rancangan Aktualisasi	7/25/2019 8:31 AM	PDF File	262 KB
Bahan Gambar Kegiatan.eddx	8/27/2019 10:49 AM	EDDX File	51 KB
Bahan Gambar Kegiatan	8/27/2019 10:58 AM	Microsoft PowerPo...	440 KB
tahapan kegiatan - bahan	8/27/2019 11:41 AM	Microsoft PowerPo...	1,097 KB
Perka Lan No. 12 tahun 2018 - tentang Latsar	8/8/2019 10:02 AM	PDF File	678 KB
PERMEN 39 2014 - tentang Analisis APBN	8/1/2019 11:08 AM	PDF File	256 KB
Perpres No 23 tahun 2005 tentang Sekjen DPR RI	8/1/2019 11:16 AM	PDF File	14 KB
Perpres no 27 Tahun 2015 - tentang Setjen dan BKD DPR-RI	8/1/2019 11:16 AM	PDF File	74 KB
UU Nomor 2 Tahun 2018 - UU MD3	8/1/2019 11:13 AM	PDF File	3,282 KB
UU5-2014 Aparatur Sipil Negara	8/1/2019 11:12 AM	PDF File	381 KB

Gambar Daftar Evidence dalam penyusunan Laporan Aktualisasi

1. Evidence Kegiatan 1	8/28/2019 1:15 PM	File folder
2. Evidence Kegiatan 2	8/28/2019 9:46 PM	File folder
3. Evidence Kegiatan 3	8/28/2019 9:46 PM	File folder
4. Evidence Kegiatan 4	8/28/2019 2:44 PM	File folder
5. Kartu Kendali (Coach, Mentor)	8/28/2019 10:18 PM	File folder
Bukti Foto	8/27/2019 12:50 PM	File folder

Gambar Bahan-Bahan Penyusunan Analisis Critical View

📁 Draft Analisis	8/28/2019 9:45 PM	File folder	
📁 Jurnal Inflasi	8/28/2019 9:13 PM	File folder	
📁 tambahan analisis pembahasan APBN In...	8/28/2019 8:39 PM	File folder	
📄 "Low inflation presents challenges for the...	8/18/2019 8:41 PM	Microsoft Word D...	16 KB
📄 Bahaya Inflasi Rendah	8/19/2019 8:24 AM	Microsoft Word D...	15 KB
📄 Could low inflation be a bad thing	8/18/2019 9:25 PM	Microsoft Word D...	169 KB
📄 Critical Analysis of Inflation and Price Sta...	8/18/2019 9:13 PM	PDF File	526 KB
📄 Data analisis Critical Review	8/23/2019 8:25 AM	Microsoft Excel 97...	99 KB
📄 Effects of a falling inflation rate	8/19/2019 11:37 AM	Microsoft Word D...	78 KB
📄 erome Powell Is Right—We Should Be W...	8/18/2019 9:21 PM	Microsoft Word D...	15 KB
📄 Everything you need to know about inflat...	8/18/2019 8:28 PM	Microsoft Word D...	15 KB
📄 faktor-faktor penyebab inflasi	8/18/2019 10:43 AM	JPG File	155 KB
📄 FRBSF Economic Letter	8/18/2019 8:13 PM	Microsoft Word D...	48 KB
📄 Indef Ingatkan Inflasi Rendah juga Tunjuk...	8/19/2019 8:35 AM	Microsoft Word D...	15 KB
📄 Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi	7/23/2019 4:03 PM	Microsoft Word D...	14 KB
📄 inflasi inti dan respon kebijakan	8/18/2019 10:32 AM	PDF File	14 KB
📄 Inflasi Rendah Gak Selamanya Baik, Ini 4 ...	8/19/2019 8:34 AM	Microsoft Word D...	21 KB
📄 Inflation in Indonesia (Consumer Price In...	8/19/2019 8:49 AM	Microsoft Word D...	168 KB
📄 Inflation Indonesia	7/23/2019 7:09 PM	Microsoft Word D...	168 KB
📄 Issues in inflation targeting	8/18/2019 9:14 PM	PDF File	93 KB
📄 kem_ppkf_2020	8/19/2019 9:22 AM	PDF File	17,005 KB
📄 Lapsem APBN TA 2019	7/23/2019 8:27 AM	PDF File	14,507 KB
📄 RUU P2 APBN TA 2018	7/23/2019 8:27 AM	PDF File	1,371 KB
📄 What's the Problem with Low Inflation	8/18/2019 9:24 PM	Microsoft Word D...	19 KB

LAMPIRAN 4.3 Laporan Hasil Kegiatan (Laporan Aktualisasi)



**LAPORAN AKTUALISASI
PESERTA PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI
ANGKATAN II**

**Optimalisasi Peran Pusat Kajian Anggaran
Dalam Memberikan Dukungan Substansi Kepada Anggota Dewan
Melalui Analisis Kritis yang Tepat Sasaran**

Nama : Riza Aditya Syafri
NIP : 199411172019031001
Jabatan : Calon Analis APBN Ahli

**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2019**

Lampiran 4.4 Bukti Terima Laporan Dari Mentor dan Atasan



**Pusat Kajian Anggaran
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Kode Pos 10270
Telp. (021) 5715730 Fax. (021) 5715933 Laman: puskajianggaran.dpr.go.id

CATATAN HASIL PENYERAHAN LAPORAN AKTUALISASI KEPADA ATASAN DAN MENTOR

<u>Hari, Tanggal</u>	:	Jum'at, 30 Agustus 2019
<u>Pukul</u>	:	13.00 WIB
<u>Tempat</u>	:	Ruang Analis APBN Pusat Kajian Anggaran Gedung Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI
<u>Acara</u>	:	CPNS Menyerahkan Laporan Aktualisasi yang Telah Dibuat Kepada Atasan dan Mentor
<u>Narasumber</u>	:	1. Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si. 2. Rastri Paramita, S.E., M.M.

1. PEMBUKAAN

CPNS yang telah menyelesaikan Laporan Aktualisasi menyerahkan Laporan Aktualisasinya kepada Atasan dan Mentor sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Aktualisasi yang telah dilakukan. Proses penyerahan Laporan ini dilakukan pada hari Jum'at, 30 Agustus 2019 pukul 13.00 WIB, bertempat di Ruang Analis APBN Pusat Kajian Anggaran. Atasan dan Mentor menerima Laporan Aktualisasi yang telah dibuat oleh CPNS.

2. POKOK- POKOK HASIL PEMBAHASAN

Adapun dari pokok-pokok hasil konsultasi yang dilakukan tersebut, penulis mendapatkan beberapa saran dan masukan untuk perbaikan, antara lain:

- a) Atasan dan Mentor menerima Laporan Aktualisasi yang telah dilaksanakan oleh CPNS;

- b) Atasan dan Mentor mengomentari dan memberikan pertanyaan seputar Laporan Aktualisasi yang dibuat oleh CPNS;

3. PENUTUP

Demikianlah Catatan atas hasil penyerahan Laporan Aktualisasi Riza Aditya Syafri dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran, dan Koordinator Bidang Perencanaan dan Asumsi Dasar Ekonomi Makro yang juga sekaligus mentor.

Jakarta, 30 Agustus 2019

Mengetahui,
Mentor



Rastri Paramita, S.E., M.M
NIP. 198001262014022002

Mengetahui,
Kepala Pusat Kajian Anggaran



Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.
NIP. 197109111997031005